



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 529 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota dengan mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan dalam rangka penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Satuan ...

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

19. Akuntansi ...

19. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
20. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
21. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.
22. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.
23. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
24. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PUSAP, adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis AkruaI dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.

26. Sistem ...

26. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
27. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
28. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
30. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
31. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
32. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

33. Laporan ...

33. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
34. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
35. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
36. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
37. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
38. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
39. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

40. Pendapatan ...

40. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
41. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
42. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
43. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
44. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
45. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
46. Koreksi adalah tindakan pembedulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
47. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

48. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi SKPD;
- b. Sistem Akuntansi SKPKD; dan
- c. Bagan Akun Standar.

Pasal 3

- (1) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas Pendapatan-LO, Beban, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Penyesuaian dan Koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Sistem Akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi, mencakup akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas level 1 (satu) sampai dengan level 5 (lima), meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

SAPD dan BAS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka ketentuan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2014

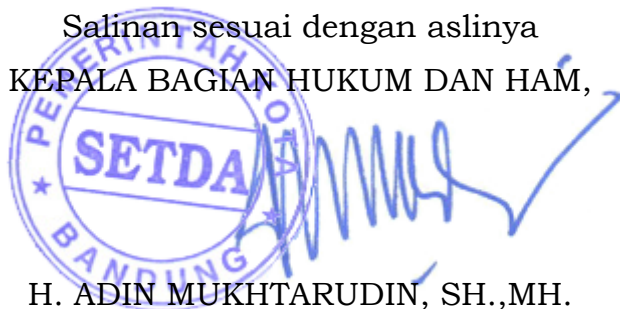
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 529 Tahun 2014

TANGGAL : 26 Mei 2014

SISTEM AKUNTANSI SKPD

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang yang dilakukan saat penyusunan laporan keuangan.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang memiliki tugas, sebagai berikut:

- a. mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti transaksi yang belum diterima pembayarannya ke Buku Jurnal;
- b. melakukan jurnal transaksi atau kejadian pendapatan-LO kedalam Buku Besar masing-masing rekening;
- c. melakukan rekonsiliasi terhadap piutang dan menghitung penyisihannya.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang SKPD:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- Bukti penerimaan atau setoran;
- Bukti Memorial;
- Dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi pada saat penyusunan laporan keuangan untuk transaksi piutang pada SKPD, adalah:

- a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan Pendapatan yang belum diterima pembayarannya. Terhadap SKP/SKR-Daerah yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah:

Piutang.....	xxx	
Pendapatan-LO.....		xxx

Selain itu, PPK-SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pendapatan-LO atas penerimaan pendapatan yang bukan berasal dari SKP/SKR daerah tahun berjalan (penerimaan pendapatan yang berasal dari penerbitan SKP/SKR Daerah tahun sebelumnya) untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Jurnal Penyesuaian yang dilakukan adalah:

Pendapatan-LO.....	xxx	
Piutang		xxx

- b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang (Aset Lainnya) ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang (Aset Lancar), yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Jurnal Penyesuaian yang dilakukan adalah:

Bagian Lancar Tagihan.....	xxx	
Tagihan Pinjaman.....		xxx

- c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (aging schedule).

Berdasarkan buku piutang, PPK-SKPD membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan pada saat penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan perkembangan kualitas piutang.

Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah:

Beban Penyisihan Piutang.....	xxx	
Penyisihan Piutang.....		xxx

d. Mencatat Penghapus bukuan dan Penghapus tagihan Piutang.

Berdasarkan Keputusan Walikota, terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka PPK-SKPD akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang.

Sedangkan untuk penghapustagihan piutang PPK tidak melakukan pencatatan ke dalam jurnal.

Jurnal untuk penghapusan Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	xxx	
Beban Penyisihan Piutang.....	xxx	
Piutang.....		xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	xxx	
Piutang.....		xxx

SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi yang terkait dengan Persediaan.

Pengakuan persediaan secara umum dilakukan dengan pendekatan beban. Melalui pendekatan beban, transaksi pembelian persediaan tidak secara langsung menambah akun persediaan, melainkan diakui sebagai beban. Sedangkan metode pencatatan persediaan yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan adalah metode periodik.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan, antara lain:

a. Penyimpan Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas pengelolaan persediaan. Di mana pada akhir periode melakukan stock opname persediaan.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

d. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan, antara lain:

- bukti Belanja Persediaan;
- Berita Acara Serah Terima Barang;
- Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun;
- SP2D-LS;
- dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD dengan Metode Periodik adalah sebagai berikut:

a. Pada awal tahun

Berdasarkan Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

Beban Persediaan	xxx
Persediaan	xxx

b. Pada saat pembelian

Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD atau Invoice, PPK-SKPD akan mencatat Beban Persediaan dan Kas pada Bendahara Pengeluaran.

Beban Persediaan	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

c. Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan.

d. Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan Berita Acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

Beban Persediaan yang sesungguhnya sebesar saldo awal ditambah pembelian selama tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan.

Persediaan	xxx
Beban Persediaan	xxx

SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai Aset Tetap, yaitu:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. melebihi batasan kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

1. Pihak yang Terkait

Pihak yang terkait dalam Sistem Akuntansi Aset tetap, antara lain:

a. Penyimpan Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, penyimpan barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas pengelolaan aset tetap.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

2. Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap, antara lain:

- Berita Acara serah terima barang atau pekerjaan;
- SP2D-LS;
- SPJ;
- Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap;
- Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset;
- Dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur penambahan nilai aset tetap serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan nilai aset tetap.

a. Penambahan Aset tetap

- 1) Berdasarkan SPJ yang dibuat Bendahara Pengeluaran untuk pengadaan aset tetap kepada Pihak Ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....xxx

Setelah SP2D GU atau Nihil diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan.

Belanja Modal.....xxx
Perubahan SAL.....xxx

- 2) Berdasarkan SP2D LS diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada Pihak Ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....xxx
RK PPKD.....xxx

Belanja Modal.....xxx
Perubahan SAL.....xxx

- 3) Berdasarkan Naskah Hibah dari Pihak Ketiga dan Berita Acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....xxx
Pendapatan hibah LO.....xxx

b. Pengurangan Aset Tetap

- 1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Aset Lainnya.....	xxx
Akumulasi Penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx

- 2) Penghapusan aset tetap yang telah direklasifikasi ke aset lainnya berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Aset Tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Defisit penghapusan aset lainnya.....	xxx
Aset Lainnya.....	xxx

- 3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian, PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun sampai dengan bulan penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban Penyusutan.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx

- 4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Kas Lainnya	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Surplus penjualan aset tetap...LO.....	xxx

Pencatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima.

Perubahan SAL.....	xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan-	
LRA.....	xxx

- 5) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Kas Lainnya	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Defisit penjualan aset tetap...LO	xxx
Aset Tetap.....	xxx

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima.

Perubahan SAL	xxx
Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipisahkan LRA	xxx

- 6) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk)	xxx
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar ...	xxx
Aset Tetap ...(yang keluar)	xxx
Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO	xxx

- 7) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan Keputusan Walikota tentang Hibah dan Naskah Pemberian Hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Beban Hibah	xxx
Aset Tetap	xxx

- 8) Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal:

Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx
Aset Tetap	xxx

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan Pihak Ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya. Kewenangan ini khususnya untuk DPKAD dalam fungsinya sebagai SKPD.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya, antara lain:

a. Bendahara Penerimaan

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya kepada PPK-SKPD.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikandokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya kepada PPK-SKPD.

c. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD yang memiliki tugas, sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi atau kejadian aset lainnya berdasarkan bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; dan
- 2) memposting jurnal transaksi atau kejadian aset lainnya kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya, antara lain:

- a. kontrak atau perjanjian penjualan secara angsuran atau Berita Acara penjualan atau yang dipersamakan;
- b. keputusan pembebanan tuntutan ganti kerugian Daerah dan/atau dokumen yang dipersamakan;
- c. Kontrak atau Perjanjian Sewa atau yang dipersamakan.

- d. kontrak atau perjanjian kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan;
- e. kontrak atau perjanjian kerjasama-BOT atau dokumen yang dipersamakan;
- f. kontrak atau perjanjian kerjasama-BOT dan BAST atau dokumen yang dipersamakan;
- g. bukti pembelian atau dokumen yang dipersamakan;
- h. surat lisensi dan frenchise atau ijin dari pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tentang Hak Cipta dan Paten atau dokumen yang dipersamakan;
- i. surat usulan penghapusan atau dokumen yang dipersamakan;
- j. dokumen lainnya yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi 11sset lainnya pada SKPD, adalah:

a. Pada saat pengakuan atau pembelian

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Ketika dilaksanakan penjualan 11sset ini secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Tagihan Angsuran Penjualan	xxx
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx
Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	xxx
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan Angsuran Penjualan	xxx
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	xxx
Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	xxx
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	xxx

2) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tuntutan Ganti Rugi	xxx
Pendapatan TGR-LO.....	xxx

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama atau kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama atau kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-.....	xxx
Aset Tetap-.....	xxx

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama atau kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama atau kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-.....	xxx
Aset Tetap/Aset Lain-Lain-.....	xxx

5) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah (BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga atau investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah (BOT)-.....	xxx
Tanah-.....	xxx

6) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Serah Guna (BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan atau pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan atau dioperasikan. Penyerahan asset oleh Pihak Ketiga atau investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga atau investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pada saat kontrak ditandatangani dan dibuat BAST, tanah milik Pemerintah Daerah dikerjasamakan.

Bangun Serah Guna (BTO)-.....	xxx
Tanah-.....	xxx

Pada saat bangunan dengan BTO telah selesai dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan BAST.

Bangun Serah Guna (BTO)-.....	xxx
Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx

7) Aset Tidak Berwujud

Diakui pada saat Aset Tidak Berwujud diperoleh, maka PPK-SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud.

Aset Tidak Berwujud-.....	xxx
R/K PPKD.....	xxx

b. Penyesuaian Tagihan Jangka Panjang

Karena tagihan tersebut bersifat jangka panjang maka pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Tagihan Penjualan Angsuran.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - ..	xxx
Tagihan Angsuran Penjualan	xxx

Tuntutan Ganti Rugi.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi -.....	xxx
Tuntutan Ganti Rugi	xxx

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Rusak Berat

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu asset direklasifikasi menjadi asset lainnya, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset Lain-lain	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Aset Tetap.....	xxx

d. Penyusutan KSO/BTO

Penyusutan terhadap KSO/BTO dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Penyusutan -.....	xxx
Akumulasi/Aset KSO/BTO	xxx

e. Amortisasi

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud dilakukan dengan jurnal penyesuaian:

Beban Amortisasi -.....	xxx
Akumulasi Amortisasi-.....	xxx

f. Pada saat selesai dikerjasamakan

Penyerahan asset oleh Pihak Ketiga atau investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga atau investor.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah (BOT)

Tanah -.....	xxx
Bangunan -.....	xxx
Bangun Guna Serah (BOT)	xxx
Pendapatan Lainnya-LO	xxx

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Serah Guna (BTO)

Tanah -.....	xxx
Bangunan -.....	xxx
Bangun Serah Guna (BTO)	xxx

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada Pihak Ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan kepada entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

1. Pihak-pihak Terkait

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

PPK memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) mencatat transaksi yang terkait kewajiban jangka pendek berdasarkan bukti yang terkait; dan
- 2) melakukan posting jurnal kewajiban jangka pendek ke dalam buku besarnya masing-masing.

b. Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) mengeluarkan uang untuk membayar beban yang menggunakan mekanisme UP dan TU; dan
- 2) menerima bukti pembayaran dari PPTK.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PPTK memiliki tugas dan wewenang untuk:

- 1) menerima uang dari Bendahara Pengeluaran untuk membayar kewajiban jangka pendek; dan
- 2) menyerahkan bukti pembayaran tersebut kepada PPK untuk dijadikan dasar pencatatan.

2. Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban, antara lain:

- a. Berita Acara serah terima barang atau pekerjaan;
- b. Surat tagihan;
- c. Dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan

Perlakuan akuntansi pada saat penyusunan laporan keuangan untuk transaksi kewajiban pada SKPD, adalah:

Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen tagihan yang belum dilakukan pembayarannya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD melakukan inventarisasi atas dokumen tagihan yang belum dilakukan pembayaran. Terhadap tagihan belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatatkan pengakuan beban dan kewajiban sebagai jurnal penyesuaian.

Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah:

Beban	xxx
Utang	xxx

Selain itu, PPK-SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pembayaran yang bukan berasal dari tagihan atau konsumsi tahun berjalan untuk menghindari duplikasi pencatatan beban.

Jurnal Penyesuaian yang dilakukan adalah:

Utang	xxx
Beban	xxx

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah dalam lingkup SKPD khususnya DPKAD selaku SKPD, meliputi:

- a. pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- l. pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan
- m. pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pendapatan pada SKPD, adalah:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- c. Bendahara Penerimaan SKPD;
- d. BUD; dan
- e. Pihak Ketiga.

Tugas dan wewenang

- a. PA/KPA, mempunyai tugas dan wewenang untuk:
menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - 1) mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid kepada Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya; dan
 - 3) melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan untuk penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan.
- c. Bendahara Penerimaan SKPD, mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan; dan
 - 2) melakukan penyetoran uang yang diterima, kepada kas Daerah setiap hari.
- d. BUD, mempunyai tugas dan wewenang untuk:
 - menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh Pihak Ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.
- e. Pihak Ketiga:
 - Pihak Ketiga adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA secara umum dikelompokan, sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
- d. Surat Tanda Setoran (STS);
- e. bukti transfer atau setor;
- f. nota kredit bank;
- g. bukti memorial;
- h. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi beserta pencatatannya

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPD, adalah:

a. selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA)

1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau Pihak Ketiga lainnya melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan, dan atas pembayaran tersebut, Bendahara Penerimaan menerbitkan TBP. Selanjutnya TBP tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan penambahan kas di Bendahara Penerimaan, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA. Berdasar TBP tersebut, Bendahara Penerimaan membuat STS untuk menyetorkan penerimaan tersebut kepada Kas Daerah. Selanjutnya STS tersebut ditembuskan kepada PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD dan pengurangan kas pada Bendahara Penerimaan.

2) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau Pihak Ketiga lainnya melakukan pembayaran langsung kepada kas Daerah, Kas Daerah akan menerbitkan bukti transfer atau setor untuk Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau Pihak Ketiga lainnya dan nota kredit untuk PPK-SKPD untuk membukukan R/K PPKD, pengakuan Pendapatan-LO, dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima dengan atau tanpa terbitnya dokumen penetapan. Pendapatan baik dengan metode official assesment ataupun self assesment diperlakukan sama yaitu saat kas diterima.

a) Pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan, maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Pendapatan-LO.....		xxx

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan-LRA		xxx

Pada saat kas disetor oleh Bendahara Penerimaan kepada Kas Daerah, dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

R/K PPKD	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

- b) Apabila Pihak Ketiga langsung menysetor kepada Kas Daerah, maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

R/K PPKD	xxx
Pendapatan-LO	xxx

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan-LRA.....	xxx

- b. pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat 3 (tiga) kondisi pengakuan Pendapatan-LO, yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas

- a) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan yang belum diterima pembayarannya dengan membuat buku memorial. Terhadap dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar tersebut, PPK-SKPD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian;
- b) PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan pendapatan yang pendapatan-LO telah diakui pada tahun sebelumnya, untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. PPK-SKPD melakukan rekonsiliasi dokumen

penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

- (1) Jurnal Penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya.

Piutang	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

- (2) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya.

Pendapatan-LO	xxx	
Piutang		xxx

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas:

- a) PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak Pemerintah Daerah). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak Pemerintah Daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka.
- b) PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial, sebagai berikut:

Pendapatan-LO	xxx	
Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

- c) Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak Pemerintah Daerah di tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	
Pendapatan-LO		xxx

- 3) Pendapatan-LO diakui bersifat non-kas.

Pendapatan-LO bersifat non kas berupa pendapatan yang tidak melibatkan kas, misalnya perolehan aset tetap yang berasal dari hibah.

Aset Tetap	xxx	
Pendapatan Hibah -LO		xxx

Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan Aset Tetap.

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

Akuntansi Beban dan belanja pada lingkup SKPD, meliputi:

- a. pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan;
- b. beban honorarium atau lembur atau vakasi atau tunjangan khusus;
- c. beban pegawai transito;
- d. beban kontribusi sosial;
- e. beban barang;
- f. beban jasa;
- g. beban pemeliharaan;
- h. beban perjalanan dinas; dan
- i. beban murni akrual.

Belanja modal diakui hanya ada untuk basis kas (Laporan Realisasi Anggaran) tidak termasuk dalam basis akrual (Laporan Operasional).

Pembahasan akuntansi beban dan belanja, meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di Lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.

b. PPKD selaku BUD

Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.

c. Bendahara Pengeluaran

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) menerima bukti tagihan dari pihak ketiga atau dokumen bukti pembayaran atau dokumen sumber lainnya;
- 2) membuat dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan atau dokumen bukti pembayaran atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi;
- 3) melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterima dengan uang persediaan atau membuat SPP;
- 4) melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya;
- 5) menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pemaaran seperti SP2D yang diterimanya atau dokumen sumber lainnya kepada PPK-SKPD.

d. PPK-SKPD

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

- 1) menerima dokumen pertanggungjawaban dari Bendahara Pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti;
- 2) menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuat Memo Jurnal;
- 3) melakukan pencatatan dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi atau Memo Jurnal yang telah dibuat;
- 4) melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan dalam Buku Besar;
- 5) membuat jurnal koreksi, penyesuaian, penutup dan menyusun Laporan Keuangan.

e. Pihak Ketiga atau Pihak Terkait Lainnya

Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), melakukan penagihan, menerima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran atau BUD menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D.

2. Dokumen yang terkait

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Beban dan Belanja SKPD, meliputi:

- a. Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
- b. surat tagihan dari pihak ketiga dan dokumen pendukung tagihan;
- c. surat bukti pengeluaran atau belanja;
- d. Surat pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran;
- e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ);
- f. SP2D LS/GU/Nihil;
- g. dokumen Kontrak atau Perjanjian;
- h. dokumen lainnya.

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPD, adalah:

- a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi, sebagai berikut:
 - a. melalui Uang Persediaan
Beban dicatat ketika Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.
 - b. melalui Kas Daerah (LS)
Beban dan belanja dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.
- b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat 3 (tiga) kondisi pengakuan Beban, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui setelah pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui bersifat non-kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas sepanjang tahun.

Dalam hal tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan kewajiban (pengakuan beban) dan pengeluaran kas serta masih dalam periode pelaporan, maka beban dapat diakui pada saat pengeluaran kas, pada saat penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran. Misalnya, terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab itu ditinjau dari manfaat dan biaya, transaksi ini akan lebih efisien apabila diakui secara pada saat terjadi pengeluaran kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan:

a) Perbedaan waktu tidak signifikan

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan beban (timbulnya dokumen penetapan) dan pengeluarann kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) di mana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

b) Nilai tagihan dan nilai pembayaran sama

Pelaksanaan anggaran belanja operasional umumnya dimulai dari tagihan Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan diakhiri dengan pengeluaran kas atas tagihan tersebut setelah diverifikasi. Nilai tagihan setelah diverifikasi dan pengeluaran kas atas tagihan tersebut umumnya sama sehingga tidak menimbulkan utang atau nilai beban yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

c) Karakteristik belanja operasional

Sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Terkait dengan pengakuan beban pada saat pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

(1) Pencatatan atas pembayaran melalui PPTK

Pada saat Bendahara Pengeluaran memberikan panjar kegiatan kepada PPTK maka perlu dilakukan pencatatan, sebagai berikut:

Panjar Kegiatan	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx

Pada saat PPTK mempertanggungjawabkan penggunaan panjar kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Uang Muka.....	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx
Panjar Kegiatan.....	xxx

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK.

Pada saat SPJ dari PPTK di atas disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran akan dijurnal, sebagai berikut:

Beban	xxx
Uang Muka	xxx

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D-GU oleh BUD yang dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Belanja	xxx
Perubahan SAL	xxx

- (2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Beban.....	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx

Apabila telah diterbitkan SP2D-GU dari BUD maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Belanja.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

(3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Kas Daerah (BUD)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Beban.....	xxx
R/K PPKD	xxx

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Belanja	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

Jika dalam pengeluaran kas/belanja terdapat pajak yang dpotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran maka atas potongan/pungutan tersebut dicatat dengan jurnal, sebagai berikut:

Kas Lainnya	xxx
Utang Pajak	xxx

Setoran atas potongan/pungutan tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Utang Pajak	xxx
Kas Lainnya	xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat 3 (tiga) kondisi pengakuan Beban yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban.....	xxx
Utang Beban	xxx

2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan apabila terdapat dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian, sebagai berikut:

Beban dibayar dimuka.....	xxx
Beban	xxx

3) Beban diakui bersifat non-kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat beban yang bersifat non kas karena konsumsi aset atau berkurangnya manfaat aset sehingga dilakukan jurnal penyesuaian, misalnya penyusutan dan penyisihan serta amortisasi.

Pembahasan lebih lanjut terkait penyusutan, penyisihan dan amortisasi terdapat pada sistem akuntansi aset tetap, piutang dan aset tetap lainnya.

Selain beban yang bersifat konsumsi atau penurunan manfaat aset terdapat juga beban yang tidak melibatkan kas, misalnya pemberian hibah aset tetap. Atas hal ini dilakukan jurnal, sebagai berikut:

Beban Hibah	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx
Aset Tetap	xxx

SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. kesalahan interpretasi fakta;
- e. kecurangan; atau
- f. kelalaian.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik, serta kesalahan yang tidak berulang.

1. Koreksi Kesalahan yang Berulang dan Sistemik.

Kesalahan ini disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Koreksi ini biasanya terjadi pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan SAP, jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan kas untuk mengembalikan kelebihan atau kekurangan pendapatan dengan mengurangi atau menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Jurnal standar untuk koreksi ini sebagai berikut:

a. Transaksi Wajib Pajak Lebih Bayar:

Pendapatan Pajak ... -LO.....	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pendapatan Pajak ... -LRA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

b. Transaksi Wajib Pajak Kurang Bayar:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan Pajak ... -LO	xxx

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Pajak ... -LRA	xxx

2. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang.

Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa yang akan datang. Koreksi ini dapat terjadi pada periode berjalan maupun pada periode sebelumnya.

a. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Berjalan

Baik mempengaruhi posisi Kas maupun tidak, koreksi atas kesalahan ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban. Apabila tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode Sebelumnya.

1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:

- a) jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- b) jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan

- a) koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
- b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran ..	xxx
Pendapatan Lainnya-LO	xxx

Perubahan SAL	xxx
Pendapatan Lainnya-LRA	xxx

- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

Ekuitas	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran...	xxx
Ekuitas	xxx

Perubahan SAL	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

Ekuitas	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....	xxx

SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan akun neraca yang terkait.

- (1) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Contoh, Pemerintah Daerah menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- (2) Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh, Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ..	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

- (3) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh, Pemerintah Daerah menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada Pemerintah Pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang Pemerintah Pusat.....	xxx

(4) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh, terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada Pemerintah Pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

(1) jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, Pemerintah Daerah kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx
Tanah Kantor	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

(2) jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, Pemerintah Daerah kurang membayar harga peralatan kantor yang dibeli.

Peralatan Kantor	xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

(1) jika menambah Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

(2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL	xxx

PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA

1. Definisi

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas menuju Akruwal (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi termaksud maka perlu ditampilkan kembali antara lain untuk akun, sebagai berikut:

- a. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- c. Aset Tetap, yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- d. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- e. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- f. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
- g. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

2. Tahapan Penyajian Kembali

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca, adalah:

- a. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun terkait, misalnya: untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi, dan seterusnya;

- b. menyajikan kembali akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung tentang Kebijakan Akuntansi, yang berbasis akrual.

3 . Jurnal Standar

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca, sebagai berikut:

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS PENYISIHAN PIUTANG (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan sampai dengan tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai buku aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai utang bunga	EKUITAS Utang Bunga (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga)	xxx	xxx

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai pendapatan diterima dimuka	EKUITAS Pendapatan diterima dimuka (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai pendapatan diterima dimuka)	xxx	xxx
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	xxx	xxx

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya.

Siklus Akuntansi SKPD.

Kegiatan akuntansi pada SKPD dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan.

1. Analisis Transaksi

Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama untuk mengidentifikasikan jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam memahami ayat jurnal, baik yang sederhana maupun yang rumit.

Urutan peristiwa didalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti transaksi adalah berupa dokumen sumber, misalnya SP2D, Tanda Bukti Penerimaan (TBP), dan lain-lain. Bukti ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun tertentu. Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan identifikasi dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan dalam Jurnal.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Transaksi keuangan dicatat oleh PPK-SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya kedalam buku jurnal. Dalam

melakukan pencatatan transaksi kedalam jurnal digunakan metode *double-entry* di mana setiap transaksi akan dicatat disisi debit dan sisi kredit.

Dalam penulisan jurnal, terdapat beberapa aturan, yaitu:

- a. jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya kejadian atau transaksi keuangan;
- b. akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit;
- c. akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan;
- d. pencatatan dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau transaksi keuangan.

Format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BUKU JURNAL

SKPD :

Halaman :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6

Ada 2 (dua) basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi, yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian, akan terdapat 2 (dua) jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu:

Pertama, adalah jurnal yang akan mencatat transaksi secara akrual khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LO (Jurnal Laporan Operasional).

Jurnal LO (Jurnal Laporan Operasional) digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, dan Beban. Jurnal LO dan Neraca ini akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

Kedua, adalah jurnal yang akan mencatat transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi

anggaran (LRA) dan terdapat aliran kas masuk yang meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan aliran kas keluar yang meliputi belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LRA (Jurnal Laporan Realisasi Anggaran).

Jurnal LRA (Jurnal Laporan Realisasi Anggaran) digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas Pendapatan-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal LRA ini nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan SAL. Jurnal LRA ini digunakan untuk menjurnal realisasi anggaran selama periode berjalan.

Selama periode berjalan, sebuah transaksi akan dicatat menggunakan jurnal LRA jika transaksi tersebut memenuhi 2 (dua) syarat berikut:

- (1) terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar; dan
- (2) merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan.

Adanya realisasi anggaran, baik realisasi Pendapatan, realisasi Penerimaan Pembiayaan, realisasi Belanja, maupun realisasi Pengeluaran Pembiayaan akan mempengaruhi nilai Perubahan SAL. Dengan demikian, setiap terjadi penjurnalaan atas realisasi anggaran, maka akun lawannya adalah akun Perubahan SAL.

Dengan adanya Jurnal LO dan Neraca serta Jurnal LRA, maka setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, Fungsi Akuntansi disetiap entitas harus mencatatnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk menyusun LO, Neraca, dan LRA.

3) Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per-akun. Setiap akun memiliki satu buku besar sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Dalam tahap ini, PPK-SKPD mem-*posting* atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal kepada buku besar masing-masing akun.

Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BUKU BESAR

SKPD :
 KODE REKENING :
 NAMA REKENING :
 PAGU APBD :
 PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6

Tiap buku besar memuat informasi nama SKPD, nama rekening, kode rekening, pagu APBD dan pagu perubahan APBD sebagai kontrol, batas maksimal transaksi untuk masing-masing akun tidak boleh melebihi pagu anggarannya terutama untuk pagu anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom uraian diisi dengan informasi keterangan terkait transaksi. Kemudian di kolom debit atau kredit diisi nilai nominal transaksi sesuai dengan jurnal. Kolom saldo diisi dengan akumulasi nilai transaksi dari akun terkait.

Sebelum melakukan *posting*, terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang diperoleh dari Neraca Awal Tahun ke dalam buku besarnya masing-masing. Ketika transaksi periode berjalan telah dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian di-*posting* kepada buku besar.

4) Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet, sesuai dengan posisi debit atau kredit dalam saldo pada buku besar masing-masing.

Format Neraca Saldo yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NERACA SALDO PER TANGGAL

SKPD :

Halaman :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
		Debit	Kredit
1	2	3	4

5. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan, dan beban diakui pada saat terjadinya. Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*) dan prinsip penandingan (*matching principle*). Meskipun dalam akuntansi pemerintah prinsip penandingan ini tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di Neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat pada Laporan Operasional untuk periode berjalan.

Jenis jurnal penyesuaian, ada 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. beban pembayaran dimuka (*prepayment*), terdiri atas:

- 1). beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*). Beban yang dibayar dimuka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contoh: perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi.
- 2). pendapatan diterima dimuka atau pendapatan yang belum dihasilkan (*unearned revenue*). Uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan. Contoh: pendapatan pajak reklame, pendapatan sewa.

b. Akruwal, terdiri atas:

1). Akruwal pendapatan (*accrued revenues*).

Akruwal pendapatan pada dasarnya adalah piutang, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat. Contoh: piutang pajak.

2). Akruwal beban (*accrued expenses*).

Akruwal beban pada dasarnya adalah utang, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan uangnya atau belum dicatat. Contoh: bunga untuk utang, sewa, pajak, gaji atau honorarium.

6. Menyusun Neraca Saldo Disesuaikan

Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan di-*posting*, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) disusun berdasarkan akun buku besar. Tujuan dari Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) adalah membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Akun yang terdapat di Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) berisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan.

7. Menyusun Laporan Keuangan

a. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), membuat jurnal penutup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca Saldo setelah Penutupan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam "Laporan Realisasi Anggaran".

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun LRA menjadi 0 (nol). Berikut ini contoh jurnal penutup LRA

(a) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-LRA.

Pendapatan-LRA xxx	
Belanja	xxx
Surplus/Defisit-LRA	xxx

(b) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit-LRA pada akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit-LRA	xxx
Perubahan SAL	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini adalah format LRA SKPD:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1.	PENDAPATAN				
2.	Pendapatan Asli Daerah				
3.	Pendapatan pajak daerah				
4.	Pendapatan retribusi daerah				
5.	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah				
6.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
7.					
8.	JUMLAH PENDAPATAN				
9.					
10.	BELANJA				
11.	BELANJA OPERASI				
12.	Belanja pegawai				
13.	Belanja Barang				
14.	Jumlah Belanja Operasi				
15.					
16.	BELANJA MODAL				
17.	Belanja Tanah				
18.	Belanja Peralatan dan Mesin				
19.	Belanja Gedung dan Bangunan				
20.	Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi				
21.	Belanja Aset Tetap lainnya				
22.	Belanja Aset lainnya				
23.	Jumlah Belanja Operasi				
24.					
25.	JUMLAH BELANJA				
26.					
27.	Surplus / (Defisit)				

b. Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian disajikan dalam Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun LO menjadi 0 (nol).

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO	xxx
Surplus/Defisit...-LO	xxx
Beban	xxx

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No Urut	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah				
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
7					
8	BEBAN				
9	BEBAN OPERASI				
10	Beban Pegawai				
11	Beban Barang Jasa				
15	Beban bantuan sosial				
16	Beban Penyusutan				
17	Beban Lain-lain				
18	Jumlah Beban Operasi				
19					
20	JUMLAH BEBAN				
21					
22	SURPLUS/ DEFISIT - LO				

- c. Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo akhir. Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit...-LO	xxx
Ekuitas	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir, Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini merupakan contoh format Neraca SKPD pada Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Piutang Pajak		
7	Piutang Retribusi		
8	PenyisihanPiutang		
9	Belanja Dibayar Dimuka		
10	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
11	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi		
12	Piutang Lainnya		
13	Persediaan		
14	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13)		
15			
16	ASET TETAP		
17	Tanah		
18	Peralatan dan Mesin		
19	Gedung dan Bangunan		
20	Jalan, Jaringan dan Instalasi		
21	Aset Tetap lainnya		
22	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
23	Akumulasi Penyusutan		
24	Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23)		
25			
26	ASET LAINNYA		
27	Tagihan Penjualan Angsuran		
28	Tuntutan Ganti Rugi		
29	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
30	Aset Tak Berwujud		
31	Aset Lain-lain		
32	Jumlah Aset Lainnya (27 s/d 31)		
33			
34	JUMLAH ASET(14+24+32)		
35			
36	KEWAJIBAN		
37			
38	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
39	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
40	Utang Bunga		
41	Pendapatan Diterima Dimuka		
42	Utang Belanja		
43	Utang Jangka Pendek Lainnya		
44	JUMLAH KEWAJIBAN(39 s/d 43)		
45			
46	EKUITAS		
47			
48	EKUITAS		
51	JUMLAH EKUITAS		
52			
53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

d. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas.

Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas SKPD.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
6	LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR		

e. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal yang diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- 1). informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2). informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3). ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4). informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 5). informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 6). informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

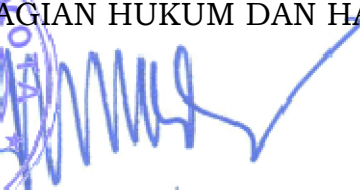
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan		
	1.1.	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2.	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3.	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1.	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2.	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
BAB III	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD		
	3.1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
		3.1.1.	Pendapatan-LRA
		3.1.2.	Belanja
		3.1.3.	Pembiayaan
	3.3.	Laporan Operasional	
		3.3.1.	Pendapatan-LO
		3.3.2.	Beban
		3.3.3.	Kegiatan Non Operasional
		3.3.4.	Pos Luar Biasa
	3.3.	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1.	Perubahan Ekuitas
	3.5.	Neraca	
		3.3.1.	Aset
		3.3.2.	Kewajiban
		3.3.3.	Ekuitas
BAB IV	Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Pemerintah Daerah		
BAB V	Penutup		

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 529 Tahun 2014

TANGGAL : 26 Mei 2014

SISTEM AKUNTANSI
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(SKPKD)

SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang pada SKPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang adalah Bidang Akuntansi, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mencatat transaksi atau kejadian piutang berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- b. melakukan *posting* jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dalam Buku Besar masing-masing rekening.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Piutang PPKD, sebagai berikut:

- a. hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Dokumen yang dipersamakan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak, Bukan Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bukan Hasil Pajak, Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Penyesuaian;
- c. Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum;
- d. Keputusan Walikota tentang Bagi Hasil Pajak, Bantuan Keuangan dan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- e. dokumen yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi.

Perlakuan akuntansi untuk transaksi piutang pada PPKD, adalah:

- a. Melakukan rekonsiliasi terhadap dokumen penetapan yang belum diterima pembayarannya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Bidang Akuntansi melakukan inventarisasi atas dokumen penetapan pendapatan yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen penetapan tersebut, Bidang Akuntansi mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah:

Piutang.....	xxx
Pendapatan-LO.....	xxx

Selain itu, Bidang Akuntansi juga melakukan jurnal penyesuaian pendapatan-LO atas penerimaan pendapatan yang bukan berasal dari Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKP/SKR Daerah) tahun berjalan (penerimaan pendapatan yang berasal dari penerbitan SKP/SKR Daerah tahun sebelumnya) untuk menghindari duplikasi pencatatan Pendapatan-LO.

Jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah:

Pendapatan-LO.....	xxx
Piutang	xxx

- b. Pengakuan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang yang jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya.

Setiap akhir periode akuntansi PPK-PPKD/Bidang Akuntansi berdasarkan bukti memorial melakukan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, yaitu piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Bagian Lancar Tagihan.....	xxx
Tagihan Pinjaman	xxx

- c. Menetapkan umur piutang sebagai dasar tingkat kolektabilitas piutang (*aging schedule*).

Berdasarkan buku piutang, Bidang Akuntansi membuat bukti memorial atas jumlah piutang yang tak tertagih. Berdasar bukti memorial tersebut, Bidang Akuntansi mencatat pengakuan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban Penyisihan Piutang	xxx	
Penyisihan Piutang		xxx

- d. Mencatat Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang.

Berdasarkan keputusan Walikota terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang, maka Bidang Akuntansi akan mencatat penghapusbukuan piutang dengan mengurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Piutang, sedangkan untuk penghapustagihan piutang Bidang Akuntansi tidak melakukan pencatatan dalam jurnal.

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya belum seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	xxx	
Beban Penyisihan Piutang.....	xxx	
Piutang.....		xxx

Untuk Piutang yang penyisihan piutangnya telah seluruhnya disisihkan.

Penyisihan Piutang.....	xxx	
Piutang.....		xxx

SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, royalti dan manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran guna memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

1. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi, antara lain:

a. Bidang Akuntansi

Dalam sistem akuntansi investasi, Fungsi Akuntansi dilaksanakan oleh bidang akuntansi yang memiliki tugas, sebagai berikut:

- 1) mencatat transaksi atau kejadian investasi berdasarkan bukti transaksi yang sah dalam Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal transaksi atau kejadian investasi dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
- 3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

- 1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan oleh bidang akuntansi PPKD;
- 2) menandatangani surat pernyataan tanggungjawab PPKD.

2. Dokumen sumber

- a. SP2D-LS;
- b. Nota Kredit;
- c. Surat Perjanjian Penjualan atau Pembelian Investasi.

3. Prosedur Akuntansi

a. Perolehan Investasi

- 1) Berdasarkan SP2D-LS atau tanpa SP2D (managemen kas), Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Investasi Jk Pendek.....	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan.....	xxx
Perubahan SAL	xxx

- 2) Berdasarkan SP2D-LS untuk penyertaan modal dalam Peraturan Daerah dieksekusi. Bidang akuntansi-PPKD, membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan-PMPD.....	xxx
Perubahan SAL	xxx

b. Pelepasan Investasi

- 1) Investasi Jangka Pendek

Berdasarkan nota kredit dari bank, Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Pendapatan bunga....LO.....	xxx
Investasi Jk Pendek.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
Penerimaan Pembiayaan.....	xxx

2) Investasi Jangka Panjang

Pelepasan investasi jangka panjang diatas nilai perolehan investasi jangka panjang.

Berdasarkan nota kredit dari Bank, Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....xxx
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO..... xxx
Utang Dalam Negeri Obligasi.....xxx

Perubahan SAL.....xxx
Penerimaan Pembiayaan.....xxx

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang.

Berdasarkan nota kredit dari bank, Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....xxx
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO..... xxx
Utang Dalam Negeri Obligasi.....xxx

Perubahan SAL.....xxx
Penerimaan Pembiayaan.....xxx

c. Hasil Investasi

1) Hasil investasi jangka pendek

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah..... xxx
Pendapatan bunga.....LO.....xxx

Perubahan SAL.....xxx
Pendapatan bunga.....LRA.....xxx

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 (tiga) metode:

a) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah..... xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda...LO.....xxx

Perubahan SAL.....xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRAxxx

b) Metode Ekuitas

Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah..... xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LO... xxx

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Bidang akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah..... xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....xxx

Perubahan SAL..... xxx
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda-LRA..... xxx

c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Bidang akuntansi-PPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah..... xxx
Pendapatan bunga dana bergulir LO.....xxx

Perubahan SAL.....xxx
Pendapatan Bunga dana bergulir-LRA.....xxx

Pemakaian metode ini maka pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang).

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada Pihak Ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan kepada entitas lainnya atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban, terdiri atas:

a. BUD

- 1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
- 2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Bidang Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

b. Bidang Akuntansi PPKD

- 1) mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti transaksi yang sah dalam Buku Jurnal Umum;
- 2) memposting jurnal transaksi atau kejadian investasi dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Sumber

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

- a. Surat Perjanjian Utang;
- b. Nota kredit;
- c. SP2D-LS.

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan

Sistem dan prosedur penambahan kewajiban (penerimaan pembiayaan) serta sistem dan prosedur akuntansi pengurangan kewajiban (pengeluaran pembiayaan).

a. Penambahan kewajiban

Berdasarkan nota kredit bank beserta surat perjanjian utang, bidang akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....xxx
Utang Jangka panjang..... xxx

Perubahan SAL..... xxx
Penerimaan Pembiayaan..... xxx

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Bagian Lancar Utang jk. Panjang.....xxx
Kas di Kas Daerah..... xxx

Pengeluaran Pembiayaan.....xxx
Perubahan SAL..... xxx

Berdasarkan SP2D-LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), Bidang Akuntansi-PPKD membukukan dalam buku jurnal.

Utang jk. Panjang.....xxx
Surplus penyelesaian utang.....LO xxx
Kas di Kas Daerah..... xxx

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan.....xxx
Perubahan SAL..... xxx

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan

Berdasarkan surat perjanjian hutang Bidang Akuntansi-PPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1(satu) tahun ke depan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Utang jangka panjang..... xxx
Bagian lancar Utang jk.Panjang..... xxx

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan yang dikelola PPKD adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Bidang Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Bidang Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, bidang akuntansi PPKD, memiliki tugas mencatat transaksi atau kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid dalam Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

b. Bendahara Penerimaan PPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan dalam buku penerimaan PPKD;
- 2) membuat SPJ Penerimaan.

c. PPKD Selaku BUD

- 1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lainnya;
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Bidang Akuntansi SKPD.

d. Pihak Ketiga lainnya

Selain pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada PPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau Pemerintah Daerah lain atau pihak lain pemberi hibah.

2. Dokumen yang Terkait

- a. DAU: Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- b. DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).

c. Dana Bagi Hasil:

- 1). Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan, yang diterbitkan tiap tahun;
- 2). Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas, Kehutanan dan Cukai), yang diterbitkan tiap tahun;
- 3). Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil, yang diterbitkan tiap tahun.

d. Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi, yang diterbitkan tiap tahun. (Khusus untuk Daerah Otonomi Khusus).

e. Dana Penyesuaian:

- 1). Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang diterbitkan tiap tahun;
- 2). Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3). Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun;
- 4). Peraturan Walikota tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk Kabupaten/Kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari Provinsi;
- 5). Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah, yang diterbitkan tiap tahun.

Dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain:

a. Dana Hibah:

- 1). Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya/pihak selain Pemerintah);
- 2). Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri);
- 3). Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan;

- 4). pencairan dana hibah dari Pemerintah, antara lain:
 - a) Surat Permintaan Penyaluran Hibah;
 - b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c) Rencana Penggunaan Hibah;
 - d) salinan DPA-SKPD;
 - e) salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran;
 - f) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan;
 - g) salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya;
 - h) Laporan Penggunaan Hibah;
 - i) Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
- 5). Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.

- b. Dana Darurat : Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat.

Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen yang terkait dengan Transfer dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Dana Bagi Hasil Provinsi : Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- b. Nota kredit dari Bank Kas Daerah.

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD, adalah sebagai berikut:

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (Pendapatan-LRA).

Saat surat penetapan atau dokumen peraturan perundang-undangan atau dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LO.

Pihak Ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung kepada Kas Daerah, Setelah

diterima maka Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada bidang akuntansi PPKD untuk pengakuan Pendapatan-LO dan pengakuan Pendapatan-LRA.

Pengakuan pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas Daerah, Bidang Akuntansi PPKD menjurnal:

Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Transfer -LO/ Lain Pendapatan yg Sah-LO.....		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Transfer-LRA/Lain Pendapatan yg Sah-LRA.....		xxx

b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, di mana Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

1) Bidang akuntansi PPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Bidang Akuntansi PPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.

Piutang	xxx	
Pendapatan -LO		xxx

Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya pada tahun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:

Pendapatan-LO.....	xxx	
Piutang.....		xxx



SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Akuntansi Beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (termasuk Transfer Bantuan Keuangan), dan Beban Luar Biasa.

Akuntansi Belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tak Terduga.

Akuntansi Transfer pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Transfer. Pembahasan akuntansi beban dan belanja PPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

a. Bidang Akuntansi PPKD

Bidang Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.

b. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

c. BUD/Kuasa BUD

BUD atau Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya, meliputi:

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD;
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang terkait

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja dan Transfer pada PPKD, antara lain:

- a. Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang;
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan;
- d. Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- e. Peraturan Walikota tentang Alokasi Bantuan Keuangan;

- f. Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Kelurahan;
- h. Surat Tagihan dari Pihak Ketiga;
- i. SP2D;
- j. Dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan prosedur akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada PPKD, adalah :

- a. Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan Belanja dibagi sebagai berikut:
 - 1) Melalui Bendahara Pengeluaran
 Beban dicatat ketika Bendahara Pengeluaran membuat pertanggungjawaban (SPJ) dan belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh bidang perbendaharaan. Sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang nilainya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2) Melalui Kas daerah (LS)
 Beban dan belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

Pencatatan Selama Tahun Berjalan

Selama tahun berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran
 Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban Hibah/Bansos xxx Kas di Bendahara Pengeluaran..... xxx

Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja Hibah/Bansos..... xxx Perubahan SAL..... xxx

2) Pengeluaran melalui Kas Daerah (LS)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Beban..... xxx Kas di Kas Daerah xxx

Sedangkan Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja..... xxx Perubahan SAL..... xxx
--

b. Pada saat Penyusunan Laporan Keuangan

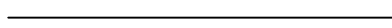
Pada saat penyusunan Laporan Keuangan terdapat kondisi pengakuan Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban xxx Utang Beban..... xxx

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuain atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Utang Beban xxx Beban xxx
--



SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Akuntansi pembiayaan adalah langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti pembentukan/pencairan dana cadangan, pemberian/pengembalian pinjaman, dan penerimaan/pembayaran utang.

1. Pihak yang terkait

a. BUD

Menyerahkan salinan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) kepada Bidang Akuntansi PPKD.

b. Bidang Akuntansi PPKD

- 1). menerima salinan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dari BUD;
- 2). mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan;
- 3). mengidentifikasi pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan.

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dengan kegiatan pembiayaan ini, diantaranya:

- a. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH);
- b. SP2D-LS;
- c. Nota Kredit;
- d. Dokumen lain yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

1) Penerimaan pembiayaan

- a) bidang Akuntansi PPKD menerima salinan Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pembiayaan pada PPKD (akuntansi penerimaan/pengeluaran kas);
- b) dari Laporan Posisi Kas Harian ini, bidang akuntansi PPKD harus mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, dan penerimaan piutang Daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) bidang akuntansi PPKD menerima salinan Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pembiayaan pada PPKD;
- b) dari laporan Posisi Kas Harian ini, Bidang akuntansi PPKD harus mengidentifikasi pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, atau untuk pemberian pinjaman Daerah.

Jurnal untuk mencatat penerimaan pembiayaan:

1) Pencairan Dana Cadangan

Kas di Kas Daerah	xxx
Dana Cadangan	xxx

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan-Dana Cadangan.....	xxx

2) Penerimaan Utang jangka Panjang

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang jangka Panjang	xxx

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman kepada PD	xxx

3) Penerimaan Utang Daerah

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang Dalam Negeri	xxx

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan-Utang Dalam Negeri	xxx

4) Penerimaan Dana Bergulir

Kas di Kas Daerah	xxx
Investasi Non Permanen	xxx

Perubahan SAL	xxx
Penerimaan Pembiayaan-Investasi Non Permanen ...	xxx

Jurnal untuk mencatat pengeluaran pembiayaan:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Dana Cadangan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Cadangan	xxx
Perubahan SAL	xxx

2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx
Perubahan SAL	xxx

3) Pembayaran Pokok Utang

Utang Dalam Negeri	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan-Pembayaran Pokok Utang	xxx
Perubahan SAL	xxx

4) Pembentukan Dana Bergulir

Investasi Non Permanen	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	xxx
Perubahan SAL	xxx

SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.

Beberapa koreksi yang terjadi pada PPKD, adalah sebagai berikut:

1. Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- a. Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Contoh: Pemerintah Daerah menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx
Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- b. Penerimaan Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- c. Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.
Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Contoh : Pemerintah Daerah menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada Pemerintah, akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang Pemerintah Pusat.....	xxx

- d. Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh : Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada Pemerintah yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang Pemerintah Pusat.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

2. Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah	xxx
Utang.....	xxx

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA	xxx

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemerintah Daerah kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

SiLPA/SiKPA	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. Pada tahap berikutnya, laporan keuangan tersebut disampaikan kepada entitas pelaporan dalam rangka penggabungan menjadi laporan keuangan konsolidasian.

SKPKD adalah sebuah entitas akuntansi dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPKD. Bidang Akuntansi pada SKPKD mencatat transaksi pada level Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan dari DPA-SKPKD. Selain itu SKPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BUD melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran transaksi yang terjadi pada SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja;
2. transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level Pemerintah Daerah seperti pendapatan dana perimbangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Termasuk transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka panjang.

Kegiatan akuntansi pada SKPKD, meliputi:

1. pencatatan atas pendapatan (LRA dan LO);
2. belanja;
3. beban;
4. pembiayaan;
5. aset (investasi);
6. kewajiban;
7. konsolidator; dan
8. transaksi selain kas.

Siklus Akuntansi SKPKD

Kegiatan akuntansi pada SKPKD dimulai dengan mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan dalam jurnal, *posting* dalam buku besar, menyusun neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan.

1. Analisis Transaksi

Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Tujuan dari analisis transaksi adalah untuk mengidentifikasikan jenis akun yang terkait dan untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam memahami ayat jurnal, baik yang sederhana maupun yang rumit.

Urutan peristiwa didalam proses pencatatan dimulai dengan transaksi. Bukti transaksi adalah berupa dokumen sumber, misalnya SP2D, Nota Kredit, dan lain-lain. Bukti ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun tertentu. Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga dilakukan identifikasi dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan dalam Jurnal.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Transaksi keuangan dicatat oleh Bidang Akuntansi-SKPKD sesuai dengan dokumen transaksinya dalam buku jurnal. Dalam melakukan pencatatan transaksi dalam jurnal digunakan metode *double-entry* di mana setiap transaksi akan dicatat pada sisi debit dan sisi kredit.

Dalam penulisan jurnal, terdapat beberapa aturan, yaitu:

- a. jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya kejadian atau transaksi keuangan;
- b. akun yang berada pada sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada pada sisi kredit;
- c. akun yang berada pada sisi kredit dicatat menjorok ke kanan;
- d. pencatatan dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau transaksi keuangan.

Format buku jurnal yang digunakan, adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BUKU JURNAL

SKPKD :

Halaman :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6

Ada 2 (dua) basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian, akan terdapat 2 (dua) jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

Pertama, adalah jurnal yang akan mencatat transaksi secara akrual khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LO. Jurnal LO digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LO, dan beban. Jurnal LO dan Neraca ini akan menghasilkan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

Kedua, adalah jurnal yang akan mencatat transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran (LRA) dan terdapat aliran kas masuk (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) dan aliran kas keluar (belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan). Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LRA.

Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas Pendapatan-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal LRA ini nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Jurnal LRA ini digunakan untuk menjurnal realisasi anggaran selama periode berjalan.

5. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan, dan beban diakui pada saat terjadinya. Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition principle*) dan prinsip penandingan (*matching principle*). Meskipun dalam Akuntansi Pemerintah prinsip penandingan ini tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di Neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat pada Laporan Operasional untuk periode berjalan.

Jenis jurnal penyesuaian, ada 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Pembayaran dimuka (*prepayment*), terdiri atas :
 - 1). beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*). Beban yang dibayar dimuka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi;
 - 2). pendapatan diterima dimuka atau pendapatan yang belum dihasilkan (*unearned revenue*). Uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatannya dihasilkan.
- b. Jurnal Penyesuaian Akruwal, terdiri atas:
 - 1). Akruwal pendapatan (*accrued revenues*). Akruwal pendapatan pada dasarnya adalah piutang, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat;
 - 2). Akruwal beban (*accrued expenses*). Akruwal beban pada dasarnya adalah utang, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan uangnya atau belum dicatat.

6. Menyusun Neraca Saldo Disesuaikan

Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) disusun berdasarkan akun buku besar. Tujuan dari Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) adalah membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit pada buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Akun yang terdapat pada Neraca Saldo Setelah Penyesuaian (*Adjusted Trial Balance*) berisikan seluruh data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan.

7. Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPKD dihasilkan melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Bidang Akuntansi-SKPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 7 (tujuh) Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 7 (tujuh) Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun cara pembuatan Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPKD sebagai entitas akuntansi, sebagai berikut:

- 1). Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA

Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Bidang Akuntansi-SKPKD mengidentifikasi akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Bidang Akuntansi-SKPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun LRA menjadi 0 (nol). Jurnal penutup tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut :

- a). Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus/defisit-LRA.

Pendapatan-LRA	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Surplus/Defisit-LRA	xxx

- b). Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit-LRA pada akun Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi.

Surplus/Defisit- LRA	xxx
Perubahan SAL	xxx

Kemudian setelah membuat jurnal penutup, Bidang Akuntansi-SKPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA. Berikut ini adalah format LRA-SKPKD selaku entitas Akuntansi:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Angg. 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan daerah				
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
5	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah				
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
7					
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
10	Dana bagi hasil pajak				
11	Dana bagi hasil sumber daya alam				
12	Dana alokasi umum				
13	Dana alokasi khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15					
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
17	Dana Otonomi Khusus				
18	Dana penyesuaian				
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya				
20					
21	TRANSFER PEM. PROVINSI				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
24	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi				
25	Jumlah Pendapatan Transfer				
26					
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah				
29	Pendapatan Lainnya				
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
31	JUMLAH PENDAPATAN				
32					
33	BELANJA				
34	BELANJA OPERASI				
35	Belanja bunga				
36	Belanja subsidi				
37	Belanja hibah				
38	Belanja bantuan sosial				
39	Jumlah Belanja Operasi				
40					
41	BELANJA TAK TERDUGA				
42	Belanja Tak Terduga				
43	Jumlah Belanja Tak Terduga				
44	JUMLAH BELANJA				

No Urut	Uraian	Angg. 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
45	TRANSFER				
46	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
47	Transfer Bagi Hasil Pajak				
48	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
49	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
50					
51	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
52	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
53	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
54	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
55	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan				
56	Jumlah Transfer				
57	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER				
58					
59	SURPLUS/DEFISIT				
60					
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
63	Penggunaan SiLPA				
64	Pencairan Dana Cadangan				
65	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
66	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
67	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				
68	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank				
69	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank				
70	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi				
71	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya				
72	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
73	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
74	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
75	Penerimaan Kembali Piutang				
76	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir				
77	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
78					
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
80	Pembentukan dana cadangan				
81	Penyertaan modal (investasi) Penerimaan Daerah				
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat				
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya				
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank				

No Urut	Uraian	Angg. 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank				
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi				
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya				
88	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
90	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
91	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
92	JUMLAH PEMBIAYAAN				
93					
94	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN) (SiLPA)				

2). Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Bidang Akuntansi-SKPKD mengidentifikasi akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Bidang Akuntansi-SKPKD membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun LO menjadi 0 (nol). Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO	xxx
Surplus/Defisit...-LO	xxx
Beban	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Bidang Akuntansi SKPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO. Berikut ini adalah format Laporan Operasional SKPKD selaku entitas akuntansi:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan daerah				
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
5	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah				
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
7					
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana bagi hasil pajak				
11	Dana bagi hasil sumber daya alam				
12	Dana alokasi umum				
13	Dana alokasi khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15					
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
17	Dana Otonomi Khusus				
18	Dana penyesuaian				
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya				
20					
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
24	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi				
25	Jumlah Pendapatan Transfer				
26					
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah				
29	Pendapatan Lainnya				
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
31	JUMLAH PENDAPATAN				
32					
33	BEBAN				
34	BEBAN OPERASI				
36	Beban subsidi				
37	Beban hibah				
38	Beban bantuan sosial				
	Beban Lain-lain				
39	Jumlah Beban Operasi				
40					
41	BEBAN TRANSFER				
42	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
43	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak				
44	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				

No Urut	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan	(%)
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
46	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
47	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
48	Jumlah Beban Transfer				
49	Jumlah Transfer				
50	JUMLAH BEBAN				
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
53					
54	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
55	SURPLUS NON OPERASIONAL				
56	Surplus Penjualan Aset Non lancar				
57	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
58	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
59	Jumlah Surplus Non Operasional				
60					
61	DEFISIT NON OPERASIONAL				
62	Defisit Penjualan Aset Non lancar				
63	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
64	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
65	Jumlah Defisit Non Operasional				
66	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
67					
68	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
69					
70	POS LUAR BIASA				
71	PENDAPATAN LUAR BIASA				
72	Pendapatan Luar Biasa				
73	Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
74					
75	BEBAN LUAR BIASA				
76	Beban Luar Biasa				
77	Jumlah Beban Luar Biasa				
78	POS LUAR BIASA				
79					
80	SURPLUS/DEFISIT-LO				

3). Menyusun Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Bidang Akuntansi-SKPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Bidang Akuntansi-SKPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit...-LO kepada akun Ekuitas.

Berikut contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit...-LO	xxx
Ekuitas	xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Bidang Akuntansi-SKPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh format Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PPKD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20x1	20x0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		
11	Belanja Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)		
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Non Permanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang		
25	Investasi dalam Surat Utang Negara		
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
27	Investasi Non Permanen Lainnya		
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)		
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
31	Investasi Permanen Lainnya		
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)		
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)		
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah		
37	Peralatan dan Mesin		

No.	Uraian	20x1	20x0
38	Gedung dan Bangunan		
39	Jalan, Jaringan dan Instalasi		
40	Aset Tetap lainnya		
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
42	Akumulasi Penyusutan		
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)		
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan		
47	Jumlah Dana Cadangan (46)		
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran		
51	Tuntutan Ganti Rugi		
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
53	Aset Tak Berwujud		
54	Aset Lain-lain		
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)		
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)		
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
63	Utang Bunga		
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
65	Pendapatan Diterima Dimuka		
66	Utang Belanja		
67	Utang Jangka Pendek Lainnya		
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)		
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan		
72	Utang dalam Negeri-Obligasi		
73	Premium (Diskonto) Obligasi		
74	Utang Jangka Panjang Lainnya		
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)		
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)		
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS		
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)		

4). Menyusun Laporan Perubahan SAL

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Bidang Akuntansi-SKPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Subtotal (1 + 2)		
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Subtotal (3 + 4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		

5). Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas.

Selanjutnya, Bidang Akuntansi-SKPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas tingkat Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
6	LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR		

6). Membuat Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal

yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Metode Langsung)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yg Sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
9	Penerimaan DAU		
10	Penerimaan DAK		
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		
15	Penerimaan Hibah		
16	Penerimaan Dana Darurat		
17	Penerimaan Lainnya		
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)		
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai		
22	Pembayaran Barang		
23	Pembayaran Bunga		
24	Pembayaran Subsidi		
25	Pembayaran Hibah		
26	Pembayaran Bantuan Sosial		
27	Pembayaran Tak Terduga		
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)		
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)		
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan		
37	Penjualan atas Tanah		
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
42	Penjualan Aset Lainnya		
43	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
44	Penerimaan Penjualan investasi Non Permanen		
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)		

No	Uraian	20X1	20X0
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan		
48	Perolehan Tanah		
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
53	Perolehan Aset Lainnya		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)		
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)		
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perus. Daerah		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)		
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
72	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
73	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
74	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
75	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Obligasi		
76	Pembayaran Pokok Dalam Negeri - Lainnya		
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
79	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)		
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)		
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)		
86	Arus Keluar Kas		
87	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)		
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84-87)		
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)		

No	Uraian	20X1	20X0
91	Saldo Awal Kas BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		
92	Saldo Akhir Kas BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)		
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
94	Saldo Akhir Kas (92+93)		

7). Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a). informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b). informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro;
- c). ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d). informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya;
- e). rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f). informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g). informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD selaku entitas akuntansi:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- BAB I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2. Kebijakan keuangan
 - 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan akuntansi
- 4.1. Entitas pelaporan
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
 - 4.5. Kebijakan akuntansi tertentu
- BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.2. Laporan Perubahan SAL
 - 5.2.1. Perubahan SAL
 - 5.3. Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan-LO
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.2. Kegiatan Non Operasional
 - 5.3.4. Pos Luar Biasa
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1. Perubahan Ekuitas
 - 5.5. Neraca
 - 5.5.1. Aset
 - 5.5.2. Kewajiban
 - 5.5.3. Ekuitas
 - 5.6. Laporan Arus Kas
 - 5.6.1. Arus Kas dari Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari AKTivitas Transitoris
- BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non-keuangan
- BAB VII Penutup
-

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemerintah Daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

1. Terdapat 7 (tujuh) laporan keuangan yang dibuat selaku entitas pelaporan, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Akuntansi-SKPKD; dan
- b. PPKD.

3. Langkah Teknis

a. Menyiapkan kertas kerja konsolidasi

Bidang Akuntansi-SKPKD menyiapkan kertas kerja (*worksheet*) dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan seluruh entitas akuntansi. Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyiapkan kolom neraca saldo Pemerintah Daerah dalam kertas kerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.

Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo SKPKD (entitas akuntansi) yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo dalam kertas kerja konsolidasi, Bidang Akuntansi-SKPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK-PPKD dan RK-SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD serta Jurnal Eliminasi, Bidang Akuntansi SKPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, bidang akuntansi PPKD mencatat “RK-PPKD” pada debit dan “RK-SKPD” kredit dengan jurnal:

RK-PPKD	xxx
RK-SKPD	xxx

Penggunaan format disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada format kertas kerja, adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Neraca Saldo SKPD A		Neraca Saldo SKPD B		Neraca Saldo SKPD dst		Neraca Saldo PPKD		Jurnal Eliminasi		Neraca Saldo Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

b. Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

- 1). Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Bidang Akuntansi-SKPKD mengidentifikasi akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian disajikan dalam “*Laporan Realisasi Anggaran*”.

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “*Laporan Realisasi Anggaran*” dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “*SiLPA tahun berjalan*”. Nilai ini ditempatkan dibawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, bidang akuntansi-SKPKD juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun LRA menjadi 0 (nol).

Berikut contoh jurnal penutup LRA.

Pendapatan-LRA	xxx
Penerimaan Pembiayaan -LRA	xxx
Perubahan SAL	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan -LRA	xxx

Setelah membuat jurnal penutupan, bidang Akuntansi-SKPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 & 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
	Pendapatan Retribusi Daerah				
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
5	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah				
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
7					
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana bagi hasil pajak				
11	Dana bagi hasil sumber daya alam				
12	Dana alokasi umum				
13	Dana alokasi khusus				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
15					
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
17	Dana Otonomi Khusus				
18	Dana penyesuaian				
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya				
20					
21	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
24	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi				
25	Jumlah Pendapatan Transfer				
26					
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
28	Pendapatan Hibah				
29	Pendapatan Dana Darurat				
30	Pendapatan Lainnya				
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
32	JUMLAH PENDAPATAN				
33					
34	BELANJA				
35	BELANJA OPERASI				
36	Belanja Pegawai				
37	Belanja Barang				
38	Belanja bunga				
39	Belanja subsidi				
40	Belanja hibah				
41	Belanja bantuan sosial				
42	Jumlah Belanja Operasi				
43					
44	BELANJA MODAL				
45	Belanja Tanah				
46	Belanja Peralatan dan Mesin				
47	Belanja Gedung dan Bangunan				
48	Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi				
49	Belanja Aset Tetap Lainnya				
50	Belanja Aset Lainnya				
51	Jumlah Belanja Modal				
52					
53	BELANJA TAK TERDUGA				
54	Belanja Tak Terduga				
55	Jumlah Belanja Tak Terduga				
56	JUMLAH BELANJA				
57					
58	TRANSFER				
59	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
60	Transfer Bagi Hasil Pajak				
61	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
62	Jumlah Transfer Bagi Hasil				

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	Ke Desa				
63					
64	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
65	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
66	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
67	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa				
68	Jumlah Transfer				
69	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER				
70					
71	SURPLUS/DEFISIT				
72					
73	PEMBIAYAAN				
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SiLPA				
76	Pencairan dana cadangan				
77	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan dana cadangan				
91	Penyertaan modal (investasi) Penerimaan Daerah				
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga				

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
	Keuangan Bank				
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
99	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
100	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
101	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
102	PEMBIAYAAN NETO				
103					
104	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN) (SiLPA)				

- 2). Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Bidang Akuntansi SKPKD mengidentifikasi akun yang termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, bidang akuntansi juga membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun LO menjadi 0 (nol).

Berikut ini contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO	xxx
Surplus/Defisit...-LO	xxx
Beban	xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, bidang Akuntansi - SKPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Operasional.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No Urut	Uraian	20X1	20X0	Kenaika/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana bagi hasil pajak				
12	Dana bagi hasil sumber daya alam				
13	Dana alokasi umum				
14	Dana alokasi khusus				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana penyesuaian				
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya				
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi				
26	Jumlah Pendapatan Transfer				
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Lainnya				
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
32	JUMLAH PENDAPATAN				

No Urut	Uraian	20X1	20X0	Kenaika/ Penurunan	(%)
33					
34	BEBAN				
35	BEBAN OPERASI				
36	Beban Pegawai				
37	Beban Barang Jasa				
38	Beban bunga				
39	Beban subsidi				
40	Beban hibah				
41	Beban bantuan sosial				
42	Beban Penyusutan				
43	Beban Lain-lain				
44	Jumlah Beban Operasi				
45					
46	BEBAN TRANSFER				
47	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
48	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak				
49	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
50	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya				
51	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
52	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
53	Jumlah Beban Transfer				
54	Jumlah Transfer				
55	JUMLAH BEBAN TRANSFER				
56					
57	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
58					
59	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
60	SURPLUS NON OPERASIONAL				
61	Surplus Penjualan Aset Non lancar				
62	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
63	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
64	Jumlah Surplus Non Operasional				
65					
66	DEFISIT NON OPERASIONAL				
67	Defisit Penjualan Aset Non lancar				
68	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
69	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
70	Jumlah Defisit Non Operasional				
71	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
72					

No Urut	Uraian	20X1	20X0	Kenaika/ Penurunan	(%)
73	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
74					
75	POS LUAR BIASA				
76	PENDAPATAN LUAR BIASA				
77	Pendapatan Luar Biasa				
78	Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
79					
80	BEBAN LUAR BIASA				
81	Beban Luar Biasa				
82	Jumlah Beban Luar Biasa				
83	POS LUAR BIASA				
84					
85	SURPLUS/DEFISIT-LO				

3). Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Bidang Akuntansi SKPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, bidang akuntansi SKPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO kepada akun Ekuitas.

Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit-LO	xxx
Ekuitas	xxx

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Bidang Akuntansi-SKPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini merupakan contoh format Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		

No	Uraian	20X1	20X0
10	Penyisihan Piutang		
11	Belanja Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)		
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Non Permanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang		
25	Investasi dalam Surat Utang Negara		
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
27	Investasi Non Permanen Lainnya		
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)		
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
31	Investasi Permanen Lainnya		
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)		
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)		
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah		
37	Peralatan dan Mesin		
38	Gedung dan Bangunan		
39	Jalan, Jaringan dan Instalasi		
40	Aset Tetap lainnya		
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
42	Akumulasi Penyusutan		
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)		
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan		
47	Jumlah Dana Cadangan (46)		
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran		
51	Tuntutan Ganti Rugi		
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
53	Aset Tak Berwujud		
54	Aset Lain-lain		
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)		
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)		
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
63	Utang Bunga		

No	Uraian	20X1	20X0
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
65	Pendapatan Diterima Dimuka		
66	Utang Belanja		
67	Utang Jangka Pendek Lainnya		
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)		
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
72	Utang dalam Negeri – Obligasi		
73	Premium (Diskonto) Obligasi		
74	Utang Jangka Panjang Lainnya		
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)		
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)		
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS		
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)		

4) Menyusun Laporan Perubahan SAL

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat sebelumnya, Bidang Akuntansi-SKPKD dapat menyusun Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Subtotal (1 + 2)		
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Subtotal (3 + 4)		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		

5). Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Bidang Akuntansi-SKPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan

Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas tingkat Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL		
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
6	LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR		

6). Membuat Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Metode Langsung)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		

No	Uraian	20X1	20X0
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
9	Penerimaan DAU		
10	Penerimaan DAK		
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		
15	Penerimaan Hibah		
16	Penerimaan Dana Darurat		
17	Penerimaan Lainnya		
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)		
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai		
22	Pembayaran Barang		
23	Pembayaran Bunga		
24	Pembayaran Subsidi		
25	Pembayaran Hibah		
26	Pembayaran Bantuan Sosial		
27	Pembayaran Tak Terduga		
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)		
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)		
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan		
37	Penjualan atas Tanah		
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
41	Penjualan Aset Tetap Lainnya		
42	Penjualan Aset Lainnya		
43	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
44	Penerimaan Penjualan investasi Non Permanen		
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 43)		
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan		
48	Perolehan Tanah		
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
53	Perolehan Aset Lainnya		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)		
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56)		
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
61	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
62	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
63	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
64	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		

No	Uraian	20X1	20X0
65	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)		
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
72	Pembayaran Pokok Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
73	Pembayaran Pokok Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
74	Pembayaran Pokok Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
75	Pembayaran Pokok Dalam Negeri-Obligasi		
76	Pembayaran Pokok Dalam Negeri-Lainnya		
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		
79	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)		
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80)		
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)		
86	Arus Keluar Kas		
87	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)		
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84-87)		
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)		
91	Saldo Awal Kas BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		
92	Saldo Akhir Kas BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)		
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
94	Saldo Akhir Kas (92+93)		

7). Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a). informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

- b). informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
- c). Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d). informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e). rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f). informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g). informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I	Pendahuluan	
	1.1.	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2.	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3.	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1.	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2.	Kebijakan keuangan
	2.3.	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
	3.1.	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2.	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1.	Entitas pelaporan
	4.2.	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

	4.3.	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	
	4.4.	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	
	4.5.	Kebijakan akuntansi tertentu	
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan		
	5.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
		5.1.1.	Pendapatan-LRA
		5.1.2.	Belanja
		5.1.3.	Pembiayaan
	5.2.	Laporan Perubahan SAL	
		5.2.1.	Perubahan SAL
	5.3.	Laporan Operasional	
		5.3.1.	Pendapatan-LO
		5.3.2.	Beban
		5.3.2.	Kegiatan Non Operasional
		5.3.4.	Pos Luar Biasa
	5.4.	Laporan Perubahan Ekuitas	
		5.4.1.	Perubahan Ekuitas
	5.5.	Neraca	
		5.5.1.	Aset
		5.5.2.	Kewajiban
		5.5.3.	Ekuitas
	5.6.	Laporan Arus Kas	
		5.6.1.	Arus Kas dari Operasi
		5.6.2.	Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
		5.6.3.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
		5.6.4.	Arus Kas dari AKTivitas Transitoris
BAB VI	Penjelasan atas informasi non-keuangan		
BAB VII	Penutup		

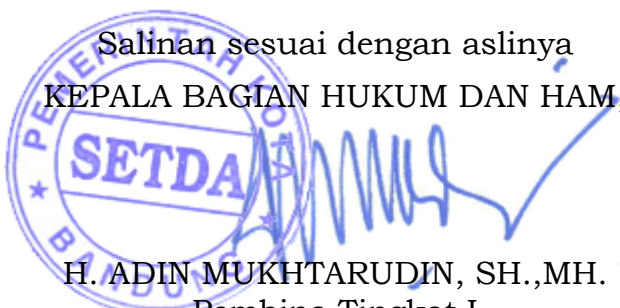
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19610625 198603 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 529 Tahun 2014

TANGGAL : 26 Mei 2014

BAGAN AKUN STANDAR

BAGAN AKUN STANDAR
AKUN ASET

Kodifikasi					URAIAN
1	0	0	00	00	ASET
1	1	0	00	00	ASET LANCAR
1	1	1	00	00	Kas
1	1	1	01	00	Kas di Kas Daerah
1	1	1	01	01	Kas Umum Daerah Kota Bandung
1	1	1	02	00	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	1	03	00	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank
1	1	1	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai
1	1	1	04	00	Kas di BLUD
1	1	1	04	01	Kas di BLUD - RSUD
1	1	1	04	01	Kas di BLUD - RSKIA
1	1	1	04	01	Kas di BLUD - RSKGM
1	1	1	05	00	Kas Lainnya
1	1	1	05	01	Kas Lainnya
1	1	1	06	00	Setara Kas
1	1	1	06	01	Setara Kas
1	1	1	06	02	Dst.....
1	1	2	00	00	Investasi Jangka Pendek
1	1	2	01	00	Investasi dalam Saham
1	1	2	01	01	Investasi dalam Saham
1	1	2	01	02	Dst.....
1	1	2	02	00	Investasi dalam Deposito
1	1	2	02	01	Deposito Jangka Pendek
1	1	2	03	00	Investasi dalam SUN
1	1	2	03	01	Investasi dalama SUN
1	1	2	04	00	Investasi dalam SBI
1	1	2	04	01	Investasi dalam SBI
1	1	2	05	00	Investasi dalam SPN

Kodifikasi					URAIAN
1	1	2	05	01	Investasi dalam SPN
1	1	2	06	00	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	06	01	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	2	07	00	Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	2	07	01	Investasi Jangka Pendek Lainnya
1	1	3	00	00	Piutang Pendapatan
1	1	3	01	00	Piutang Pajak Daerah
1	1	3	01	01	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	02	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	03	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	3	01	04	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	3	01	05	Piutang Pajak Rokok
1	1	3	01	06	Piutang Pajak Hotel
1	1	3	01	07	Piutang Pajak Restoran
1	1	3	01	08	Piutang Pajak Hiburan
1	1	3	01	09	Piutang Pajak Reklame
1	1	3	01	10	Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	3	01	11	Piutang Pajak Parkir
1	1	3	01	12	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	3	01	13	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	3	01	14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	3	01	15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
1	1	3	01	16	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	1	3	02	00	Piutang Retribusi
1	1	3	02	01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	3	02	02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	3	02	03	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
1	1	3	02	04	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	3	02	05	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	3	02	06	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	3	02	07	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	3	02	08	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	3	02	09	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	3	02	10	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	3	02	11	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Kodifikasi					URAIAN
1	1	3	02	12	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	3	02	13	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	3	02	14	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	3	02	15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	3	02	16	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
1	1	3	02	17	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	3	02	18	Piutang Retribusi Terminal
1	1	3	02	19	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	3	02	20	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1	1	3	02	21	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
	1	3	02	22	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1	1	3	02	23	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
1	1	3	02	24	Piutang Retribusi Penyebrangan Air
1	1	3	02	25	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	3	02	26	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	3	02	27	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	3	02	28	Piutang Retribusi Izin Gangguan
1	1	3	02	29	Piutang Retribusi Izin Trayek
1	1	3	02	30	Piutang Retribusi Izin Perikanan
1	1	3	02	31	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	3	02	32	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	3	03	00	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	3	03	01	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1	1	3	03	02	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1	1	3	03	03	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
1	1	3	03	04	Dst.....
1	1	3	04	00	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	3	04	01	Piutang Jasa Giro
1	1	3	04	02	Piutang Bunga deposito
1	1	3	04	03	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	3	04	04	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
1	1	3	04	05	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	3	04	06	Piutang Denda Pajak
1	1	3	04	07	Piutang Denda Retribusi
1	1	3	04	08	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan

Kodifikasi					URAIAN
1	1	3	04	09	Piutang dari Pengembalian
1	1	3	04	10	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
1	1	3	04	11	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1	1	3	04	12	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1	1	3	04	13	Piutang Zakat *
1	1	3	04	14	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1	1	3	04	15	Piutang BLUD
1	1	3	04	16	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1	1	3	04	17	Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir
1	1	3	04	18	Dst.....
1	1	3	05	00	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	3	05	01	Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	3	05	02	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1	1	3	05	03	Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)
1	1	3	05	04	Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)
1	1	3	05	05	Dst.....
1	1	3	06	00	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1	1	3	06	01	Piutang Dana Otonomi Khusus
1	1	3	06	02	Piutang Dana Penyesuaian
1	1	3	06	03	Piutang Dana Darurat
1	1	3	06	04	Dst.....
1	1	3	07	00	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	3	07	01	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak
1	1	3	07	02	Piutang Transfer Bagi hasil Lainnya
1	1	3	07	03	Dst.....
1	1	3	08	00	Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	3	08	01	Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	3	08	02	Dst.....
1	1	4	00	00	Piutang Lainnya
1	1	4	01	00	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	4	01	01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	4	01	02	Dst.....
1	1	4	02	00	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	4	02	01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Perusahaan Negara
1	1	4	02	02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Kodifikasi					URAIAN
1	1	4	02	03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
1	1	4	02	04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	4	02	05	Dst.....
1	1	4	03	00	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	4	03	01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1	1	4	03	02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	4	04	00	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
1	1	4	04	01	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
1	1	4	04	02	Dst.....
1	1	4	05	00	Uang Muka
1	1	4	05	01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	4	05	02	Dst.....
1	1	5	00	00	Penyisihan Piutang
1	1	5	01	00	Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	5	01	01	Penyisihan Piutang Pajak
1	1	5	01	02	Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	5	01	03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	5	01	04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	5	01	05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	5	01	06	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
1	1	5	01	07	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah
1	1	5	01	08	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
1	1	5	01	09	Penyisihan Piutang Hibah
1	1	5	01	10	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	5	01	11	Dst.....
1	1	5	02	00	Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	5	02	01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	5	02	02	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	1	5	02	03	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	5	02	04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
1	1	5	02	05	Penyisihan Uang Muka
1	1	5	02	06	Dst.....
1	1	6	00	00	Beban Dibayar Dimuka

Kodifikasi					URAIAN
1	1	6	01	00	Beban Pegawai Dibayar Dimuka
1	1	6	01	01	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
1	1	6	01	02	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibayar Dimuka
1	1	6	01	03	Dst.....
1	1	6	02	00	Beban Barang Dibayar Dimuka
1	1	6	02	01	Beban Barang Dibayar Dimuka
1	1	6	02	02	Dst.....
1	1	6	03	00	Beban Jasa Dibayar Dimuka
1	1	6	03	01	Beban Jasa Dibayar Dimuka
1	1	6	03	02	Dst.....
1	1	6	04	00	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1	1	6	04	01	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
1	1	6	04	02	Dst.....
1	1	6	05	00	Beban Lainnya
1	1	6	05	01	Beban Lainnya
1	1	6	05	02	Dst.....
1	1	7	00	00	Persediaan
1	1	7	01	00	Persediaan Bahan Pakai Habis
1	1	7	01	01	Persediaan Alat Tulis Kantor
1	1	7	01	02	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	7	01	03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1	1	7	01	04	Persediaan Perangkat, materai dan benda pos lainnya
1	1	7	01	05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1	1	7	01	06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1	1	7	01	07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran
1	1	7	01	08	Persediaan Isi tabung gas
1	1	7	01	09	Dst.....
1	1	7	02	00	Persediaan Bahan/Material
1	1	7	02	01	Persediaan Bahan baku bangunan
1	1	7	02	02	Persediaan Bahan/bibit tanaman
1	1	7	02	03	Persediaan Bibit ternak
1	1	7	02	04	Persediaan Bahan obat-obatan
1	1	7	02	05	Persediaan Bahan kimia
1	1	7	02	06	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1	1	7	02	07	Dst.....
1	1	7	03	00	Persediaan Barang Lainnya
1	1	7	03	01	Persediaan Barang yg Akan diberikan kepada Pihak Ketiga

Kodifikasi					URAIAN
1	1	8	00	00	Aset untuk Dikonsolidasikan
1	1	8	01	00	R/K SKPD
1	1	8	01	01	R/K SKPD
1	1	8	01	02	Dst.....
1	2	0	00	00	INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	1	00	00	Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	1	01	00	Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1	2	1	01	01	Pinjaman kepada Perusahaan Negara
1	2	1	01	02	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
1	2	1	01	03	Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
1	2	1	01	04	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	1	01	05	Dst.....
1	2	1	02	00	Investasi dalam Obligasi
1	2	1	02	01	Investasi dalam Obligasi
1	2	1	02	02	Dst.....
1	2	1	03	00	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	03	00	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	1	03	02	Dst.....
1	2	1	04	00	Dana Bergulir
1	2	1	04	01	Dana Bergulir
1	2	1	04	02	Dst.....
1	2	1	05	00	Deposito Jangka Panjang
1	2	1	05	01	Deposito Jangk Panjang
1	2	1	05	02	Dst.....
1	2	1	06	00	Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	06	01	Investasi Non Permanen Lainnya
1	2	1	06	02	Dst.....
1	2	2	00	00	Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	2	01	00	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1	2	2	01	01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di PDAM Kota Bandung
1	2	2	01	02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di PD BPR
1	2	2	01	03	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di PD Kebersihan
1	2	2	01	04	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Pasar bermartabat
1	2	2	01	05	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di BJB
1	2	2	01	06	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di

Kodifikasi					URAIAN
					Yayasan Purnabhakti
1	2	2	01	07	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di Koperasi Pegawai Kota Bandung
1	2	2	02	00	Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	02	01	Investasi Permanen Lainnya
1	2	2	02	02	Dst.....
1	3	0	00	00	ASET TETAP
1	3	1	00	00	Tanah
1	3	1	01	00	Tanah Perkampungan
1	3	1	01	01	Tanah Kampung
1	3	1	01	02	Tanah Emplasmen
1	3	1	01	03	Tanah Kuburan
1	3	1	01	04	Dst.....
1	3	1	02	00	Tanah Pertanian
1	3	1	02	01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1	3	1	02	02	Tanah Tegalan
1	3	1	02	03	Tanah Ladang
1	3	1	02	04	Dst.....
1	3	1	03	00	Tanah Perkebunan
1	3	1	03	01	Tanah Perkebunan
1	3	1	04	00	Kebun Campuran
1	3	1	04	01	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1	3	1	04	02	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1	3	1	04	03	Dst.....
1	3	1	05	00	Hutan
1	3	1	05	01	Hutan Lebat
1	3	1	05	02	Hutan Belukar
1	3	1	05	03	Hutan Tanaman Jenis
1	3	1	05	04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1	3	1	05	05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1	3	1	05	06	Dst.....
1	3	1	06	00	Kolam Ikan
1	3	1	06	01	Tambak
1	3	1	06	02	Air Tawar
1	3	1	06	03	Dst.....
1	3	1	07	00	Danau/Rawa
1	3	1	07	01	Rawa

Kodifikasi					URAIAN
1	3	1	07	02	Danau
1	3	1	08	00	Tanah Tandus/Rusak
1	3	1	08	01	Tanah Tandus
1	3	1	08	02	Tanah Rusak
1	3	1	09	00	Alang-alang dan Padang Rumput
1	3	1	09	01	Alang-alang
1	3	1	09	02	Padang Rumput
1	3	1	10	00	Tanah Pengguna Lain
1	3	1	10	01	Tanah Penggalian
1	3	1	10	02	Dst.....
1	3	1	11	00	Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	3	1	11	01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	1	11	02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	1	11	03	Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	1	11	04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1	3	1	11	05	Tanah Kosong
1	3	1	11	06	Tanah Peternakan
1	3	1	11	07	Tanah Bangunan Pengairan
1	3	1	11	08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1	3	1	11	09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1	3	1	11	10	Dst.....
1	3	1	12	00	Tanah Pertambangan
1	3	1	12	01	Pertambangan
1	3	1	12	02	Dst.....
1	3	1	13	00	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1	3	1	13	01	Tanah Lapangan Olah Raga
1	3	1	13	02	Tanah Lapangan Parkir
1	3	1	13	03	Tanah Lapangan Penimbun Barang
1	3	1	13	04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	1	13	05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	1	13	06	Tanah Lapangan Terbang
1	3	1	13	07	Tanah Untuk Bangunan Jalan
1	3	1	13	08	Tanah Untuk Bangunan Air
1	3	1	13	09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	1	13	10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	1	13	11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1	3	1	13	12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1	3	1	13	13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	1	13	14	Dst.....

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	00	00	Peralatan dan Mesin
1	3	2	01	00	Alat-Alat Besar Darat
1	3	2	01	01	Tractor
1	3	2	01	02	Grader
1	3	2	01	03	Excavator
1	3	2	01	04	Pile Driver
1	3	2	01	05	Hauler
1	3	2	01	06	Asphal Equipment
1	3	2	01	07	Compacting Equipment
1	3	2	01	08	Aggregate & Concrete Equipment
1	3	2	01	09	Loader
1	3	2	01	10	Alat Pengangkat
1	3	2	01	11	Mesin Proses
1	3	2	01	12	Dst.....
1	3	2	02	00	Alat-Alat Besar Apung
1	3	2	02	01	Dredger
1	3	2	02	02	Floating Excavator
1	3	2	02	03	Amphibi Dredger
1	3	2	02	04	Kapal Tarik
1	3	2	02	05	Mesin Proses Agung
1	3	2	02	06	Dst.....
1	3	2	03	00	Alat-alat Bantu
1	3	2	03	01	Alat Penarik
1	3	2	03	02	Feeder
1	3	2	03	03	Compressor
1	3	2	03	04	Electric Generating Set
1	3	2	03	05	Pompa
1	3	2	03	06	Mesin Bor
1	3	2	03	07	Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	2	03	08	Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	2	03	09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1	3	2	03	10	Dst.....
1	3	2	04	00	Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	04	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	2	04	02	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	2	04	03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	04	04	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	2	04	05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	2	04	06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	2	04	07	Dst.....
1	3	2	05	00	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	2	05	01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	05	02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1	3	2	06	00	Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	2	06	01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1	3	2	06	02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1	3	2	06	03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1	3	2	07	00	Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	2	07	01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1	3	2	07	02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1	3	2	07	03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	2	08	00	Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	2	08	01	Pesawat Terbang
1	3	2	08	02	Dst.....
1	3	2	09	00	Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	09	01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1	3	2	09	02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1	3	2	09	03	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	09	04	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	09	05	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	2	09	06	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	2	09	07	Perkakas Bengkel Khusus
1	3	2	09	08	Peralatan Las
1	3	2	09	09	Perkakas Pabrik Es
1	3	2	09	10	Dst.....
1	3	2	10	00	Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	10	01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	2	10	02	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	10	03	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	10	04	Perkakas Pengangkat
1	3	2	10	05	Perkakas Standar (Standart Tool)
1	3	2	10	06	Perkakas Khusus (Special Tool)
1	3	2	10	07	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	2	10	08	Peralatan Tukang-tukang Besi
1	3	2	10	09	Peralatan Tukang Kayu
1	3	2	10	10	Peralatan Tukang Kulit
1	3	2	10	11	Peralatan Ukur, Gip & Feting
1	3	2	10	12	Dst.....
1	3	2	11	00	Alat Ukur
1	3	2	11	01	Alat Ukur universal
1	3	2	11	02	Alat Ukur/Test Intelegensia
1	3	2	11	03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	2	11	04	Alat Ukur /Test Klinis Lain

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	11	05	Alat Calibrasi
1	3	2	11	06	Oscilloscope
1	3	2	11	07	Universal Tester
1	3	2	11	08	Alat Ukur/Pembanding
1	3	2	11	09	Alat Ukur Lainnya
1	3	2	11	10	Alat Timbangan/Blora
1	3	2	11	11	Anak Timbangan/Biasa
1	3	2	11	12	Takaran Kering
1	3	2	11	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1	3	2	11	14	Takaran Latex/Getah Susu
1	3	2	11	15	Gelas Takar Berbagai Kapasitas
1	3	2	11	16	Dst.....
1	3	2	12	00	Alat Pengolahan
1	3	2	12	01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	2	12	02	Alat Panen/Pengolahan
1	3	2	12	03	Alat-Alat Peternakan
1	3	2	12	04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	2	12	05	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	12	06	Alat Prosesing
1	3	2	12	07	Alat Pasca Panen
1	3	2	12	08	Alat Produksi Perikanan
1	3	2	12	09	Dst.....
1	3	2	13	00	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1	3	2	13	01	Alat Pemeliharaan Tanaman
1	3	2	13	02	Alat Panen
1	3	2	13	03	Alat Penyimpanan
1	3	2	13	04	Alat Laboratorium
1	3	2	13	05	Alat Penangkap Ikan
1	3	2	13	06	Dst.....
1	3	2	14	00	Alat Kantor
1	3	2	14	01	Mesin Tik
1	3	2	14	02	Mesin Hitung/Jumlah
1	3	2	14	03	Alat Reproduksi (Pengganda)
1	3	2	14	04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1	3	2	14	05	Alat Kantor Lainnya
1	3	2	14	06	Dst.....
1	3	2	15	00	Alat Rumah Tangga
1	3	2	15	01	Meubelair
1	3	2	15	02	Alat Pengukur Waktu
1	3	2	15	03	Alat Pembersih
1	3	2	15	04	Alat Pendingin
1	3	2	15	05	Alat Dapur
1	3	2	15	06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	2	15	07	Alat Pemadam Kebakaran

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	15	08	Dst.....
1	3	2	16	00	Komputer
1	3	2	16	01	Komputer Unit/Jaringan
1	3	2	16	02	Personal Komputer
1	3	2	16	03	Peralatan Komputer Mainframe
1	3	2	16	04	Peralatan Mini Komputer
1	3	2	16	05	Peralatan Personal Komputer
1	3	2	16	06	Perlatan Jaringan
1	3	2	16	07	Dst.....
1	3	2	17	00	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	2	17	01	Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	02	Meja Rapat Pejabat
1	3	2	17	03	Kursi Kerja Pejabat
1	3	2	17	04	Kursi Rapat Pejabat
1	3	2	17	05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	06	Kursi Tamu di Ruangn Pejabat
1	3	2	17	07	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	2	17	08	Dst.....
1	3	2	18	00	Alat Studio
1	3	2	18	01	Peralatan Studio Visual
1	3	2	18	02	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	2	18	03	Peralatan Studio Video dan Film A
1	3	2	18	04	Peralatan Cetak
1	3	2	18	05	Peralatan Computing
1	3	2	18	06	Peralatan Pemetaan Ukur
1	3	2	18	07	Dst.....
1	3	2	19	00	Alat Komunikasi
1	3	2	19	01	Alat Komunikasi Telephone
1	3	2	19	02	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	2	19	03	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	2	19	04	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	2	19	05	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	2	19	06	Alat Komunikasi Sosial
1	3	2	19	07	Alat-alat Sandi
1	3	2	19	08	Dst.....
1	3	2	20	00	Peralatan Pemancar
1	3	2	20	01	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	2	20	02	Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	2	20	03	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	2	20	04	Peralatan Pemancar UHF
1	3	2	20	05	Peralatan Pemancar SHF
1	3	2	20	06	Peralatan Antena MF/MW
1	3	2	20	07	Peralatan Antena HF/SW

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	20	08	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	2	20	09	Peralatan Antena UHF
1	3	2	20	10	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	2	20	11	Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	2	20	12	Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	2	20	13	Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	2	20	14	Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	2	20	15	Peralatan Microvawe FPU
1	3	2	20	16	Peralatan Microvawe Terrestrial
1	3	2	20	17	Peralatan Microvawe TVRO
1	3	2	20	18	Peralatan Dummy Load
1	3	2	20	19	Switcher Antena
1	3	2	20	20	Switcher/Menara Antena
1	3	2	20	21	Feeder
1	3	2	20	22	Humidity Control
1	3	2	20	23	Program Input Equipment
1	3	2	20	24	Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	2	20	25	Dst.....
1	3	2	21	00	Alat Kedokteran
1	3	2	21	01	Alat Kedokteran Umum
1	3	2	21	02	Alat Kedokteran Gigi
1	3	2	21	03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	2	21	04	Alat Kedokteran Mata
1	3	2	21	05	Alat Kedokteran T.H.T
1	3	2	21	06	Alat Rotgen
1	3	2	21	07	Alat Farmasi
1	3	2	21	08	Alat Kedokteran Bedah
1	3	2	21	09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	2	21	10	Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
1	3	2	21	11	Mortuary
1	3	2	21	12	Alat Kesehatan Anak
1	3	2	21	13	Poliklinik Set
1	3	2	21	14	Penderita Cacat Tubuh
1	3	2	21	15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1	3	2	21	16	Alat Kedokteran Jantung
1	3	2	21	17	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	2	21	18	Alat Kedokteran Radiologi
1	3	2	21	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	2	21	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	2	21	21	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	2	21	22	Alat Kedokteran Hewan
1	3	2	21	23	Dst.....
1	3	2	22	00	Alat Kesehatan
1	3	2	22	01	Alat Kesehatan Perawatan
1	3	2	22	02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	22	03	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	2	22	04	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	2	22	05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1	3	2	22	06	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	2	22	07	Dst.....
1	3	2	23	00	Unit-Unit Laboratorium
1	3	2	23	01	Alat Laboratorium Kimia Air
1	3	2	23	02	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	03	Alat Laboratorium Hidro Kimia
1	3	2	23	04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1	3	2	23	05	Alat laboratorium Buatan/Geologi
1	3	2	23	06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	2	23	07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1	3	2	23	08	Unit-Unit Laboratorium
1	3	2	23	09	Alat Laboratorium Cocom Tanam
1	3	2	23	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1	3	2	23	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1	3	2	23	12	Alat Laboratorium Umum
1	3	2	23	13	Alat Laboratorium Umum A
1	3	2	23	14	Alat Laboratorium Kedokteran
1	3	2	23	15	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	16	Alat Laboratorium Kimia
1	3	2	23	17	Alat Laboratorium Microbiologi A
1	3	2	23	18	Alat Laboratorium Patologi
1	3	2	23	19	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	2	23	20	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	2	23	21	Alat Laboratorium Film
1	3	2	23	22	Alat Laboratorium Makanan
1	3	2	23	23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	2	23	24	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	2	23	25	Alat Laboratorium Fisika
1	3	2	23	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	23	27	Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	2	23	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	2	23	29	Alat Laboratorium Pasir
1	3	2	23	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	2	23	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1	3	2	23	32	Alat Laboratorium Metalography
1	3	2	23	33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	2	23	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	2	23	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	2	23	36	Alat Laboratorium Matrologie
1	3	2	23	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1	3	2	23	38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	2	23	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1	3	2	23	40	Alat Laboratorium Uji Tekstel

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	23	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	2	23	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1	3	2	23	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1	3	2	23	44	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	2	23	45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	2	23	46	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	23	47	Alat Laboratorium Pertanian A
1	3	2	23	48	Alat Laboratorium Pertanian B
1	3	2	23	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	2	23	50	Alat Laboratorium energi Surya
1	3	2	23	51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
1	3	2	23	52	Alat Laboratorium Oceanografi
1	3	2	23	53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	2	23	54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1	3	2	23	55	Alat Laboratorium Biologi
1	3	2	23	56	Alat Laboratorium Geofisika
1	3	2	23	57	Alat Laboratorium Tambang
1	3	2	23	58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	2	23	59	Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	2	23	60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	2	23	61	Laboratorium Kearsipan
1	3	2	23	62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1	3	2	23	63	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1	3	2	23	64	Alat Laboratorium Lainnya
1	3	2	23	65	Dst.....
1	3	2	24	00	Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	2	24	01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1	3	2	24	02	Bidang Studi : Matematika
1	3	2	24	03	Bidang Studi : IPA Dasar
1	3	2	24	04	Bidang Studi : IPA Lanjutan
1	3	2	24	05	Bidang Studi : IPA Menengah
1	3	2	24	06	Bidang Studi : IPA Atas
1	3	2	24	07	Bidang Studi : IPS
1	3	2	24	08	Bidang Studi : Agama Islam
1	3	2	24	09	Bidang Studi : Keterampilan
1	3	2	24	10	Bidang Studi : Kesenian
1	3	2	24	11	Bidang Studi : Olah Raga
1	3	2	24	12	Bidang Studi : PMP
1	3	2	24	13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1	3	2	24	14	Dst.....
1	3	2	25	00	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	25	01	Analytical instrument
1	3	2	25	02	Instrument Probe/Sensor
1	3	2	25	03	General Laboratory Tool

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	25	04	Instrument Probe/Sensor A
1	3	2	25	05	Glassware Plastic/Utensils
1	3	2	25	06	Laboratory Safety Equipment
1	3	2	25	07	Dst.....
1	3	2	26	00	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	2	26	01	Radiation Detector
1	3	2	26	02	Modular Counting and Scientific
1	3	2	26	03	Assembly/Accounting System
1	3	2	26	04	Recorder Display
1	3	2	26	05	System/Power Supply
1	3	2	26	06	Measuring / Testing Device
1	3	2	26	07	Opto Electronics
1	3	2	26	08	Accelator
1	3	2	26	09	Reactor Expermental System
1	3	2	26	10	Dst.....
1	3	2	27	00	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	01	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	2	27	02	Alat Kesehatan Kerja
1	3	2	27	03	Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	04	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Meteorological Equipment
1	3	2	27	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Sumber Radiasi
1	3	2	28	00	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	2	28	01	Radiation Application Equipment
1	3	2	28	02	Non Destructive Test (NDT) Device
1	3	2	28	03	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
1	3	2	28	04	Peralatan Hidrologi
1	3	2	28	05	Dst.....
1	3	2	29	00	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	2	29	01	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
1	3	2	29	02	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	2	29	03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	2	29	04	Laboratorium Lingkungan
1	3	2	29	05	Alat Laboratorium Penunjang
1	3	2	29	06	Dst.....
1	3	2	30	00	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	30	01	Towing Carriage
1	3	2	30	02	Wave Generator and Absorber
1	3	2	30	03	Data Aqquistion and Analyzing System
1	3	2	30	04	Cavitation Tunnel
1	3	2	30	05	Overhead Cranes

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	30	06	Peralatan umum
1	3	2	30	07	Pemesinan : Model Ship Workshop
1	3	2	30	08	Pemesinan : Propeller Model Workshop
1	3	2	30	09	Pemesinan : Mechanical Workshop
1	3	2	30	10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1	3	2	30	11	Pemesinan Painting Shop
1	3	2	30	12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1	3	2	30	13	Pemesinan : Electrical Workshop
1	3	2	30	14	MOB
1	3	2	30	15	Photo and Film Equipment
1	3	2	30	16	Dst.....
1	3	2	31	00	Senjata Api
1	3	2	31	01	Senjata Genggam
1	3	2	31	02	Senjata Pinggang
1	3	2	31	03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1	3	2	31	04	Senapan Mesin
1	3	2	31	05	Mortir
1	3	2	31	06	Anti Lapis Baja
1	3	2	31	07	Artileri Medan (Armed)
1	3	2	31	08	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
1	3	2	31	09	Peluru Kendali/Rudal
1	3	2	31	10	Kavaleri
1	3	2	31	11	Senjata Lain-lain
1	3	2	32	00	Persenjataan Non Senjata Api
1	3	2	32	01	Alat Keamanan
1	3	2	32	02	Non Senjata Api
1	3	2	33	00	Amunisi
1	3	2	33	01	Amunisi Umum
1	3	2	33	02	Amunisi Darat
1	3	2	33	03	Dst.....
1	3	2	34	00	Senjata Sinar
1	3	2	34	01	Laser
1	3	2	34	02	Dst.....
1	3	2	35	00	Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	2	35	01	Alat Bantu Kemanan
1	3	2	35	02	Alat Perlindungan
1	3	2	35	03	Alat Keamanan dan Perlindungan - Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1	3	2	35	04	Dst.....
1	3	3	00	00	Gedung dan Bangunan
1	3	3	01	00	Bangunan Gedung Tempat Kerja

Kodifikasi					URAIAN
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Kantor
1	3	3	01	02	Bangunan Gudang
1	3	3	01	03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1	3	3	01	04	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	3	01	05	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	3	01	06	Bangunan Kesehatan
1	3	3	01	07	Bangunan Oceanarium/Opservatorium
1	3	3	01	08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	3	01	09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	3	01	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	3	01	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1	3	3	01	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	3	01	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1	3	3	01	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	3	01	15	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1	3	3	01	16	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	3	01	17	Bangunan Stasiun Bus
1	3	3	01	18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1	3	3	01	19	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	3	01	20	Bangunan Gedung Museum
1	3	3	01	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1	3	3	01	22	Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	3	01	23	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
1	3	3	01	24	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	3	01	25	Bangunan Gedung Kramatorium
1	3	3	01	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	3	01	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	3	02	00	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	02	01	Rumah Negara Golongan I
1	3	3	02	02	Rumah Negara Golongan II
1	3	3	02	03	Rumah Negara Golongan III
1	3	3	02	04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	3	02	05	Asrama
1	3	3	02	06	Hotel
1	3	3	02	07	Motel
1	3	3	02	08	Flat/Rumah Susun
1	3	3	02	09	Dst.....
1	3	3	03	00	Bangunan Menara
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1	3	3	03	02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	3	03	04	Dst.....
1	3	3	04	00	Bangunan Bersejarah

Kodifikasi					URAIAN
1	3	3	04	01	Istana Peringatan
1	3	3	04	02	Rumah Adat
1	3	3	04	03	Rumah Peninggalan Sejarah
1	3	3	04	04	Makam Sejarah
1	3	3	04	05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1	3	3	04	06	Dst.....
1	3	3	05	00	Tugu Peringatan
1	3	3	05	01	Tugu Kemerdekaan
1	3	3	05	02	Tugu Pembangunan
1	3	3	05	03	Tugu Peringatan Lainnya
1	3	3	06	00	Candi
1	3	3	06	01	Candi Hindhu
1	3	3	06	02	Candi Budha
1	3	3	06	03	Candi Lainnya
1	3	3	07	00	Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	3	07	01	Bangunan Bersejarah Lainnya
1	3	3	08	00	Tugu Peringatan
1	3	3	08	01	Tugu Peringatan
1	3	3	09	00	Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	3	09	01	Tugu/Tanda Batas
1	3	3	09	02	Dst.....
1	3	3	10	00	Rambu-Rambu
1	3	3	10	01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1	3	3	10	02	Rambu Tidak Bersuar
1	3	3	10	03	Dst.....
1	3	3	11	00	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	3	11	01	Rumwey/Threshold Light
1	3	3	11	02	Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	3	11	03	Approach Light
1	3	3	11	04	Rumwey Identification Light(Rells)
1	3	3	11	05	Signal
1	3	3	11	06	Flood Light
1	3	3	11	07	Dst.....
1	3	4	00	00	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	3	4	01	00	Jalan
1	3	4	01	01	Jalan Negara/Nasional
1	3	4	01	02	Jalan Propinsi
1	3	4	01	03	Jalan Kabupaten/Kota
1	3	4	01	04	Jalan Desa

Kodifikasi					URAIAN
1	3	4	01	05	Jalan Khusus
1	3	4	01	06	Jalan Tol
1	3	4	01	07	Jalan Kereta
1	3	4	01	08	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	01	09	Dst.....
1	3	4	02	00	Jembatan
1	3	4	02	01	Jembatan Negara/Nasional
1	3	4	02	02	Jembatan Propinsi
1	3	4	02	03	Jembatan Kabupaten/Kota
1	3	4	02	04	Jembatan Desa
1	3	4	02	05	Jembatan Khusus
1	3	4	02	06	Jembatan Pada Jalan Tol
1	3	4	02	07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1	3	4	02	08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	02	09	Jembatan Penyeberangan
1	3	4	02	10	Dst.....
1	3	4	03	00	Bangunan Air Irigasi
1	3	4	03	01	Bangunan Waduk
1	3	4	03	02	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	4	03	03	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	4	03	04	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	4	03	05	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	4	03	06	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	4	03	07	Dst.....
1	3	4	04	00	Bangunan Air Pasang Surut
1	3	4	04	01	Bangunan Waduk
1	3	4	04	02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	4	04	03	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	4	04	04	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1	3	4	04	05	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	4	04	06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	4	04	07	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	4	04	08	Dst.....
1	3	4	05	00	Bangunan Air Rawa
1	3	4	05	01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1	3	4	05	02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1	3	4	05	03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1	3	4	05	04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1	3	4	05	05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1	3	4	05	06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1	3	4	05	07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	4	05	08	Dst.....

Kodifikasi					URAIAN
1	3	4	06	00	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	06	01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1	3	4	06	02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1	3	4	06	03	Bangunan Pembuang Pengaman
1	3	4	06	04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	4	06	05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1	3	4	06	06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1	3	4	06	07	Dst.....
1	3	4	07	00	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	4	07	01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	07	Dst.....
1	3	4	08	00	Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	01	Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	03	Bangunan Pembawa Air Bersih
1	3	4	08	04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	06	Dst.....
1	3	4	09	00	Bangunan Air Kotor
1	3	4	09	01	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	4	09	02	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	4	09	03	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1	3	4	09	04	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	4	09	05	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	4	09	06	Dst.....
1	3	4	10	0	Bangunan Air
1	3	4	10	01	Bangunan Air Laut
1	3	4	10	02	Bangunan Air Tawar
1	3	4	10	03	Dst.....
1	3	4	11	00	Instalasi Air Minum/ Air Bersih
1	3	4	11	01	Air Muka Tanah
1	3	4	11	02	Air Sumber /Mata Air
1	3	4	11	03	Air Tanah Dalam

Kodifikasi					URAIAN
1	3	4	11	04	Air Tanah Dangkal
1	3	4	11	05	Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	4	11	06	Dst.....
1	3	4	12	00	Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	01	Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	02	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	4	12	03	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	4	12	04	Dst.....
1	3	4	13	00	Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	4	13	01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	4	13	02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	4	14	00	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	02	Dst.....
1	3	4	15	00	Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	15	01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	4	15	02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	4	15	03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1	3	4	15	04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	4	15	05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	4	15	06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	4	15	07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	4	15	08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	4	15	09	Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
1	3	4	15	10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	4	15	11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1	3	4	15	12	Dst.....
1	3	4	16	00	Instalasi Gardu Listrik
1	3	4	16	01	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	4	16	02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	4	16	03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	4	16	04	Dst.....
1	3	4	17	00	Instalasi Pertahanan
1	3	4	17	01	Instalasi Pertahanan Di Darat
1	3	4	17	02	Dst.....
1	3	4	18	00	Instalasi Gas
1	3	4	18	01	Instalasi Gardu Gas
1	3	4	18	02	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	4	19	00	Instalasi Pengaman

Kodifikasi					URAIAN
1	3	4	19	01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	4	19	02	Dst.....
1	3	4	20	00	Jaringan Air Minum
1	3	4	20	01	Jaringan Pembawa
1	3	4	20	02	Jaringan Induk Distribusi
1	3	4	20	03	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	4	20	04	Jaringan Sambungan ke rumah
1	3	4	20	04	Dst.....
1	3	4	21	00	Jaringan Listrik
1	3	4	21	01	Jaringan Transmisi
1	3	4	21	02	Jaringan Distribusi
1	3	4	22	00	Jaringan Telepon
1	3	4	22	01	Jaringan Telepon Di atas Tanah
1	3	4	22	02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1	3	4	22	03	Jaringan Telepon Didalam Air
1	3	4	23	00	Jaringan Gas
1	3	4	23	01	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	4	23	02	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	4	23	03	Jaringan Pipa Dinas
1	3	4	23	04	Jaringan BBM
1	3	4	23	05	Dst.....
1	3	5	00	00	Aset Tetap Lainnya
1	3	5	01	00	Buku
1	3	5	01	01	Umum
1	3	5	01	02	Filsafat
1	3	5	01	03	Agama
1	3	5	01	04	Ilmu Sosial
1	3	5	01	05	Ilmu Bahasa
1	3	5	01	06	Matematika & Pengetahuan alam
1	3	5	01	07	Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	5	01	08	Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1	3	5	01	09	Geografi, Biografi, Sejarah
1	3	5	01	10	Dst.....
1	3	5	02	00	Terbitan
1	3	5	02	01	Terbitan Berkala
1	3	5	02	02	Buku Laporan
1	3	5	02	03	Dst.....
1	3	5	03	00	Barang-Barang Perpustakaan
1	3	5	03	01	Peta
1	3	5	03	02	Naskah (Manuskrip)

Kodifikasi					URAIAN
1	3	5	03	03	Musik
1	3	5	03	04	Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	5	03	05	Three Dimensional Artetacs and Realita
1	3	5	03	06	Bentuk Micro (Microform)
1	3	5	03	07	Rekaman Suara Sound Recording
1	3	5	03	08	Berkas Komputer (Computer Files)
1	3	5	03	09	Film Bergerak dan Rekaman Video
1	3	5	03	10	Tarscalt
1	3	5	03	11	Dst.....
1	3	5	04	00	Barang Bercorak Kebudayaan
1	3	5	04	01	Pahatan
1	3	5	04	02	Lukisan
1	3	5	04	03	Alat Kesenian
1	3	5	04	04	Alat Olah Raga
1	3	5	04	05	Tanda Penghargaan
1	3	5	04	06	Maket dan Foto Dokumen
1	3	5	04	07	Benda-benda Bersejarah
1	3	5	04	08	Barang Kerajinan
1	3	5	05	00	Alat Olah Raga Lainnya
1	3	5	05	01	Senam
1	3	5	05	02	Alat Olah Raga Air
1	3	5	05	03	Alat Olah Raga Udara
1	3	5	05	04	Alat Olah Raga Lainnya
1	3	5	06	00	Hewan
1	3	5	06	01	Binatang Ternak
1	3	5	06	02	Binatang Unggas
1	3	5	06	03	Binatang Melata
1	3	5	06	04	Binatang Ikan
1	3	5	06	05	Hewan Kebun Binatang
1	3	5	06	06	Hewan Pengamanan
1	3	5	06	07	Dst.....
1	3	5	07	00	Tanaman
1	3	5	07	01	Tanaman Perkebunan
1	3	5	07	02	Tanaman Holtikultura
1	3	5	07	03	Tanaman Kehutanan
1	3	5	07	04	Tanaman Hias
1	3	5	07	05	Tanaman Obat dan Kosmetika
1	3	5	07	06	Dst.....
1	3	5	08	00	Aset tetap renovasi
1	3	5	08	01	Aset Tetap renovasi
1	3	5	08	02	Dst.....
1	3	6	00	00	Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kodifikasi					URAIAN
1	3	6	01	00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	02	Dst.....
1	3	7	00	00	Akumulasi Penyusutan
1	3	7	01	00	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	7	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1	3	7	01	02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1	3	7	01	03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1	3	7	01	04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	7	01	05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	7	01	06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	7	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	7	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	7	01	09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1	3	7	01	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	7	01	11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1	3	7	01	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
1	3	7	01	13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
1	3	7	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1	3	7	01	15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1	3	7	01	16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1	3	7	01	17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	7	01	18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
1	3	7	01	19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1	3	7	01	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1	3	7	01	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1	3	7	01	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1	3	7	01	23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1	3	7	01	24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	7	01	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	7	01	26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	7	01	27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	7	01	28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

Kodifikasi					URAIAN
1	3	7	01	29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	7	01	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	7	01	31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1	3	7	01	32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1	3	7	01	33	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	7	02	00	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	7	02	01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	7	02	02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	7	02	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	02	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	05	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1	3	7	02	06	Akumulasi Penyusutan Candi
1	3	7	02	07	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	08	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan Lain
1	3	7	02	09	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	7	02	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1	3	7	02	11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	7	03	00	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1	3	7	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan
1	3	7	03	02	Akumulasi Penyusutan Jembatan
1	3	7	03	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi
1	3	7	03	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1	3	7	03	05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1	3	7	03	06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	7	03	07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	7	03	08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	7	03	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1	3	7	03	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	7	03	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	7	03	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor
1	3	7	03	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	7	03	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

Kodifikasi					URAIAN
1	3	7	03	15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	7	03	16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
1	3	7	03	17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan
1	3	7	03	18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas
1	3	7	03	19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman
1	3	7	03	20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum
1	3	7	03	21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik
1	3	7	03	22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon
1	3	7	03	23	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas
1	3	7	04	00	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	7	04	01	Akumulasi Penyusutan Buku*
1	3	7	04	02	Akumulasi Penyusutan Terbitan
1	3	7	04	03	Akumulasi Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan
1	3	7	04	04	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan
1	3	7	04	05	Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya
1	3	7	04	06	Akumulasi Penyusutan Aset tetap Renovasi
1	4	0	00	00	DANA CADANGAN
1	4	1	00	00	Dana Cadangan
1	4	1	01	00	Dana Cadangan
1	4	1	01	01	Dana Cadangan
1	4	1	01	02	Dst.....
1	5	0	00	00	ASET LAINNYA
1	5	1	00	00	Tagihan Jangka Panjang
1	5	1	01	00	Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	1	01	01	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III – LRA
1	5	1	01	02	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas – LRA
1	5	1	01	03	Dst.....
1	5	1	02	00	Tuntutan Ganti Rugi
1	5	1	02	01	Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah – LRA
1	5	1	02	02	Tuntutan Ganti Kerugian Barang Daerah – LRA
1	5	2	00	00	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	2	01	00	Sewa
1	5	2	01	01	Sewa
1	5	2	01	02	Dst.....

Kodifikasi					URAIAN
1	5	2	02	00	Kerjasama Pemanfaatan
1	5	2	02	01	Kerjasama Pemanfaatan
1	5	2	02	02	Dst.....
1	5	2	03	00	Bangun guna serah
1	5	2	03	01	Bangun guna serah
1	5	2	03	02	Dst.....
1	5	2	04	00	Bangun serah guna
1	5	2	04	01	Bangun serah guna
1	5	2	04	02	Dst.....
1	5	3	00	00	Aset Tidak Berwujud
1	5	3	01	00	Goodwill
1	5	3	01	01	Goodwill
1	5	3	01	02	Dst.....
1	5	3	02	00	Lisensi dan frenchise
1	5	3	02	01	Lisensi dan frenchise
1	5	3	02	02	Dst.....
1	5	3	03	00	Hak Cipta
1	5	3	03	01	Hak Cipta
1	5	3	03	02	Dst.....
1	5	3	04	00	Paten
1	5	3	04	01	Paten
1	5	3	04	02	Dst.....
1	5	3	05	00	Aset Tidat Berwujud Lainnya
1	5	3	05	01	Software
1	5	3	05	02	Kajian
1	5	3	05	03	Dst.....
1	5	3	06	00	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	3	06	01	Akumulasi Amortisasi Goodwill
1	5	3	06	02	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1	5	3	06	03	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1	5	3	06	04	Akumulasi Amortisasi Paten
1	5	3	06	05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya
1	5	4	0	00	Aset Lain-lain
1	5	4	01	00	Aset Lain-lain
1	5	4	01	01	Aset Lain-lain....

Kodifikasi					URAIAN
1	5	4	01	02	Dst.....

BAGAN AKUN STANDAR
AKUN KEWAJIBAN

Kodifikasi					URAIAN
2					KEWAJIBAN
2	1	0	00	00	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	1	00	00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	1	01	00	Utang Taspen
2	1	1	01	01	Utang Taspen
2	1	1	01	02	Dst.....
2	1	1	02	00	Utang Askes
2	1	1	02	01	Utang Askes
2	1	1	02	02	Dst.....
2	1	1	03	00	Utang PPh Pusat
2	1	1	03	01	Utang PPh 21
2	1	1	03	02	Utang PPh 22
2	1	1	03	03	Utang PPh 23
2	1	1	03	04	Utang PPh 25
2	1	1	03	05	Dst.....
2	1	1	04	00	Utang PPN Pusat
2	1	1	04	01	Utang PPN Pusat
2	1	1	04	02	Dst.....
2	1	1	05	00	Utang Taperum
2	1	1	05	01	Utang Taperum
2	1	1	05	02	Dst.....
2	1	1	06	00	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	06	01	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	1	06	02	Dst.....
2	1	1	07	00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	07	01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2	1	1	07	02	Dst.....
2	1	1	08	00	Utang Jaminan
2	1	1	08	01	Utang Jaminan
2	1	1	08	02	Dst.....
2	1	2	00	00	Utang Bunga

Kodifikasi					URAIAN
2	1	2	01	00	Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	01	01	Utang Bunga kepada Pemerintah
2	1	2	01	02	Dst.....
2	1	2	02	00	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	02	01	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	2	02	02	Dst.....
2	1	2	03	00	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2	1	2	03	01	Utang Bunga Kepada BUMN
2	1	2	03	02	Utang Bunga Kepada BUMD
2	1	2	03	03	Dst.....
2	1	2	04	00	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	04	01	Utang Bunga kepada Bank
2	1	2	04	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	2	04	03	Dst.....
2	1	2	05	00	Utang Bunga Obligasi
2	1	2	05	01	Utang Bunga Obligasi.....
2	1	2	05	02	Dst.....
2	1	2	06	00	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	06	01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2	1	2	06	02	Dst.....
2	1	2	07	00	Utang Bunga Luar Negeri
2	1	2	07	01	Utang Bunga Luar Negeri
2	1	2	07	02	Dst.....
2	1	3	00	00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	3	01	00	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	01	01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	1	3	01	02	Dst.....
2	1	3	02	00	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	02	01	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	3	02	02	Dst.....
2	1	3	03	00	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi
2	1	3	03	01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi
2	1	3	03	02	Dst.....
2	1	3	04	00	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat

Kodifikasi					URAIAN
2	1	3	04	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2	1	3	04	02	Dst.....
2	1	3	05	00	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	05	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	1	3	05	02	Dst.....
2	1	3	06	00	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	06	01	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	3	06	02	Dst.....
2	1	3	07	00	Bagian Lancar Utang Premium (Diskonto) Obligasi
2	1	3	07	01	Bagian Lancar Utang Premium (Diskonto) Obligasi
2	1	3	07	02	Dst.....
2	1	4	00	00	Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	4	01	00	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	01	01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	4	01	02	Dst.....
2	1	4	02	00	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	02	01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	4	02	02	Dst.....
2	1	4	03	00	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	03	01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	4	03	02	Dst.....
2	1	4	04	00	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2	1	4	04	01	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2	1	4	04	02	Dst.....
2	1	5	00	00	Utang Beban
2	1	5	01	00	Utang Beban Pegawai
2	1	5	01	01	Utang Beban Gaji dan Tunjangan
2	1	5	01	02	Dst.....
2	1	5	02	00	Utang Beban Barang dan Jasa
2	1	5	02	01	Utang Beban Persediaan
2	1	5	02	02	Utang Beban Jasa
2	1	5	02	03	Utang Beban Pemeliharaan
2	1	5	02	04	Utang Beban Perjalanan Dinas
2	1	5	02	05	Utang Beban Beasiswa Pendidikan PNS
2	1	5	02	06	Utang Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2	1	5	02	07	Dst.....

Kodifikasi					URAIAN
2	1	5	03	00	Utang Beban Bunga
2	1	5	03	01	Utang Beban Bunga ...
2	1	5	03	02	Dst.....
2	1	5	04	00	Utang Beban Subsidi
2	1	5	04	01	Utang Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah
2	1	5	04	02	Utang Beban Subsidi kepada Perusahaan
2	1	5	04	03	Dst.....
2	1	5	05	00	Utang Beban Hibah
2	1	5	05	01	Utang Beban Hibah.....
2	1	5	05	02	Dst.....
2	1	5	06	00	Utang Beban Bantuan Sosial
2	1	5	06	01	Utang Beban Bantuan Sosial.....
2	1	5	06	02	Dst.....
2	1	5	07	00	Utang Beban Transfer
2	1	5	07	01	Utang Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
2	1	5	07	02	Utang Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2	1	5	07	03	Utang Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	5	07	04	Utang Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
2	1	5	07	05	Utang Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
2	1	5	07	06	Dst.....
2	1	5	08	00	Utang Beban Lain-lain
2	1	5	08	01	Utang Beban Lain-lain
2	1	5	08	02	Dst.....
2	1	6	00	00	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	01	00	Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	6	01	01	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	6	01	02	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	6	01	03	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	6	01	04	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah
2	1	6	02	00	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	6	02	01	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat
2	1	6	02	02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
2	1	6	02	03	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Kodifikasi					URAIAN
2	1	6	02	04	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	6	03	00	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah
2	1	6	03	01	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	6	03	02	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya
2	1	6	03	03	Dst.....
2	1	6	04	00	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	04	01	Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	6	04	02	Dst.....
2	1	7	00	00	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
2	1	7	01	00	R/K PPKD
2	1	7	01	01	R/K PPKD
2	2	0	00	00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	1	00	00	Utang Dalam Negeri
2	2	1	01	00	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	01	01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2	2	1	02	00	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	02	01	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	1	03	00	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	03	01	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2	2	1	04	00	Utang Pemerintah Pusat
2	2	1	04	01	Utang Pemerintah Pusat
2	2	1	05	00	Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	2	1	05	01	Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2	2	1	06	00	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	2	1	06	01	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2	2	1	07	00	Premium (Diskonto) Obligasi
2	2	1	07	01	Premium (Diskonto) Obligasi
2	2	2	00	00	Utang Luar Negeri
2	2	2	01	00	Utang Luar Negeri
2	2	2	01	01	Utang Luar Negeri

Kodifikasi					URAIAN
2	2	3	00	00	Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	3	01	00	Utang Jangka Panjang Lainnya
2	2	3	01	01	Utang Jangka Panjang Lainnya

BAGAN AKUN STANDAR
AKUN EKUITAS

Kodifikasi					URAIAN
3	0	0	00	00	EKUITAS
3	1	0	00	00	EKUITAS
3	1	1	00	00	Ekuitas
3	1	1	01	00	Ekuitas
3	1	1	01	01	Ekuitas
3	1	1	02	00	Koreksi Ekuitas
3	1	1	02	01	Koreksi Nilai Persediaan
3	1	1	02	01	Selisih Revaluasi Aset
3	1	1	02	01	Lain-Lain
3	1	2	00	00	Surplus/Defisit LO
3	1	1	01	01	Koreksi/Defisit LO
3	1	1	01	01	Koreksi/Defisit LO

BAGAN AKUN STANDAR
AKUN PENDAPATAN-LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	0	0	00	00	PENDAPATAN LRA
4	1	0	00	00	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA
4	1	1	00	00	Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LRA*
4	1	1	01	01	PKB-Mobil Penumpang- Sedan- LRA*
4	1	1	01	02	PKB-Mobil Penumpang- Jeep- LRA*
4	1	1	01	03	PKB-Mobil Penumpang- Minibus- LRA*
4	1	1	01	04	PKB -Mobil Bus - Microbus- LRA*
4	1	1	01	05	PKB -Mobil Bus - Bus- LRA*
4	1	1	01	06	PKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up – LRA*
4	1	1	01	07	PKB -Mobil Barang/Beban-Light Truck – LRA*
4	1	1	01	08	PKB -Mobil Barang/Beban-Truck – LRA*
4	1	1	01	09	PKB -Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda 2 – LRA*
4	1	1	01	10	PKB -Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda 3 – LRA*
4	1	1	01	11	PKB -Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air – LRA*
4	1	1	01	12	Dst.....
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)- LRA*
4	1	1	02	01	BBNKB - Mobil Penumpang - Sedan – LRA*
4	1	1	02	02	BBNKB - Mobil Penumpang - Jeep – LRA*
4	1	1	02	03	BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus – LRA*
4	1	1	02	04	BBNKB - Mobil Bus - Microbus – LRA*
4	1	1	02	05	BBNKB - Mobil Bus - Bus – LRA*
4	1	1	02	06	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up – LRA*
4	1	1	02	07	BBNKB - Mobil Barang /Beban - Light Truck – LRA*
4	1	1	02	08	BBNKB - Mobil Barang /Beban - Truck – LRA*
4	1	1	02	09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 –LRA*
4	1	1	02	10	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 –LRA*
4	1	1	02	11	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air – LRA*
4	1	1	02	12	Dst.....
4	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LRA*
4	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium – LRA*
4	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina – LRA*
4	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus – LRA*

Kodifikasi				URAIAN	
4	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar – LRA*
4	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas – LRA*
4	1	1	03	06	Dst.....
4	1	1	04		Pajak Air Permukaan – LRA*
4	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan – LRA*
4	1	1	05		Pajak Rokok – LRA*
4	1	1	05	01	Pajak Rokok - LRA *
4	1	1	06	00	Pajak Hotel - LRA
4	1	1	06	01	Hotel Bintang Lima Berlian - LRA
4	1	1	06	02	Hotel Bintang Lima - LRA
4	1	1	06	03	Hotel Bintang Empat - LRA
4	1	1	06	04	Hotel Bintang Tiga - LRA
4	1	1	06	05	Hotel Bintang Dua - LRA
4	1	1	06	06	Hotel Bintang Satu - LRA
4	1	1	06	07	Hotel Melati Tiga - LRA
4	1	1	06	08	Hotel Melati Dua - LRA
4	1	1	06	09	Hotel Melati Satu - LRA
4	1	1	06	10	Motel - LRA
4	1	1	06	11	Cottage - LRA
4	1	1	06	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos - LRA
4	1	1	06	13	Wisma Pariwisata - LRA
4	1	1	06	14	Gubuk Pariwisata - LRA
4	1	1	06	15	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LRA
4	1	1	06	16	Dst.....
4	1	1	07	00	Pajak Restoran dan Rumah Makan - LRA
4	1	1	07	01	Restoran - LRA
4	1	1	07	02	Rumah Makan - LRA
4	1	1	07	03	Kafetaria - LRA
4	1	1	07	04	Kantin - LRA
4	1	1	07	05	Katering - LRA
4	1	1	07	06	Warung - LRA
4	1	1	07	07	Bar - LRA
4	1	1	07	08	Jasa Boga - LRA
4	1	1	07	09	Dst.....
4	1	1	08	00	Pajak Hiburan - LRA
4	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LRA
4	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA
4	1	1	08	03	Kontes Kecantikan - LRA

Kodifikasi				URAIAN	
4	1	1	08	04	Kontes Binaraga - LRA
4	1	1	08	05	Pameran - LRA
4	1	1	08	06	Diskotik - LRA
4	1	1	08	07	Karaoke - LRA
4	1	1	08	08	Klub Malam - LRA
4	1	1	08	09	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
4	1	1	08	10	Permainan Bilyar - LRA
4	1	1	08	11	Permainan Golf - LRA
4	1	1	08	12	Permainan Bowling - LRA
4	1	1	08	13	Pacuan Kuda - LRA
4	1	1	08	14	Balap Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	1	08	15	Permainan Ketangkasan - LRA
4	1	1	08	16	Panti Pijat/Refleksi - LRA
4	1	1	08	17	Mandi Uap/Spa - LRA
4	1	1	08	18	Pusat Kebugaran - LRA
4	1	1	08	19	Pertandingan Olah Raga - LRA
4	1	1	08	20	Tempat Rekreasi - LRA
4	1	1	08	21	Kolam Renang - LRA
4	1	1	08	22	Gedung Kesenian - LRA
4	1	1	08	23	Dst.....
4	1	1	09	00	Pajak Reklame - LRA
4	1	1	09	01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron - LRA
4	1	1	09	02	Reklame Kain - LRA
4	1	1	09	03	Reklame Melekat/Stiker - LRA
4	1	1	09	04	Reklame Selebaran - LRA
4	1	1	09	05	Reklame Berjalan - LRA
4	1	1	09	06	Reklame Udara - LRA
4	1	1	09	07	Reklame Apung - LRA
4	1	1	09	08	Reklame Suara - LRA
4	1	1	09	09	Reklame Film/Slide - LRA
4	1	1	09	10	Reklame Peragaan - LRA
4	1	1	09	11	Reklame Bando Jalan (JPO) - LRA
4	1	1	09	12	Reklame Template - LRA
4	1	1	09	13	Reklame Iklan - LRA
4	1	1	09	14	Dst.....
4	1	1	10	00	Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA
4	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA
4	1	1	10	03	Dst.....
4	1	1	11	00	Pajak Parkir - LRA
4	1	1	11	01	Pajak Parkir - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	1	12	00	Pajak Air Bawah Tanah - LRA
4	1	1	12	01	Pajak Air Bawah Tanah - LRA
4	1	1	13	00	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	14	00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	1	14	01	Asbes - LRA
4	1	1	14	02	Batu Tulis - LRA
4	1	1	14	03	Batu Setengah Permata - LRA
4	1	1	14	04	Batu Kapur - LRA
4	1	1	14	05	Batu Apung - LRA
4	1	1	14	06	Batu Permata - LRA
4	1	1	14	07	Bentonit - LRA
4	1	1	14	08	Dolomit - LRA
4	1	1	14	09	Feldspar - LRA
4	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LRA
4	1	1	14	11	Grafit - LRA
4	1	1	14	12	Granit/Andesit - LRA
4	1	1	14	13	Gips - LRA
4	1	1	14	14	Kalsit - LRA
4	1	1	14	15	Kaolin - LRA
4	1	1	14	16	Leusit - LRA
4	1	1	14	17	Magnesit - LRA
4	1	1	14	18	Mika - LRA
4	1	1	14	19	Marmar - LRA
4	1	1	14	20	Nitrat - LRA
4	1	1	14	21	Opsidien - LRA
4	1	1	14	22	Oker - LRA
4	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LRA
4	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LRA
4	1	1	14	25	Perlit - LRA
4	1	1	14	26	Phospat - LRA
4	1	1	14	27	Talk - LRA
4	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
4	1	1	14	29	Tanah Diatome - LRA
4	1	1	14	30	Tanah Liat - LRA
4	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LRA
4	1	1	14	32	Tras - LRA
4	1	1	14	33	Yarosif - LRA
4	1	1	14	34	Zeolit - LRA
4	1	1	14	35	Basal - LRA
4	1	1	14	36	Trakit - LRA

Kodifikasi				URAIAN	
4	1	1	14	37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA
4	1	1	14	38	Dst.....
4	1	1	15	00	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	15	01	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	16	00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA
4	1	2	00	00	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
4	1	2	01	00	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LRA
4	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LRA
4	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LRA
4	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4	1	2	02	00	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA
4	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LRA
4	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA
4	1	2	03	00	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LRA
4	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LRA
4	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LRA
4	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA
4	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LRA
4	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	04	00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA
4	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	2	05	00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	06	00	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	2	06	01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LRA
4	1	2	06	02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LRA
4	1	2	06	03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LRA
4	1	2	07	00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	2	07	11	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	2	07	12	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	2	07	13	Dst.....
4	1	2	08	00	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
4	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
4	1	2	08	04	Dst.....
4	1	2	09	00	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
4	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LRA
4	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LRA
4	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LRA
4	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
4	1	2	10	00	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	2	11	00	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	2	11	01	Rumah Tangga - LRA
4	1	2	11	02	Perkantoran - LRA
4	1	2	11	03	Industri - LRA
4	1	2	12	00	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA
4	1	2	12	02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LRA
4	1	2	13	00	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LRA
4	1	2	14	00	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	2	14	01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	2	15	00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	2	15	02	Laboratorium - LRA
4	1	2	15	03	Ruangan -LRA
4	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	16	00	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA
4	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA
4	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA
4	1	2	17	00	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LRA
4	1	2	17	02	pelelangan Ternak - LRA
4	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LRA
4	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LRA
4	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LRA
4	1	2	18	00	Retribusi Terminal - LRA
4	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
4	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	2	19	00	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	20	00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
4	1	2	21	00	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LRA
4	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LRA
4	1	2	22	00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA
4	1	2	23	00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4	1	2	23	03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4	1	2	24	00	Retribusi Penyebrangan Air - LRA
4	1	2	24	01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LRA
4	1	2	24	02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA
4	1	2	25	00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LRA
4	1	2	26	00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	26	01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA
4	1	2	27	00	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	27	01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	28	00	Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA
4	1	2	29	00	Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
4	1	2	30	00	Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4	1	2	31	00	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	2	31	01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LRA
4	1	2	31	02	Penggunaan Koridor Tertentu -LRA
4	1	2	31	03	Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LRA
4	1	2	32	00	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA
4	1	3	00	00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
4	1	3	01	00	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA
4	1	3	01	01	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening - LRA
4	1	3	01	02	PD. Kebersihan - LRA
4	1	3	01	03	PT. Bank Jabar - LRA
4	1	3	01	04	PD. BPR - LRA
4	1	3	01	05	PD. Pasar Bermartabat - LRA
4	1	3	01	06	Koperasi Pegawai Kota Bandung - LRA
4	1	3	02	00	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LRA
4	1	3	02	01	BUMN - LRA
4	1	3	02	02	Dst..... - LRA
4	1	3	03	00	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4	1	3	03	01	Perusahaan patungan - LRA
4	1	3	03	02	Dst..... - LRA
4	1	4	00	00	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA
4	1	4	01	00	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA
4	1	4	01	01	Pelepasan Hak Atas Tanah - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai - LRA
4	1	4	01	03	Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai - LRA
4	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas - LRA
4	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LRA
4	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LRA
4	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas - LRA
4	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon - LRA
4	1	4	01	09	Penjualan Lampu Hias Bekas - LRA
4	1	4	01	10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan - LRA
4	1	4	01	11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas - LRA
4	1	4	01	12	Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi - LRA
4	1	4	01	13	Penjualan Hasil Pertanian - LRA
4	1	4	01	14	Penjualan Hasil Kehutanan - LRA
4	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan - LRA
4	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan - LRA
4	1	4	01	17	Penjualan Hasil Perikanan - LRA
4	1	4	01	18	Penjualan Hasil Sitaan - LRA
4	1	4	02	00	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	03	00	Penerimaan Jasa Giro - LRA
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4	1	4	03	02	Jasa Giro Pemegang Kas - LRA
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA
4	1	4	03	04	Dst.....
4	1	4	04	00	Pendapatan Bunga Deposito - LRA
4	1	4	04	01	Rekening Deposito pada Bank - LRA
4	1	4	05	00	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4	1	4	05	01	Kerugian Uang Daerah - LRA
4	1	4	05	02	Kerugian Barang Daerah - LRA
4	1	4	06	00	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari - LRA
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA
4	1	4	06	04	Dst.....
4	1	4	07	00	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan

Kodifikasi					URAIAN
					Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LRA
4	1	4	07	02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LRA
4	1	4	07	03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA
4	1	4	07	04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LRA
4	1	4	07	05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA
4	1	4	07	06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LRA
4	1	4	07	07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LRA
4	1	4	07	08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4	1	4	07	09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LRA
4	1	4	07	10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LRA
4	1	4	07	11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LRA
4	1	4	07	12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LRA
4	1	4	07	09	Dst.....
4	1	4	08	00	Pendapatan Denda Pajak - LRA
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA
4	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	4	09	00	Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	4	10	00	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	11	00	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	11	02	Dst
4	1	4	12	00	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4	1	4	12	03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LRA
4	1	4	12	04	Dst
4	1	4	13	00	Pendapatan dari Pengembalian - LRA
4	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4	1	4	13	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4	1	4	13	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4	1	4	13	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
4	1	4	13	05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka - LRA
4	1	4	13	06	Pendapatan dari Pengembalian SP2D - LRA
4	1	4	13	07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Pensiunan - LRA
4	1	4	13	08	Dst

Kodifikasi					URAIAN
4	1	4	14	00	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA
4	1	4	14	01	Fasilitas Sosial - LRA
4	1	4	14	02	Fasilitas Umum - LRA
4	1	4	14	03	Fasilitas Gelanggang Generasi Muda (GGM) - LRA
4	1	4	14	04	Fasilitas Umum Gedung Olah Raga (GOR) - LRA
4	1	4	15	00	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4	1	4	15	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4	1	4	15	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4	1	4	15	03	Dst
4	1	4	16	00	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4	1	4	16	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LRA
4	1	4	16	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LRA
4	1	4	16	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LRA
4	1	4	17	00	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4	1	4	17	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Golongan III - LRA
4	1	4	17	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4	1	4	17	03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah - LRA
4	1	4	18	00	Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA
4	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	19	00	Pendapatan Zakat - LRA
4	1	4	19	01	Pendapatan Zakat - LRA
4	1	4	20	00	Pendapatan BLUD - LRA
4	1	4	20	01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4	1	4	20	02	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak - LRA
4	1	4	20	03	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut - LRA
4	1	4	20	04	Dst

Kodifikasi					URAIAN
4	1	4	21	00	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA
4	1	4	21	01	Hasil Pengelolaan Dana bergulir dari Kelompok Masyarakat - LRA
4	1	4	22	00	Penerimaan Setoran dari Lembaga Lain - LRA
4	1	4	22	01	Penerimaan Setoran dari PT. TASPEN - LRA
4	1	4	22	02	Penerimaan Setoran dari PT. PLN - LRA
4	1	4	23	00	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	1	4	23	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	2	0	00	00	PENDAPATAN TRANSFER - LRA
4	2	1	00	00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4	2	1	01	00	Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
4	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
4	2	1	01	06	Dst
4	2	1	02	00	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
4	2	1	02	11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LRA
4	2	1	03	00	Dana Alokasi Umum - LRA
4	2	1	03	00	Dana Alokasi Umum - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LRA
4	2	1	03	02	Dana Alokasi Umum untuk Tunjangan Kependidikan - LRA
4	2	1	04	00	Dana Alokasi Khusus - LRA
4	2	1	04	00	Dana Alokasi Khusus - LRA
4	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
4	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
4	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA
4	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
4	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LRA
4	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA
4	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LRA
4	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
4	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA
4	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
4	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LRA
4	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA
4	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LRA
4	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
4	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LRA
4	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4	2	1	04	20	Dst
4	2	2	00	00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
4	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	02	Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	03	Dana Tambahan Infrastruktur - LRA
4	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LRA
4	2	2	02	02	Dana Keistimewaan - LRA
4	2	2	03	01	Dana Penyesuaian - LRA
4	2	2	03	02	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	03	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	04	Dana Insentif Daerah - LRA
4	2	2	03	05	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	2	2	03	06	Bantuan Operasional Sekolah - LRA
4	2	2	03	07	Dst
4	2	3	00	00	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya - LRA
4	2	3	01	00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4	2	3	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan di Atas Air - LRA
4	2	3	01	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4	2	3	01	04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air - LRA
4	2	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	2	3	01	06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LRA
4	2	3	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LRA
4	2	3	01	08	Bagi Hasil dari Kemetrolagian - LRA
4	2	3	01	09	Bagi hasil dari pajak hasil hutan - LRA
4	2	3	01	10	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA
4	2	3	01	11	Dst
4	2	3	02	00	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA
4	2	3	02	01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA
4	2	3	03	00	Pendapatan Otonomi Khusus - LRA
4	2	3	03	01	Pendapatan Otonomi Khusus - LRA
4	2	4	00	00	Bantuan Keuangan - LRA
4	2	4	01	00	Bantuan Keuangan dari Provinsi - LRA
4	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat - LRA
4	2	4	01	02	Dst
4	2	4	02	00	Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LRA
4	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LRA
4	2	4	02	02	Dst
4	2	4	03	00	Bantuan Keuangan dari Kota - LRA
4	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Kota - LRA
4	2	4	03	02	Dst
4	3	0	00	00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

Kodifikasi					URAIAN
4	3	1	00	00	Pendapatan Hibah - LRA
4	3	1	01	00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4	3	1	01	01	Pemerintah - LRA
4	3	1	02	00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	02	01	Pemerintah Daerah - LRA
4	3	1	03	00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LRA
4	3	1	03	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta - LRA
4	3	1	03	02	Dst
4	3	1	04	00	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA
4	3	1	04	01	Kelompok Masyarakat/Perorangan - LRA
4	3	1	05	00	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri - LRA
4	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari Bilateral - LRA
4	3	1	05	02	Pendapatan Hibah dari Multilateral - LRA
4	3	1	05	03	Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya - LRA
4	3	2	00	00	Dana Darurat - LRA
4	3	2	01	00	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4	3	3	01	00	Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	01	01	Pendapatan Lainnya - LRA
4	3	3	01	01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
					Dst

*) = akun yang belum/tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung

BAGAN AKUN STANDAR
AKUN BELANJA

Kodifikasi					URAIAN
5	0	0	00	00	BELANJA DAERAH
5	1				Belanja Operasional
5	1	1			Belanja Pegawai
5	1	1	1		Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	1	1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5	1	1	1	2	Tunjangan Keluarga
5	1	1	1	3	Tunjangan Jabatan
5	1	1	1	4	Tunjangan Fungsional
5	1	1	1	5	Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	1	6	Tunjangan Beras
5	1	1	1	7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	1	8	Pembulatan Gaji
5	1	1	1	9	Iuran Jaminan Kesehatan
5	1	1	1	10	Uang Paket
5	1	1	1	11	Tunjangan Badan Musyawarah
5	1	1	1	12	Tunjangan Komisi
5	1	1	1	13	Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	1	14	Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	1	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	1	16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	1	17	Uang Duka Wafat/Tewas
5	1	1	1	18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	1	19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	1	20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5	1	1	1	21	Dst.....
5	1	1	2		Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	2	1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5	1	1	2	2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5	1	1	2	3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5	1	1	2	4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5	1	1	2	5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
5	1	1	2	6	Dst.....

Kodifikasi				URAIAN	
5	1	1	3		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	3	1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	3	2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	3	3	Dst.....
5	1	1	4		Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5	1	1	4	1	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5	1	1	4	2	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5	1	1	4	3	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5	1	1	4	4	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
5	1	1	4	5	Biaya Pemungutan PBB
5	1	1	5		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	5	1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	5	2	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	5	3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	5	4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5	1	1	5	5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
5	1	1	5	6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5	1	1	5	7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5	1	1	5	8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5	1	1	5	9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5	1	1	5	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5	1	1	5	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
5	1	1	5	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5	1	1	5	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
5	1	1	5	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
5	1	1	5	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5	1	1	5	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5	1	1	5	17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Kodifikasi					URAIAN
5	1	1	6		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	6	1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
5	1	1	6	2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
5	1	1	6	3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
5	1	1	6	4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
5	1	1	6	5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
5	1	1	6	6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
5	1	1	6	7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	6	8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
5	1	1	6	9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
5	1	1	6	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5	1	1	6	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA
5	1	1	6	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
5	1	1	6	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA
5	1	1	6	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
5	1	1	6	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
5	1	1	6	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
5	1	1	6	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA
5	1	1	6	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA
5	1	1	6	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA
5	1	1	6	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
5	1	1	6	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
5	1	1	6	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA
5	1	1	6	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
5	1	1	6	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA
5	1	1	6	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA

Kodifikasi					URAIAN
5	1	1	6	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
5	1	1	6	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
5	1	1	6	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA
5	1	1	6	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
5	1	1	6	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA
5	1	1	6	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA
5	1	1	6	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
5	1	1	7		Uang Lembur
5	1	1	7	1	Uang Lembur PNS
5	1	1	7	2	Uang Lembur Non PNS
5	1	2			Belanja Barang dan Jasa
5	1	2	1		Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor
5	1	2	1	2	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5	1	2	1	3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5	1	2	1	4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5	1	2	1	5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	1	2	1	6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	1	2	1	7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5	1	2	1	8	Belanja Pengisian Tabung Gas
5	1	2	1	9	Dst.....
5	1	2	2		Belanja Bahan/Material
5	1	2	2	1	Belanja Bahan Baku Bangunan
5	1	2	2	2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5	1	2	2	3	Belanja Bibit Ternak
5	1	2	2	4	Belanja Bahan obat-obatan
5	1	2	2	5	Belanja Bahan Kimia
5	1	2	2	6	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5	1	2	2	7	Dst.....
5	1	2	3		Belanja Jasa Kantor
5	1	2	3	1	Belanja Telepon
5	1	2	3	2	Belanja Air
5	1	2	3	3	Belanja Listrik

Kodifikasi					URAIAN
5	1	2	3	4	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5	1	2	3	5	Belanja Surat Kabar/Majalah
5	1	2	3	6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5	1	2	3	7	Belanja Paket/Pengiriman
5	1	2	3	8	Belanja Sertifikasi
5	1	2	3	9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	1	2	3	10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	1	2	3	11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	2	3	12	Dst.....
5	1	2	4		Belanja Premi Asuransi
5	1	2	4	1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5	1	2	4	2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	2	4	3	Dst.....
5	1	2	5		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	5	1	Belanja Jasa Service
5	1	2	5	2	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	1	2	5	3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5	1	2	5	4	Belanja Jasa KIR
5	1	2	5	5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	2	5	6	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	2	5	7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5	1	2	5	8	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5	1	2	5	9	Dst.....
5	1	2	6		Belanja Cetak dan Penggandaan
5	1	2	6	1	Belanja Cetak
5	1	2	6	2	Belanja Penggandaan
5	1	2	6	3	Dst.....
5	1	2	7		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	2	7	1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5	1	2	7	2	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
5	1	2	7	3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5	1	2	7	4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
5	1	2	7	5	Dst.....
5	1	2	8		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	2	8	1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	2	8	2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	2	8	3	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara

Kodifikasi					URAIAN
5	1	2	8	4	Dst.....
5	1	2	9		Belanja Sewa Alat Berat
5	1	2	9	1	Belanja Sewa Eskavator
5	1	2	9	2	Belanja Sewa Buldoser
5	1	2	9	3	Dst.....
5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	2	10	1	Belanja Sewa Meja Kursi
5	1	2	10	2	Belanja Sewa Komputer dan Printer
5	1	2	10	3	Belanja Sewa Proyektor
5	1	2	10	4	Belanja Sewa Generator
5	1	2	10	5	Belanja Sewa Tenda
5	1	2	10	6	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5	1	2	10	7	Dst.....
5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	2	11	1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5	1	2	11	2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	2	11	3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5	1	2	11	4	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
5	1	2	11	5	Dst.....
5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	12	1	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	2	12	2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	2	12	3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	2	12	4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	2	12	5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	2	12	6	Dst.....
5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
5	1	2	13	1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5	1	2	13	2	Dst.....
5	1	2	14		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5	1	2	14	1	Belanja Pakaian KORPRI
5	1	2	14	2	Belanja Pakaian adat daerah
5	1	2	14	3	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5	1	2	14	4	Belanja Pakaian Olahraga
5	1	2	14	5	Dst.....
5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	15	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kodifikasi					URAIAN
5	1	2	15	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5	1	2	15	3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5	1	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5	1	2	16	1	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5	1	2	16	2	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5	1	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	2	17	1	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
5	1	2	17	2	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
5	1	2	17	3	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan
5	1	2	18	1	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	2	18	2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	18	3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	18	4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5	1	2	18	5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	18	6	Dst.....
5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi
5	1	2	19	1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5	1	2	19	2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	2	19	3	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5	1	2	19	4	Dst.....
5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	20	1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5	1	2	20	2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	20	3	Dst.....
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	21	1	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5	1	2	21	2	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	21	3	Dst.....
5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	22	1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

Kodifikasi					URAIAN
5	1	2	22	2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5	1	2	22	3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5	1	2	22	4	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5	1	2	22	5	Dst
5	1	2	23		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5	1	2	23	1	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
5	1	2	23	2	Belanja Sosialisasi
5	1	2	23	3	Belanja Bimbingan Teknis
5	1	2	23	4	Dst.....
5	1	2	24		Belanja Honorarium Non Pegawai
5	1	2	24	1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5	1	2	24	2	Moderator
5	1	2	24	3	Dst.....
5	1	2	25		Honorarium PNS
5	1	2	25	1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	1	2	25	2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	1	2	25	3	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	25	4	Honorarium PNS Lainnya
5	1	2	25	5	Dst.....
5	1	2	26		Honorarium Non PNS
5	1	2	26	1	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	26	2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5	1	2	26	3	Dst.....
5	1	2	27		Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	2	27	1	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	27	2	Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
5	1	2	27	3	Dst.....
5	1	3			Belanja Bunga
5	1	3	1		Bunga Utang Pinjaman
5	1	3	1	1	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	3	1	2	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	3	1	3	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	3	1	4	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	3	1	5	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD

Kodifikasi					URAIAN
5	1	3	1	6	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN
5	1	3	1	7	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5	1	3	1	8	Dst.....
5	1	3	2		Bunga Utang Obligasi
5	1	3	2	1	Bunga Utang Obligasi
5	1	3	2	2	Dst.....
5	1	4			Belanja Subsidi
5	1	4	1		Belanja Subsidi
5	1	4	1	1	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	1	2	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	1	3	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5	1	5			Belanja Hibah
5	1	5	1		Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	1	1	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	2		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	5	2	1	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5	1	5	2	2	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5	1	5	2	3	Hibah kepada Pemerintah Kota
5	1	5	3		Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	3	1	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	3	2	Dst.....
5	1	5	4		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	4	1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	5		Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	5	1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	5	2	Dst ...
5	1	5	6		Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
5	1	5	6	1	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....
5	1	5	6	2	Dst.....
5	1	6			Belanja Bantuan Sosial
5	1	6	1		Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial

Kodifikasi					URAIAN
					Kemasyarakatan
5	1	6	1	1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	1	2	Dst.....
5	1	6	2		Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5	1	6	2	1	Belanja Bantuan Sosial kepada
5	1	6	2	2	Dst.....
5	2				BELANJA MODAL
5	2	1			Belanja Modal Tanah
5	2	1	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5	2	1	1	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kampung
5	2	1	1	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Emplasmen
5	2	1	1	3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan
5	2	1	1	4	Dst.....
5	2	1	2		Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian
5	2	1	2	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5	2	1	2	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tegalan
5	2	1	2	3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Ladang
5	2	1	2	4	Dst.....
5	2	1	3		Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	3	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	3	2	Dst.....
5	2	1	4		Belanja Modal Pengadaan Kebun Campuran
5	2	1	4	1	Belanja Modal Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5	2	1	4	2	Belanja Modal Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5	2	1	4	3	Dst.....
5	2	1	5		Belanja Modal Pengadaan Hutan
5	2	1	5	1	Belanja Modal Pengadaan Hutan Lebat
5	2	1	5	2	Belanja Modal Pengadaan Hutan Belukar
5	2	1	5	3	Belanja Modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5	2	1	5	4	Belanja Modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5	2	1	5	5	Belanja Modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5	2	1	5	6	Dst.....

Kodifikasi					URAIAN
5	2	1	6		Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan
5	2	1	6	1	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan Tambak
5	2	1	6	2	Belanja Modal Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar
5	2	1	6	3	Dst.....
5	2	1	7		Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5	2	1	7	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Rawa
5	2	1	7	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Danau
5	2	1	8		Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5	2	1	8	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Tandus
5	2	1	8	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Rusak
5	2	1	9		Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5	2	1	9	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Alang-alang
5	2	1	9	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Padang Rumput
5	2	1	10		Belanja Modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5	2	1	10	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Penggalian
5	2	1	11		Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5	2	1	11	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal
5	2	1	11	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	1	11	3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5	2	1	11	4	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5	2	1	11	5	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kosong
5	2	1	11	6	Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan
5	2	1	11	7	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5	2	1	11	8	Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5	2	1	11	9	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5	2	1	11	10	Dst.....
5	2	1	12		Belanja Modal Pengadaan Pertambangan
5	2	1	12	1	Belanja Modal Pengadaan Pertambangan
5	2	1	13		Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Kodifikasi					URAIAN
5	2	1	13	1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	1	13	2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5	2	1	13	3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5	2	1	13	4	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	1	13	5	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	1	13	6	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5	2	1	13	7	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5	2	1	13	8	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5	2	1	13	9	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5	2	1	13	10	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5	2	1	13	11	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5	2	1	13	12	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5	2	1	13	13	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	1	13	14	Dst.....
5	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	2	1		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5	2	2	1	1	Belanja Modal Pengadaan Tractor
5	2	2	1	2	Belanja Modal Pengadaan Grader
5	2	2	1	3	Belanja Modal Pengadaan Excavator
5	2	2	1	4	Belanja Modal Pengadaan Pile Driver
5	2	2	1	5	Belanja Modal Pengadaan Hauler
5	2	2	1	6	Belanja Modal Pengadaan Asphalt Equipment
5	2	2	1	7	Belanja Modal Pengadaan Compacting Equipment
5	2	2	1	8	Belanja Modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5	2	2	1	9	Belanja Modal Pengadaan Loader
5	2	2	1	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengangkat
5	2	2	1	11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses
5	2	2	1	12	Dst.....
5	2	2	2		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5	2	2	2	1	Belanja Modal Pengadaan Dredger
5	2	2	2	2	Belanja Modal Pengadaan Floating Excavator
5	2	2	2	3	Belanja Modal Pengadaan Amphibi Dredger
5	2	2	2	4	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tarik

Kodifikasi					URAIAN
5	2	2	2	5	Belanja Modal Pengadaan Mesin Proses Apung
5	2	2	2	6	Dst.....
5	2	2	3		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5	2	2	3	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Penarik
5	2	2	3	2	Belanja Modal Pengadaan Feeder
5	2	2	3	3	Belanja Modal Pengadaan Compressor
5	2	2	3	4	Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set
5	2	2	3	5	Belanja Modal Pengadaan Pompa
5	2	2	3	6	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor
5	2	2	3	7	Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	2	3	8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	2	3	9	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5	2	2	3	10	Dst.....
5	2	2	4		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	4	1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	4	2	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	4	3	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	4	4	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	4	5	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	2	4	6	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	2	5		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	5	1	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	5	2	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5	2	2	6		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5	2	2	6	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	2	6	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	2	6	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5	2	2	7		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Kodifikasi					URAIAN
5	2	2	7	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5	2	2	7	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	2	7	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	2	8		Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5	2	2	8	1	Belanja Modal Pengadaan Kapal Terbang
5	2	2	8	2	Dst.....
5	2	2	9		Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	9	1	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	2	9	2	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	2	9	3	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	9	4	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service
5	2	2	9	5	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	2	9	6	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5	2	2	9	7	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5	2	2	9	8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Las
5	2	2	9	9	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5	2	2	9	10	Dst.....
5	2	2	10		Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	10	1	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	2	10	2	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	10	3	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	10	4	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
5	2	2	10	5	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5	2	2	10	6	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5	2	2	10	7	Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5	2	2	10	8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5	2	2	10	9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5	2	2	10	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5	2	2	10	11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5	2	2	10	12	Dst.....
5	2	2	11		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

Kodifikasi					URAIAN
5	2	2	11	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal
5	2	2	11	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5	2	2	11	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5	2	2	11	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5	2	2	11	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Kalibrasi
5	2	2	11	6	Belanja Modal Pengadaan Oscilloscope
5	2	2	11	7	Belanja Modal Pengadaan Universal Tester
5	2	2	11	8	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5	2	2	11	9	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5	2	2	11	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5	2	2	11	11	Belanja Modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5	2	2	11	12	Belanja Modal Pengadaan Takaran Kering
5	2	2	11	13	Belanja Modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5	2	2	11	14	Belanja Modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5	2	2	11	15	Belanja Modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5	2	2	11	16	Dst.....
5	2	2	12		Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan
5	2	2	12	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	2	12	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5	2	2	12	3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Peternakan
5	2	2	12	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	2	12	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Laboratorium Pertanian
5	2	2	12	6	Belanja Modal Pengadaan Alat Prosesing
5	2	2	12	7	Belanja Modal Pengadaan Alat Pasca Panen
5	2	2	12	8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
5	2	2	12	9	Dst.....
5	2	2	13		Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5	2	2	13	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5	2	2	13	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Panen
5	2	2	13	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan
5	2	2	13	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium
5	2	2	13	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5	2	2	13	6	Dst.....

Kodifikasi				URAIAN	
5	2	2	14		Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
5	2	2	14	1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
5	2	2	14	2	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5	2	2	14	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5	2	2	14	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5	2	2	14	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5	2	2	14	6	Dst.....
5	2	2	15		Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5	2	2	15	1	Belanja Modal Pengadaan Meubelair
5	2	2	15	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5	2	2	15	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Pembersih
5	2	2	15	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
5	2	2	15	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur
5	2	2	15	6	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	2	2	15	7	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5	2	2	15	8	Dst.....
5	2	2	16		Belanja Modal Pengadaan Komputer
5	2	2	16	1	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5	2	2	16	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5	2	2	16	3	Belanja Modal Pengadaan CPU
5	2	2	16	4	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5	2	2	16	5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5	2	2	16	6	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer
5	2	2	16	7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5	2	2	16	8	Peralatan Personal Komputer
5	2	2	16	9	Belanja Modal Pengadaan Server Komputer
5	2	2	16	10	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
5	2	2	16	11	Belanja Modal Pengadaan Printer
5	2	2	16	12	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display
5	2	2	16	13	Belanja Modal Pengadaan Scanner
5	2	2	16	14	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)
5	2	2	16	15	Dst.....
5	2	2	17		Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	17	1	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	2	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5	2	2	17	3	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5	2	2	17	4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

Kodifikasi					URAIAN
5	2	2	17	5	Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	6	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	2	17	7	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	2	17	8	Dst.....
5	2	2	18		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio
5	2	2	18	1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5	2	2	18	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	18	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5	2	2	18	4	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Cetak
5	2	2	18	5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Computing
5	2	2	18	6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5	2	2	18	7	Dst.....
5	2	2	19		Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi
5	2	2	19	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5	2	2	19	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	2	19	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	2	19	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	2	19	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	2	19	6	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5	2	2	19	7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sandi
5	2	2	19	8	Dst.....
5	2	2	20		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5	2	2	20	1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	2	20	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	2	20	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	2	20	4	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5	2	2	20	5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5	2	2	20	6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5	2	2	20	7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5	2	2	20	8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5	2	2	20	9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena UHF
5	2	2	20	10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	2	20	11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator

Kodifikasi					URAIAN
					VHF/VHF
5	2	2	20	12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5	2	2	20	13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5	2	2	20	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5	2	2	20	15	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5	2	2	20	16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
5	2	2	20	17	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5	2	2	20	18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5	2	2	20	19	Belanja Modal Pengadaan Switcher Antena
5	2	2	20	20	Belanja Modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5	2	2	20	21	Belanja Modal Pengadaan Feeder
5	2	2	20	22	Belanja Modal Pengadaan Humidity Control
5	2	2	20	23	Belanja Modal Pengadaan Program Input Equipment
5	2	2	20	24	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	2	20	25	Dst.....
5	2	2	21		Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
5	2	2	21	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5	2	2	21	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5	2	2	21	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	2	21	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5	2	2	21	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5	2	2	21	6	Belanja Modal Pengadaan Alat Rotgen
5	2	2	21	7	Belanja Modal Pengadaan Alat Farmasi
5	2	2	21	8	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	2	21	9	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
5	2	2	21	10	Belanja Modal Pengadaan Mortuary
5	2	2	21	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5	2	2	21	12	Belanja Modal Pengadaan Poliklinik Set
5	2	2	21	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5	2	2	21	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5	2	2	21	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5	2	2	21	16	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5	2	2	21	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5	2	2	21	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	2	21	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat

Kodifikasi					URAIAN
5	2	2	21	20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5	2	2	21	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5	2	2	21	22	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5	2	2	21	23	Dst.....
5	2	2	22		Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan
5	2	2	22	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5	2	2	22	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	2	22	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	2	22	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	2	22	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5	2	2	22	6	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5	2	2	22	7	Dst.....
5	2	2	23		Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5	2	2	23	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5	2	2	23	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5	2	2	23	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5	2	2	23	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5	2	2	23	5	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5	2	2	23	6	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	2	23	7	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5	2	2	23	8	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5	2	2	23	9	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	2	2	23	10	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5	2	2	23	11	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5	2	2	23	12	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5	2	2	23	13	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5	2	2	23	14	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5	2	2	23	15	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5	2	2	23	16	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5	2	2	23	17	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A

Kodifikasi					URAIAN
5	2	2	23	18	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5	2	2	23	19	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5	2	2	23	20	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5	2	2	23	21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5	2	2	23	22	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5	2	2	23	23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	2	23	24	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5	2	2	23	25	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5	2	2	23	26	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	23	27	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	2	23	28	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	2	2	23	29	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5	2	2	23	30	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5	2	2	23	31	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5	2	2	23	32	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5	2	2	23	33	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	2	23	34	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	2	23	35	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	2	23	36	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5	2	2	23	37	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5	2	2	23	38	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	2	2	23	39	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5	2	2	23	40	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
5	2	2	23	41	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	2	23	42	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5	2	2	23	43	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5	2	2	23	44	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5	2	2	23	45	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	2	23	46	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

Kodifikasi					URAIAN
					Pertanian
5	2	2	23	47	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5	2	2	23	48	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5	2	2	23	49	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	2	23	50	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya
5	2	2	23	51	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	2	2	23	52	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5	2	2	23	53	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	2	23	54	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5	2	2	23	55	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5	2	2	23	56	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5	2	2	23	57	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5	2	2	23	58	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	2	23	59	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5	2	2	23	60	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	2	23	61	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5	2	2	23	62	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5	2	2	23	63	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5	2	2	23	64	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5	2	2	23	65	Dst.....
5	2	2	24		Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5	2	2	24	1	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5	2	2	24	2	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5	2	2	24	3	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5	2	2	24	4	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5	2	2	24	5	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5	2	2	24	6	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5	2	2	24	7	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : IPS
5	2	2	24	8	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5	2	2	24	9	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi :

Kodifikasi					URAIAN
					Ketrampilan
5	2	2	24	10	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5	2	2	24	11	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5	2	2	24	12	Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
5	2	2	24	13	Belanja Modal Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
5	2	2	24	14	Dst.....
5	2	2	25		Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	2	25	1	Belanja Modal Pengadaan Analytical instrument
5	2	2	25	2	Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5	2	2	25	3	Belanja Modal Pengadaan General Laboratory Tool
5	2	2	25	4	Belanja Modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5	2	2	25	5	Belanja Modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5	2	2	25	6	Belanja Modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5	2	2	25	7	Dst.....
5	2	2	26		Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5	2	2	26	1	Belanja Modal Pengadaan Radiation Detector
5	2	2	26	2	Belanja Modal Pengadaan Modular Counting and Scientific
5	2	2	26	3	Belanja Modal Pengadaan Assembly/Accounting System
5	2	2	26	4	Belanja Modal Pengadaan Recorder Display
5	2	2	26	5	Belanja Modal Pengadaan System/Power Supply
5	2	2	26	6	Belanja Modal Pengadaan Measuring / Testing Device
5	2	2	26	7	Belanja Modal Pengadaan Opto Electronics
5	2	2	26	8	Belanja Modal Pengadaan Accelator
5	2	2	26	9	Belanja Modal Pengadaan Reactor Expermental System
5	2	2	26	10	Dst.....
5	2	2	27		Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	2	27	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5	2	2	27	3	Belanja Modal Pengadaan Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	4	Belanja Modal Pengadaan Meteorological Equipment
5	2	2	27	5	Belanja Modal Pengadaan Sumber Radiasi
5	2	2	27	6	Dst.....
5	2	2	28		Belanja Modal Pengadaan Radiation Aplication and

Kodifikasi					URAIAN
					Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5	2	2	28	1	Belanja Modal Pengadaan Radiation Application Equipment
5	2	2	28	2	Belanja Modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5	2	2	28	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5	2	2	28	4	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
5	2	2	28	5	Dst.....
5	2	2	29		Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	29	1	Belanja Modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5	2	2	29	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	2	29	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	2	29	4	Belanja Modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5	2	2	29	5	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5	2	2	29	6	Dst.....
5	2	2	30		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	30	1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
5	2	2	30	2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
5	2	2	30	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System
5	2	2	30	4	Belanja Modal Pengadaan Cavitation Tunnel
5	2	2	30	5	Belanja Modal Pengadaan Overhead Cranes
5	2	2	30	6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan umum
5	2	2	30	7	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5	2	2	30	8	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5	2	2	30	9	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5	2	2	30	10	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5	2	2	30	11	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5	2	2	30	12	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5	2	2	30	13	Belanja Modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5	2	2	30	14	Belanja Modal Pengadaan MOB
5	2	2	30	15	Belanja Modal Pengadaan Photo and Film Equipment

Kodifikasi					URAIAN
5	2	2	30	16	Dst.....
5	2	2	31		Belanja Modal Pengadaan Senjata Api
5	2	2	31	1	Belanja Modal Pengadaan Senjata Genggam
5	2	2	31	2	Belanja Modal Senjata Pinggang
5	2	2	31	3	Belanja Modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5	2	2	31	4	Belanja Modal Senapan Mesin
5	2	2	31	5	Belanja Modal Mortir
5	2	2	31	6	Belanja Modal Anti Lapis Baja
5	2	2	31	7	Belanja Modal Artileri Medan (Armed)
5	2	2	31	8	Belanja Modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
5	2	2	31	9	Belanja Modal Peluru Kendali/Rudal
5	2	2	31	10	Belanja Modal Kavaleri
5	2	2	31	11	Belanja Modal Senjata Lain-lain
5	2	2	32		Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5	2	2	32	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan
5	2	2	32	2	Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Api
5	2	2	33		Belanja Modal Pengadaan Senjata Sinar
5	2	2	33	1	Belanja Modal Pengadaan Laser
5	2	2	33	2	Dst.....
5	2	2	34		Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5	2	2	34	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5	2	2	34	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan
5	2	3			Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	3	1		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	1	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	1	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang
5	2	3	1	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5	2	3	1	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	1	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	1	6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5	2	3	1	7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Observatorium
5	2	3	1	8	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	3	1	9	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kodifikasi					URAIAN
					Pertemuan
5	2	3	1	10	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	3	1	11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5	2	3	1	12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	1	13	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5	2	3	1	14	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	3	1	15	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	3	1	16	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5	2	3	1	17	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5	2	3	1	18	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5	2	3	1	19	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	1	20	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	1	21	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	1	22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	3	1	23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
5	2	3	1	24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5	2	3	1	25	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5	2	3	1	26	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	3	1	27	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	3	1	28	Dst.....
5	2	3	2		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	2	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	2	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	2	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5	2	3	2	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	3	2	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	2	6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	2	7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	2	8	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun

Kodifikasi					URAIAN
5	2	3	2	9	Dst.....
5	2	3	3		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara
5	2	3	3	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5	2	3	3	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	3	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	3	4		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	4	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Istana Peringatan
5	2	3	4	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Adat
5	2	3	4	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah
5	2	3	4	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Makam Sejarah
5	2	3	4	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5	2	3	4	6	Dst.....
5	2	3	5		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5	2	3	5	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	5	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5	2	3	5	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5	2	3	6		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi
5	2	3	6	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi Hindhu
5	2	3	6	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi Budha
5	2	3	6	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Candi Lainnya
5	2	3	7		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya
5	2	3	7	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	7	2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen
5	2	3	8		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5	2	3	8	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5	2	3	9		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	9	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas

Kodifikasi					URAIAN
5	2	3	9	2	Dst.....
5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
5	2	3	10	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	10	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
5	2	3	10	3	Dst.....
5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	3	11	1	Belanja Modal Pengadaan Runway/Threshold Light
5	2	3	11	2	Belanja Modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	3	11	3	Belanja Modal Pengadaan Approach Light
5	2	3	11	4	Belanja Modal Pengadaan Runway Identification Light(Rells)
5	2	3	11	5	Belanja Modal Pengadaan Signal
5	2	3	11	6	Belanja Modal Pengadaan Flood Light
5	2	3	11	7	Dst.....
5	2	4			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	2	4	1		Belanja Modal Pengadaan Jalan
5	2	4	1	1	Belanja Modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5	2	4	1	2	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi
5	2	4	1	3	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5	2	4	1	4	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa
5	2	4	1	5	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus
5	2	4	1	6	Belanja Modal Pengadaan Jalan Tol
5	2	4	1	7	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kereta
5	2	4	1	8	Belanja Modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	1	9	Dst.....
5	2	4	2		Belanja Modal Pengadaan Jembatan
5	2	4	2	1	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5	2	4	2	2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Propinsi
5	2	4	2	3	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5	2	4	2	4	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa
5	2	4	2	5	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Khusus
5	2	4	2	6	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5	2	4	2	7	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api

Kodifikasi					URAIAN
5	2	4	2	8	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	2	9	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5	2	4	2	10	Dst.....
5	2	4	3		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5	2	4	3	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	4	3	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	4	3	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	4	3	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	4	3	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	4	3	6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	4	3	7	Dst.....
5	2	4	4		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5	2	4	4	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	4	4	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	4	4	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	4	4	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5	2	4	4	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	2	4	4	6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	4	4	7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5	2	4	4	8	Dst.....
5	2	4	5		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
5	2	4	5	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5	2	4	5	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5	2	4	5	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5	2	4	5	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5	2	4	5	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5	2	4	5	6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5	2	4	5	7	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

Kodifikasi					URAIAN
5	2	4	5	8	Dst.....
5	2	4	6		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	4	6	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5	2	4	6	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5	2	4	6	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5	2	4	6	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	4	6	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5	2	4	6	6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5	2	4	6	7	Dst.....
5	2	4	7		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	7	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	2	4	7	7	Dst.....
5	2	4	8		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5	2	4	8	1	Belanja Modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	4	8	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5	2	4	8	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5	2	4	8	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	4	8	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	2	4	8	6	Dst.....
5	2	4	9		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5	2	4	9	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor

Kodifikasi					URAIAN
5	2	4	9	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	4	9	3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5	2	4	9	4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5	2	4	9	5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	4	9	6	Dst.....
5	2	4	10		Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air
5	2	4	10	1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Laut
5	2	4	10	2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5	2	4	10	3	Dst.....
5	2	4	11		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5	2	4	11	1	Belanja Modal Pengadaan Air Muka Tanah
5	2	4	11	2	Belanja Modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5	2	4	11	3	Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dalam
5	2	4	11	4	Belanja Modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
5	2	4	11	5	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	4	11	6	Dst.....
5	2	4	12		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	2	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5	2	4	12	3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	4	12	4	Dst.....
5	2	4	13		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	4	13	1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	4	13	2	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	14		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	14	1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	15		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	4	15	1	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air

Kodifikasi					URAIAN
5	2	4	15	2	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5	2	4	15	3	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5	2	4	15	4	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	2	4	15	5	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	4	15	6	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	2	4	15	7	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	4	15	8	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	4	15	9	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
5	2	4	15	10	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	2	4	15	11	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
5	2	4	15	12	Dst.....
5	2	4	16		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	16	1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	4	16	2	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	4	16	3	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	4	16	4	Dst.....
5	2	4	17		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5	2	4	17	1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Radar
5	2	4	17	2	Dst.....
5	2	4	18		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas
5	2	4	18	1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5	2	4	18	2	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	4	18	3	Dst.....
5	2	4	19		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5	2	4	19	1	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	4	19	2	Dst.....
5	2	4	20		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5	2	4	20	1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pembawa

Kodifikasi					URAIAN
5	2	4	20	2	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5	2	4	20	3	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5	2	4	20	4	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5	2	4	20	5	Dst.....
5	2	4	21		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik
5	2	4	21	1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transmisi
5	2	4	21	2	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Distribusi
5	2	4	22		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon
5	2	4	22	1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5	2	4	22	2	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5	2	4	22	3	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5	2	4	23		Belanja Modal Pengadaan Jaringan Gas
5	2	4	23	1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	4	23	2	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5	2	4	23	3	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5	2	4	23	4	Belanja Modal Pengadaan Jaringan BBM
5	2	4	23	5	Dst.....
5	2	5			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	5	1		Belanja Modal Pengadaan Buku
5	2	5	1	1	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5	2	5	1	2	Belanja Modal Pengadaan Buku Filsafat
5	2	5	1	3	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
5	2	5	1	4	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5	2	5	1	5	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5	2	5	1	6	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
5	2	5	1	7	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	5	1	8	Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5	2	5	1	9	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5	2	5	1	10	Dst.....
5	2	5	2		Belanja Modal Pengadaan Terbitan
5	2	5	2	1	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala
5	2	5	2	2	Belanja Modal Pengadaan Buku Laporan

Kodifikasi					URAIAN
5	2	5	2	3	Dst.....
5	2	5	3		Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	5	3	1	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5	2	5	3	2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
5	2	5	3	3	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
5	2	5	3	4	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	5	3	5	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5	2	5	3	6	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
5	2	5	3	7	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara
5	2	5	3	8	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
5	2	5	3	9	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5	2	5	3	10	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
5	2	5	3	11	Dst.....
5	2	5	4		Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	2	5	4	1	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan
5	2	5	4	2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
5	2	5	4	3	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
5	2	5	4	4	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
5	2	5	4	5	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan
5	2	5	4	6	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
5	2	5	4	7	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
5	2	5	4	8	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5	2	5	4	9	Dst.....
5	2	5	5		Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	5	1	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5	2	5	5	2	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5	2	5	5	3	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara

Kodifikasi					URAIAN
5	2	5	5	4	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	5	5	Dst.....
5	2	5	6		Belanja Modal Pengadaan Hewan
5	2	5	6	1	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ternak
5	2	5	6	2	Belanja Modal Pengadaan Binatang Unggas
5	2	5	6	3	Belanja Modal Pengadaan Binatang Melata
5	2	5	6	4	Belanja Modal Pengadaan Binatang Ikan
5	2	5	6	5	Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5	2	5	6	6	Belanja Modal Pengadaan Hewan Pengamanan
5	2	5	6	7	Dst.....
5	2	5	7		Belanja Modal Pengadaan Tanaman
5	2	5	7	1	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5	2	5	7	2	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
5	2	5	7	3	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
5	2	5	7	4	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias
5	2	5	7	5	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5	2	5	7	6	Dst.....
5	2	5	8		Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi
5	3				BELANJA TAK TERDUGA
5	3	1			Belanja Tak Terduga
5	3	1	1		Belanja Tak Terduga
5	3	1	1	1	Belanja Tak Terduga
5	3	1	1	2	Belanja Tak Terduga Bencana Alam
5	3	1	1	3	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya

BAGAN AKUN STANDAR
AKUN TRANSFER

Kodifikasi					URAIAN
6	0	0	00	00	TRANSFER
6	1	0	00	00	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
6	1	1	00	00	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
6	1	1	01	00	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	1	01	01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6	1	1	01	02	Dst.....
6	1	2	00	00	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6	1	2	01	00	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
6	1	2	01	01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
6	1	2	01	02	Dst.....
6	2	0	00	00	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6	2	1	00	00	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	1	01	00	Bantuan Keuangan ke Propinsi
6	2	1	01	01	Bantuan Keuangan ke Propinsi
6	2	1	01	02	Dst.....
6	2	1	02	00	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	02	01	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6	2	1	02	02	Dst.....
6	2	2	00	00	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	00	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6	2	2	01	02	Dst.....
6	2	3	00	00	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6	2	3	01	00	Bantuan Keuangan kepada Partai politik
6	2	3	01	01	Bantuan Keuangan kepada Partai politik

BAGAN AKUN STANDAR

AKUN PEMBIAYAAN

Kodifikasi					URAIAN
7	0	0	00	00	PEMBIAYAAN
7	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN
7	1	1			Penggunaan SiLPA
7	1	1	1		Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7	1	1	1	1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7	1	1	2		Koreksi SiLPA
7	1	1	2	1	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7	1	1	2	2	Lain-lain
7	1	2			Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	1		Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	1	1	Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	1	2	Dst.....
7	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	1		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7	1	3	1	1	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
7	1	3	1	2	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD
7	1	3	1	3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
7	1	4			Pinjaman Dalam Negeri
7	1	4	1		Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	1	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	2		Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	2	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	3		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	3	1	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	4		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat

Kodifikasi					URAIAN
7	1	4	4	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	5		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	5	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	6		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	4	6	1	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	5			Penerimaan Kembali Piutang
7	1	5	1		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	1	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	2		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	2	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	3		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	3	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	4		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	4	1	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	5		Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	5	5	1	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	6			Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	1		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	1	1	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	2		Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	2	1	Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	3		Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	3	1	Pencairan Deposito Jangka Panjang

Kodifikasi					URAIAN
7	1	6	4		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	4	1	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	7			Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	1		Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	1	1	Pinjaman Luar Negeri
7	1	8			Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	1		Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	1	1	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	1		Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	1	1	Pembentukan Dana Cadangan
7	2	2			Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
7	2	2	1		Penyertaan Modal pada BUMN
7	2	2	1	1	Penyertaan Modal pada BUMN
7	2	2	2	0	Penyertaan Modal pada BUMD
7	2	2	2	1	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening
7	2	2	2	2	PD. Kebersihan
7	2	2	2	3	PT. Bank Jabar
7	2	2	2	4	PD. BPR
7	2	2	2	5	PD. Pasar Bermartabat
7	2	2	2	6	Koperasi Pegawai Kota Bandung
7	2	2	3		Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	2	3	1	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	3			Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7	2	3	1		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	1	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	2		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	2	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	3		Pelunasan Obligasi Daerah

Kodifikasi					URAIAN
7	2	3	3	1	Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	4		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	4	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	5		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	5	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	6		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	3	6	1	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah
7	2	4	1		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	1	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	2		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	2	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	3		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	3	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	4		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	4	4	1	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	5			Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	5	1		Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	1	1	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	2		Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	2	1	Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	3		Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	3	1	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	4		Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya

Kodifikasi					URAIAN
7	2	5	4	1	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	6			Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	1		Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	1	1	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	7			Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	1		Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	1	1	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	3				SALDO ANGGARAN LEBIH
7	3	1			Surplus/Defisit LRA
7	3	1	1		Surplus/Defisit LRA
7	3	1	1	1	Surplus/Defisit LRA
7	3	2			Pembiayaan Netto
7	3	2	1		Pembiayaan Netto
7	3	2	1	1	Pembiayaan Netto
7	3	3			SiLPA/SiKPA
7	3	3	1		SiLPA/SiKPA
7	3	3	1	1	SiLPA/SiKPA
7	3	4			Perubahan SAL
7	3	4	1		Perubahan SAL
7	3	4	1	1	Perubahan SAL

BAGAN AKUN STANDAR
AKUN PENDAPATAN LO

Kodifikasi					URAIAN
8	0	0	00	00	PENDAPATAN LO
8	1	0	00	00	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO
8	1	1	00	00	Pendapatan Pajak Daerah - LO
8	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO*
8	1	1	01	01	PKB-Mobil Penumpang- Sedan- LO*
8	1	1	01	02	PKB-Mobil Penumpang- Jeep- LO*
8	1	1	01	03	PKB-Mobil Penumpang- Minibus- LO*
8	1	1	01	04	PKB -Mobil Bus - Microbus- LO*
8	1	1	01	05	PKB -Mobil Bus - Bus- LO*
8	1	1	01	06	PKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up – LO*
8	1	1	01	07	PKB -Mobil Barang/Beban-Light Truck - LO*
8	1	1	01	08	PKB -Mobil Barang/Beban-Truck - LO*
8	1	1	01	09	PKB -Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda 2 - LO*
8	1	1	01	10	PKB -Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda 3 – LO*
8	1	1	01	11	PKB -Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air – LO*
8	1	1	01	12	Dst.....
8	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO*
8	1	1	02	01	BBNKB - Mobil Penumpang - Sedan – LO*
8	1	1	02	02	BBNKB - Mobil Penumpang - Jeep – LO*
8	1	1	02	03	BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus – LO*
8	1	1	02	04	BBNKB - Mobil Bus - Microbus – LO*
8	1	1	02	05	BBNKB - Mobil Bus - Bus – LO*
8	1	1	02	06	BBNKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up – LO*
8	1	1	02	07	BBNKB - Mobil Barang /Beban - Light Truck – LO*
8	1	1	02	08	BBNKB - Mobil Barang /Beban - Truck – LO*
8	1	1	02	09	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 –LO*
8	1	1	02	10	BBNKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 –LO*
8	1	1	02	11	BBNKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air – LO*
8	1	1	02	12	Dst.....
8	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO*
8	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium – LO*
8	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina – LO*
8	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus – LO*

Kodifikasi					URAIAN
8	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar – LO*
8	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas – LO*
8	1	1	03	06	Dst.....
8	1	1	04		Pajak Air Permukaan – LO*
8	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan – LO*
8	1	1	05		Pajak Rokok - LO *
8	1	1	05	01	Pajak Rokok - LO *
8	1	1	06	00	Pajak Hotel - LO
8	1	1	06	01	Hotel Bintang Lima Berlian - LO
8	1	1	06	02	Hotel Bintang Lima - LO
8	1	1	06	03	Hotel Bintang Empat - LO
8	1	1	06	04	Hotel Bintang Tiga - LO
8	1	1	06	05	Hotel Bintang Dua - LO
8	1	1	06	06	Hotel Bintang Satu - LO
8	1	1	06	07	Hotel Melati Tiga - LO
8	1	1	06	08	Hotel Melati Dua - LO
8	1	1	06	09	Hotel Melati Satu - LO
8	1	1	06	10	Motel - LO
8	1	1	06	11	Cottage - LO
8	1	1	06	12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos - LO
8	1	1	06	13	Wisma Pariwisata - LO
8	1	1	06	14	Gubuk Pariwisata - LO
8	1	1	06	15	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) - LO
8	1	1	06	16	Dst.....
8	1	1	07	00	Pajak Restoran dan Rumah Makan - LO
8	1	1	07	01	Restoran - LO
8	1	1	07	02	Rumah Makan - LO
8	1	1	07	03	Kafetaria - LO
8	1	1	07	04	Kantin - LO
8	1	1	07	05	Katering - LO
8	1	1	07	06	Warung - LO
8	1	1	07	07	Bar - LO
8	1	1	07	08	Jasa Boga - LO
8	1	1	07	09	Dst.....
8	1	1	08	00	Pajak Hiburan - LO
8	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LO
8	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8	1	1	08	03	Kontes Kecantikan - LO

Kodifikasi				URAIAN	
8	1	1	08	04	Kontes Binaraga - LO
8	1	1	08	05	Pameran - LO
8	1	1	08	06	Diskotik - LO
8	1	1	08	07	Karaoke - LO
8	1	1	08	08	Klub Malam - LO
8	1	1	08	09	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8	1	1	08	10	Permainan Bilyar - LO
8	1	1	08	11	Permainan Golf - LO
8	1	1	08	12	Permainan Bowling - LO
8	1	1	08	13	Pacuan Kuda - LO
8	1	1	08	14	Balap Kendaraan Bermotor - LO
8	1	1	08	15	Permainan Ketangkasan - LO
8	1	1	08	16	Panti Pijat/Refleksi - LO
8	1	1	08	17	Mandi Uap/Spa - LO
8	1	1	08	18	Pusat Kebugaran - LO
8	1	1	08	19	Pertandingan Olah Raga - LO
8	1	1	08	20	Tempat Rekreasi - LO
8	1	1	08	21	Kolam Renang - LO
8	1	1	08	22	Gedung Kesenian - LO
8	1	1	08	23	Dst.....
8	1	1	09	00	Pajak Reklame - LO
8	1	1	09	01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron - LO
8	1	1	09	02	Reklame Kain - LO
8	1	1	09	03	Reklame Melekat/Stiker - LO
8	1	1	09	04	Reklame Selebaran - LO
8	1	1	09	05	Reklame Berjalan - LO
8	1	1	09	06	Reklame Udara - LO
8	1	1	09	07	Reklame Apung - LO
8	1	1	09	08	Reklame Suara - LO
8	1	1	09	09	Reklame Film/Slide - LO
8	1	1	09	10	Reklame Peragaan - LO
8	1	1	09	11	Reklame Bando Jalan (JPO) - LO
8	1	1	09	12	Reklame Template - LO
8	1	1	09	13	Reklame Iklan - LO
8	1	1	09	14	Dst.....
8	1	1	10	00	Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO
8	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO
8	1	1	11	00	Pajak Parkir - LO
8	1	1	11	01	Pajak Parkir - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	1	12	00	Pajak Air Bawah Tanah - LO
8	1	1	12	01	Pajak Air Bawah Tanah - LO
8	1	1	13	00	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	14	00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	1	14	01	Asbes - LO
8	1	1	14	02	Batu Tulis - LO
8	1	1	14	03	Batu Setengah Permata - LO
8	1	1	14	04	Batu Kapur - LO
8	1	1	14	05	Batu Apung - LO
8	1	1	14	06	Batu Permata - LO
8	1	1	14	07	Bentonit - LO
8	1	1	14	08	Dolomit - LO
8	1	1	14	09	Feldspar - LO
8	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LO
8	1	1	14	11	Grafit - LO
8	1	1	14	12	Granit/Andesit - LO
8	1	1	14	13	Gips - LO
8	1	1	14	14	Kalsit - LO
8	1	1	14	15	Kaolin - LO
8	1	1	14	16	Leusit - LO
8	1	1	14	17	Magnesit - LO
8	1	1	14	18	Mika - LO
8	1	1	14	19	Marmar - LO
8	1	1	14	20	Nitrat - LO
8	1	1	14	21	Opsidien - LO
8	1	1	14	22	Oker - LO
8	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LO
8	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LO
8	1	1	14	25	Perlit - LO
8	1	1	14	26	Phospat - LO
8	1	1	14	27	Talk - LO
8	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8	1	1	14	29	Tanah Diatome - LO
8	1	1	14	30	Tanah Liat - LO
8	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LO
8	1	1	14	32	Tras - LO
8	1	1	14	33	Yarosif - LO
8	1	1	14	34	Zeolit - LO
8	1	1	14	35	Basal - LO
8	1	1	14	36	Trakit - LO
8	1	1	14	37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	1	15	00	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	15	01	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	16	00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LO
8	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8	1	2	00	00	Pendapatan Retribusi Daerah - LO
8	1	2	01	00	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LO
8	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LO
8	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LO
8	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8	1	2	02	00	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO
8	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuangan Akhir Sampah - LO
8	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8	1	2	03	00	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LO
8	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LO
8	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LO
8	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LO
8	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	04	00	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO
8	1	2	05	00	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	2	06	00	Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	2	06	01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran - LO
8	1	2	06	02	Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO
8	1	2	06	03	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO
8	1	2	07	00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	2	07	11	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	2	07	12	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	2	07	13	Dst.....
8	1	2	08	00	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8	1	2	09	00	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LO
8	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LO
8	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LO
8	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8	1	2	10	00	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	11	00	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	2	11	01	Rumah Tangga - LO
8	1	2	11	02	Perkantoran - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	2	11	03	Industri - LO
8	1	2	12	00	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LO
8	1	2	12	02	Pengujian dalam Keadaan Terbungkus - LO
8	1	2	13	00	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LO
8	1	2	14	00	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	2	14	01	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LO
8	1	2	15	00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8	1	2	15	02	Laboratorium - LO
8	1	2	15	03	Ruangan -LO
8	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	16	00	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
8	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO
8	1	2	17	00	Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LO
8	1	2	17	02	pelelangan Ternak - LO
8	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang Disediakan di Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	18	00	Retribusi Terminal - LO
8	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO
8	1	2	19	00	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	2	20	00	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
8	1	2	21	00	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO
8	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO
8	1	2	22	00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO
8	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8	1	2	23	00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8	1	2	23	03	Pelayanan Tempat Olahraga - LO
8	1	2	24	00	Retribusi Penyebrangan Air - LO
8	1	2	24	01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8	1	2	24	02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8	1	2	25	00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha - LO
8	1	2	26	00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	26	01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LO
8	1	2	27	00	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	27	01	Pemberian Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	28	00	Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8	1	2	29	00	Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8	1	2	30	00	Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO
8	1	2	31	00	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	2	31	01	Penggunaan Ruas Jalan Tertentu - LO
8	1	2	31	02	Penggunaan Koridor Tertentu -LO
8	1	2	31	03	Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan Bermotor Perseorangan dan Barang - LO
8	1	2	32	00	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
8	1	3	00	00	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
8	1	3	01	00	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
8	1	3	01	01	Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening - LO
8	1	3	01	02	PD. Kebersihan - LO
8	1	3	01	03	PT. Bank Jabar - LO
8	1	3	01	04	PD. BPR - LO
8	1	3	01	05	PD. Pasar Bermartabat - LO
8	1	3	01	06	Koperasi Pegawai Kota Bandung - LO
8	1	3	01	07	Dst.....
8	1	3	02	00	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO
8	1	3	02	01	BUMN - LO
8	1	3	03	00	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8	1	3	03	01	Perusahaan patungan - LO
8	1	3	03	02	Dst..... - LO
8	1	4	00	00	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO
8	1	4	01	00	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO
8	1	4	01	01	Pelepasan Hak Atas Tanah - LO
8	1	4	01	02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai - LO
8	1	4	01	03	Penjualan Mesin/Alat-Alat Berat Tidak Terpakai - LO
8	1	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas - LO
8	1	4	01	05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua - LO
8	1	4	01	06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	4	01	07	Penjualan Drum Bekas - LO
8	1	4	01	08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon - LO
8	1	4	01	09	Penjualan Lampu Hias Bekas - LO
8	1	4	01	10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan - LO
8	1	4	01	11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas - LO
8	1	4	01	12	Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi - LO
8	1	4	01	13	Penjualan Hasil Pertanian - LO
8	1	4	01	14	Penjualan Hasil Kehutanan - LO
8	1	4	01	15	Penjualan Hasil Perkebunan - LO
8	1	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan - LO
8	1	4	01	17	Penjualan Hasil Perikanan - LO
8	1	4	01	18	Penjualan Hasil Sitaan - LO
8	1	4	02	00	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	03	00	Penerimaan Jasa Giro - LO
8	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8	1	4	03	02	Jasa Giro Pemegang Kas - LO
8	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8	1	4	04	00	Pendapatan Bunga Deposito - LO
8	1	4	04	01	Rekening Deposito pada Bank - LO
8	1	4	05	00	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8	1	4	05	01	Kerugian Uang Daerah - LO
8	1	4	05	02	Kerugian Barang Daerah - LO
8	1	4	06	00	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari - LO
8	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8	1	4	06	04	Dst.....
8	1	4	07	00	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO
8	1	4	07	02	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO
8	1	4	07	03	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO
8	1	4	07	04	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	4	07	05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LO
8	1	4	07	06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan - LO
8	1	4	07	07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO
8	1	4	07	08	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup - LO
8	1	4	07	09	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pertanahan - LO
8	1	4	07	10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil - LO
8	1	4	07	11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - LO
8	1	4	07	12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera - LO
8	1	4	07	13	Dst.....
8	1	4	08	00	Pendapatan Denda Pajak - LO
8	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8	1	4	09	00	Pendapatan Denda Retribusi - LO
8	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	4	10	00	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	11	00	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO
8	1	4	11	02	Dst
8	1	4	12	00	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LO
8	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8	1	4	12	03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas KTP Musiman - LO
8	1	4	12	04	Dst
8	1	4	13	00	Pendapatan dari Pengembalian - LO
8	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8	1	4	13	02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8	1	4	13	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8	1	4	13	04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8	1	4	13	05	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka - LO
8	1	4	13	06	Pendapatan dari Pengembalian SP2D - LO
8	1	4	13	07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Pensiunan - LO
8	1	4	13	08	Dst
8	1	4	14	00	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8	1	4	14	01	Fasilitas Sosial - LO
8	1	4	14	02	Fasilitas Umum - LO
8	1	4	14	03	Fasilitas Gelanggang Generasi Muda (GGM) - LO
8	1	4	14	04	Fasilitas Umum Gedung Olah Raga (GOR) - LO
8	1	4	14	05	Dst
8	1	4	15	00	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8	1	4	15	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	4	15	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8	1	4	15	03	Dst
8	1	4	16	00	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8	1	4	16	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8	1	4	16	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	16	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8	1	4	17	00	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8	1	4	17	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Golongan III - LO
8	1	4	17	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8	1	4	17	03	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah - LO
8	1	4	17	04	Dst
8	1	4	18	00	Pendapatan dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	19	00	Pendapatan Zakat - LO
8	1	4	19	01	Pendapatan Zakat - LO
8	1	4	19	02	Dst
8	1	4	20	00	Pendapatan BLUD - LO
8	1	4	20	01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8	1	4	20	02	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak - LO
8	1	4	20	03	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut - LO
8	1	4	20	04	Dst
8	1	4	21	00	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO
8	1	4	21	01	Hasil Pengelolaan Dana bergulir dari Kelompok Masyarakat - LO
8	1	4	22	00	Penerimaan Setoran dari Lembaga Lain - LO
8	1	4	22	01	Penerimaan Setoran dari PT. TASPEN - LO
8	1	4	22	02	Penerimaan Setoran dari PT. PLN - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	1	4	23	00	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	23	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	2	0	00	00	PENDAPATAN TRANSFER - LO
8	2	1	00	00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
8	2	1	01	00	Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO
8	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO
8	2	1	01	04	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
8	2	1	01	06	Dst
8	2	1	02	00	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
8	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8	2	1	02	11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO
8	2	1	03	00	Dana Alokasi Umum - LO
8	2	1	03	00	Dana Alokasi Umum - LO
8	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LO
8	2	1	03	02	Dana Alokasi Umum untuk Tunjangan Kependidikan - LO
8	2	1	04	00	Dana Alokasi Khusus - LO
8	2	1	04	00	Dana Alokasi Khusus - LO
8	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO
8	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LO
8	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LO
8	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LO
8	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LO
8	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LO
8	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8	2	1	04	20	Dst
8	2	2	00	00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
8	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	01	02	Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	01	03	Dana Tambahan Infrastruktur - LO
8	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LO
8	2	2	02	02	Dana Keistimewaan - LO
8	2	2	03	01	Dana Penyesuaian - LO
8	2	2	03	02	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8	2	2	03	03	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8	2	2	03	04	Dana Insentif Daerah - LO
8	2	2	03	05	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8	2	2	03	06	Bantuan Operasional Sekolah - LO
8	2	2	03	07	Dst
8	2	3	00	00	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya - LO
8	2	3	01	00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	3	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8	2	3	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan di Atas Air - LO
8	2	3	01	03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kodifikasi					URAIAN
					- LO
8	2	3	01	04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air - LO
8	2	3	01	05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	2	3	01	06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah - LO
8	2	3	01	07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan - LO
8	2	3	01	08	Bagi Hasil dari Kemetrolagian - LO
8	2	3	01	09	Bagi hasil dari pajak hasil hutan - LO
8	2	3	01	10	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO
8	2	3	01	11	Dst
8	2	3	02	00	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8	2	3	02	01	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO
8	2	3	02	02	Dst
8	2	3	03	00	Pendapatan Otonomi Khusus - LO
8	2	3	03	01	Pendapatan Otonomi Khusus - LO
8	2	4	00	00	Bantuan Keuangan - LO
8	2	4	01	00	Bantuan Keuangan dari Provinsi - LO
8	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat - LO
8	2	4	01	02	Dst
8	2	4	02	00	Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LO
8	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Kabupaten - LO
8	2	4	02	02	Dst
8	2	4	03	00	Bantuan Keuangan dari Kota - LO
8	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Kota - LO
8	2	4	03	02	Dst
8	3	0	00	00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
8	3	1	00	00	Pendapatan Hibah - LO
8	3	1	01	00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	01	01	Pemerintah - LO
8	3	1	02	00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	02	01	Pemerintah Daerah - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	3	1	03	00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO
8	3	1	03	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta - LO
8	3	1	03	02	Dst
8	3	1	04	00	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO
8	3	1	04	01	Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO
8	3	1	05	00	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri - LO
8	3	1	05	01	Pendapatan Hibah dari Bilateral - LO
8	3	1	05	02	Pendapatan Hibah dari Multilateral - LO
8	3	1	05	03	Pendapatan Hibah dari Donor Lainnya - LO
8	3	2	00	00	Dana Darurat - LO
8	3	2	01	00	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8	3	2	01	02	Dst
8	3	3	01	00	Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01	01	Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01	01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LO
8	3	3	01	02	Dst
8	4				SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
8	4	1			Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8	4	1	1		Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8	4	1	1	1	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8	4	1	1	2	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8	4	1	1	3	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8	4	1	1	4	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8	4	1	1	5	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8	4	1	1	6	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8	4	1	1	7	Dst
8	4	2			Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8	4	2	1		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8	4	2	1	1	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO

Kodifikasi					URAIAN
8	4	2	1	2	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8	4	2	1	3	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8	4	2	1	4	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8	4	2	1	5	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8	4	2	1	6	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8	4	2	1	7	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8	4	2	1	8	Dst
8	4	3			Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	1		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	1	1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	1	2	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
8	4	3	1	3	Dst
8	5				PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8	5	1			Pendapatan Luar Biasa - LO
8	5	1	1		Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8	5	1	1	1	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

*) = akun yang belum/tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung

BAGAN AKUN STANDAR

AKUN BEBAN

Kodifikasi					URAIAN
9	0	0	00	00	BEBAN DAERAH
9	1				Beban Operasional
9	1	1			Beban Pegawai
9	1	1	1		Beban Gaji dan Tunjangan
9	1	1	1	1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
9	1	1	1	2	Tunjangan Keluarga
9	1	1	1	3	Tunjangan Jabatan
9	1	1	1	4	Tunjangan Fungsional
9	1	1	1	5	Tunjangan Fungsional Umum
9	1	1	1	6	Tunjangan Beras
9	1	1	1	7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
9	1	1	1	8	Pembulatan Gaji
9	1	1	1	9	Iuran Jaminan Kesehatan
9	1	1	1	10	Uang Paket
9	1	1	1	11	Tunjangan Badan Musyawarah
9	1	1	1	12	Tunjangan Komisi
9	1	1	1	13	Tunjangan Badan Anggaran
9	1	1	1	14	Tunjangan Badan Kehormatan
9	1	1	1	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
9	1	1	1	16	Tunjangan Perumahan
9	1	1	1	17	Uang Duka Wafat/Tewas
9	1	1	1	18	Uang Jasa Pengabdian
9	1	1	1	19	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
9	1	1	1	20	Tunjangan Kesehatan DPRD
9	1	1	1	21	Dst.....
9	1	1	2		Beban Tambahan Penghasilan PNS
9	1	1	2	1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
9	1	1	2	2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
9	1	1	2	3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
9	1	1	2	4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
9	1	1	2	5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
9	1	1	2	6	Dst.....

Kodifikasi				URAIAN	
9	1	1	3		Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
9	1	1	3	1	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
9	1	1	3	2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH
9	1	1	3	3	Dst.....
9	1	1	4		Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
9	1	1	4	1	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
9	1	1	4	2	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
9	1	1	4	3	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
9	1	1	4	4	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
9	1	1	4	5	Biaya Pemungutan PBB
9	1	1	5		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9	1	1	5	1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
9	1	1	5	2	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
9	1	1	5	3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
9	1	1	5	4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
9	1	1	5	5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
9	1	1	5	6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
9	1	1	5	7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
9	1	1	5	8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
9	1	1	5	9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
9	1	1	5	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
9	1	1	5	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
9	1	1	5	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
9	1	1	5	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
9	1	1	5	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
9	1	1	5	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
9	1	1	5	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
9	1	1	5	17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Kodifikasi					URAIAN
9	1	1	6		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9	1	1	6	1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
9	1	1	6	2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
9	1	1	6	3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
9	1	1	6	4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
9	1	1	6	5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
9	1	1	6	6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
9	1	1	6	7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
9	1	1	6	8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
9	1	1	6	9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
9	1	1	6	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
9	1	1	6	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA
9	1	1	6	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
9	1	1	6	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA
9	1	1	6	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
9	1	1	6	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
9	1	1	6	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
9	1	1	6	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA
9	1	1	6	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA
9	1	1	6	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA
9	1	1	6	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
9	1	1	6	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
9	1	1	6	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA
9	1	1	6	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
9	1	1	6	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LRA
9	1	1	6	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA

Kodifikasi					URAIAN
9	1	1	6	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
9	1	1	6	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
9	1	1	6	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA
9	1	1	6	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
9	1	1	6	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA
9	1	1	6	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA
9	1	1	6	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
9	1	1	7		Uang Lembur
9	1	1	7	1	Uang Lembur PNS
9	1	1	7	2	Uang Lembur Non PNS
9	1	2			Beban Barang dan Jasa
9	1	2	1		Beban Bahan Pakai Habis
9	1	2	1	1	Beban Alat Tulis Kantor
9	1	2	1	2	Beban Dokumen/Administrasi Tender
9	1	2	1	3	Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
9	1	2	1	4	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
9	1	2	1	5	Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9	1	2	1	6	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas
9	1	2	1	7	Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9	1	2	1	8	Beban Pengisian Tabung Gas
9	1	2	1	9	Dst.....
9	1	2	2		Beban Bahan/Material
9	1	2	2	1	Beban Bahan Baku Bangunan
9	1	2	2	2	Beban Bahan/Bibit Tanaman
9	1	2	2	3	Beban Bibit Ternak
9	1	2	2	4	Beban Bahan obat-obatan
9	1	2	2	5	Beban Bahan Kimia
9	1	2	2	6	Beban Persediaan Makanan Pokok
9	1	2	2	7	Dst.....
9	1	2	3		Beban Jasa Kantor
9	1	2	3	1	Beban Telepon
9	1	2	3	2	Beban Air
9	1	2	3	3	Beban Listrik

Kodifikasi					URAIAN
9	1	2	3	4	Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
9	1	2	3	5	Beban Surat Kabar/Majalah
9	1	2	3	6	Beban Kawat/Faksimili/Internet
9	1	2	3	7	Beban Paket/Pengiriman
9	1	2	3	8	Beban Sertifikasi
9	1	2	3	9	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9	1	2	3	10	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9	1	2	3	11	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9	1	2	3	12	Dst.....
9	1	2	4		Beban Premi Asuransi
9	1	2	4	1	Beban Premi Asuransi Kesehatan
9	1	2	4	2	Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9	1	2	4	3	Dst.....
9	1	2	5		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9	1	2	5	1	Beban Jasa Service
9	1	2	5	2	Beban Penggantian Suku Cadang
9	1	2	5	3	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9	1	2	5	4	Beban Jasa KIR
9	1	2	5	5	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9	1	2	5	6	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9	1	2	5	7	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9	1	2	5	8	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
9	1	2	6		Beban Cetak dan Penggandaan
9	1	2	6	1	Beban Cetak
9	1	2	6	2	Beban Penggandaan
9	1	2	7		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9	1	2	7	1	Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
9	1	2	7	2	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9	1	2	7	3	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
9	1	2	7	4	Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
9	1	2	7	5	Dst.....
9	1	2	8		Beban Sewa Sarana Mobilitas
9	1	2	8	1	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9	1	2	8	2	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9	1	2	8	3	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9	1	2	8	4	Dst ...

Kodifikasi					URAIAN
9	1	2	9		Beban Sewa Alat Berat
9	1	2	9	1	Beban Sewa Eskavator
9	1	2	9	2	Beban Sewa Buldoser
9	1	2	9	3	Dst ...
9	1	2	10		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9	1	2	10	1	Beban Sewa Meja Kursi
9	1	2	10	2	Beban Sewa Komputer dan Printer
9	1	2	10	3	Beban Sewa Proyektor
9	1	2	10	4	Beban Sewa Generator
9	1	2	10	5	Beban Sewa Tenda
9	1	2	10	6	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
9	1	2	10	7	Dst.....
9	1	2	11		Beban Makanan dan Minuman
9	1	2	11	1	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
9	1	2	11	2	Beban Makanan dan Minuman Rapat
9	1	2	11	3	Beban Makanan dan Minuman Tamu
9	1	2	11	4	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan
9	1	2	11	5	Dst.....
9	1	2	12		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9	1	2	12	1	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9	1	2	12	2	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9	1	2	12	3	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
9	1	2	12	4	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9	1	2	12	5	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9	1	2	12	6	Dst.....
9	1	2	13		Beban Pakaian Kerja
9	1	2	13	1	Beban Pakaian Kerja Lapangan
9	1	2	13	2	Dst.....
9	1	2	14		Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
9	1	2	14	1	Beban Pakaian KORPRI
9	1	2	14	2	Beban Pakaian adat daerah
9	1	2	14	3	Beban Pakaian Batik Tradisional
9	1	2	14	4	Beban Pakaian Olahraga
9	1	2	14	5	Dst.....
9	1	2	15		Beban Perjalanan Dinas
9	1	2	15	1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9	1	2	15	2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
9	1	2	15	3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri

Kodifikasi					URAIAN
9	1	2	16		Beban Perjalanan Pindah Tugas
9	1	2	16	1	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
9	1	2	16	2	Beban Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
9	1	2	17		Beban Pemulangan Pegawai
9	1	2	17	1	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah
9	1	2	17	2	Beban Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
9	1	2	17	3	Beban Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
9	1	2	18		Beban Pemeliharaan
9	1	2	18	1	Beban Pemeliharaan Tanah
9	1	2	18	2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9	1	2	18	3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9	1	2	18	4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	2	18	5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9	1	2	18	6	Dst.....
9	1	2	19		Beban Jasa Konsultansi
9	1	2	19	1	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9	1	2	19	2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9	1	2	19	3	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9	1	2	19	4	Dst.....
9	1	2	20		Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	20	1	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9	1	2	20	2	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	21		Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	21	1	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9	1	2	21	2	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	22		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9	1	2	22	1	Beban Beasiswa Tugas Belajar D3
9	1	2	22	2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
9	1	2	22	3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
9	1	2	22	4	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
9	1	2	22	5	Dst
9	1	2	23		Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan

Kodifikasi					URAIAN
					Teknis PNS
9	1	2	23	1	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
9	1	2	23	2	Beban Sosialisasi
9	1	2	23	3	Beban Bimbingan Teknis
9	1	2	23	4	Dst.....
9	1	2	24		Beban Honorarium Non Pegawai
9	1	2	24	1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9	1	2	24	2	Moderator
9	1	2	24	3	Dst.....
9	1	2	25		Honorarium PNS
9	1	2	25	1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9	1	2	25	2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9	1	2	25	3	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	25	4	Honorarium PNS Lainnya
9	1	2	25	5	Dst.....
9	1	2	26		Honorarium Non PNS
9	1	2	26	1	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	26	2	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap
9	1	2	26	3	Dst.....
9	1	2	27		Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9	1	2	27	1	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga
9	1	2	27	2	Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
9	1	2	27	3	Dst.....
9	1	3			Beban Bunga
9	1	3	1		Bunga Utang Pinjaman
9	1	3	1	1	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9	1	3	1	2	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	3	1	3	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9	1	3	1	4	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9	1	3	1	5	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD
9	1	3	1	6	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN
9	1	3	1	7	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9	1	3	2		Bunga Utang Obligasi
9	1	3	2	1	Bunga Utang Obligasi

Kodifikasi					URAIAN
9	1	4			Beban Subsidi
9	1	4	1		Beban Subsidi
9	1	4	1	1	Beban Subsidi kepada BUMN
9	1	4	1	2	Beban Subsidi kepada BUMD
9	1	4	1	3	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
9	1	5			Beban Hibah
9	1	5	1		Beban Hibah kepada Pemerintah
9	1	5	1	1	Beban Hibah kepada Pemerintah
9	1	5	2		Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	5	2	1	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9	1	5	2	2	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9	1	5	2	3	Hibah kepada Pemerintah Kota
9	1	5	3		Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	3	1	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	3	2	Dst.....
9	1	5	4		Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9	1	5	4	1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9	1	5	4	2	Dst.....
9	1	5	5		Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	5	1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	5	2	Dst ...
9	1	5	6		Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
9	1	5	6	1	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota....
9	1	5	6	2	Dst.....
9	1	6			Beban Bantuan Sosial
9	1	6	1		Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9	1	6	1	1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9	1	6	1	2	Dst.....
9	1	6	2		Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9	1	6	2	1	Beban Bantuan Sosial kepada
9	1	6	2	2	Dst.....

Kodifikasi					URAIAN
9	1	7			Beban Penyusutan dan Amortisasi
9	1	7	1		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9	1	7	1	1	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9	1	7	1	2	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9	1	7	1	3	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9	1	7	1	4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9	1	7	1	5	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
9	1	7	1	6	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9	1	7	1	7	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9	1	7	1	8	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9	1	7	1	9	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9	1	7	1	10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9	1	7	1	11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9	1	7	1	12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
9	1	7	1	13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
9	1	7	1	14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9	1	7	1	15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9	1	7	1	16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9	1	7	1	17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9	1	7	1	18	Beban Penyusutan Alat Studio
9	1	7	1	19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9	1	7	1	20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9	1	7	1	21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9	1	7	1	22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9	1	7	1	23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9	1	7	1	24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9	1	7	1	25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9	1	7	1	26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9	1	7	1	27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9	1	7	1	28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9	1	7	1	29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9	1	7	1	30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9	1	7	1	31	Beban Penyusutan Senjata Api
9	1	7	1	32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api

Kodifikasi					URAIAN
9	1	7	1	33	Beban Penyusutan Senjata Sinar
9	1	7	1	34	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9	1	7	2		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9	1	7	2	1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9	1	7	2	2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9	1	7	2	3	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9	1	7	2	4	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9	1	7	2	5	Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9	1	7	2	6	Beban Penyusutan Candi
9	1	7	2	7	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
9	1	7	2	8	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain
9	1	7	2	9	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9	1	7	2	10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9	1	7	2	11	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
9	1	7	3		Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	7	3	1	Beban Penyusutan Jalan
9	1	7	3	2	Beban Penyusutan Jembatan
9	1	7	3	3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9	1	7	3	4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9	1	7	3	5	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9	1	7	3	6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9	1	7	3	7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9	1	7	3	8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9	1	7	3	9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9	1	7	3	10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9	1	7	3	11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9	1	7	3	12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9	1	7	3	13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9	1	7	3	14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9	1	7	3	15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9	1	7	3	16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9	1	7	3	17	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
9	1	7	3	18	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9	1	7	3	19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9	1	7	3	20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9	1	7	3	21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9	1	7	3	22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon

Kodifikasi					URAIAN
9	1	7	3	23	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9	1	7	4		Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
9	1	7	4	1	Beban Penyusutan Buku
9	1	7	4	2	Beban Penyusutan Terbitan
9	1	7	4	3	Beban Penyusutan Barang-Barang Perpustakaan
9	1	7	4	4	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan
9	1	7	4	5	Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya
9	1	7	4	6	Beban Penyusutan Aset Tetap - Renovasi
9	1	7	5		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9	1	7	5	1	Beban Amortisasi Goodwill
9	1	7	5	2	Beban Amortisasi Lisensi dan Frenchise
9	1	7	5	3	Beban Amortisasi Hak Cipta
9	1	7	5	4	Beban Amortisasi Paten
9	1	7	5	5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
9	1	8			Beban Penyisihan Piutang
9	1	8	1		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9	1	8	1	1	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9	1	8	1	2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9	1	8	1	3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9	1	8	1	4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9	1	8	1	5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9	1	8	1	6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9	1	8	1	7	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya
9	1	8	1	8	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9	1	8	1	9	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9	1	8	1	10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9	1	8	1	11	Dst.....
9	1	8	2		Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9	1	8	2	1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9	1	8	2	2	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9	1	8	2	3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9	1	8	2	4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Kodifikasi					URAIAN
9	1	8	2	5	Beban Penyisihan Uang Muka
9	1	8	2	6	Dst.....
9	1	9			Beban Lain-lain
9	1	9	1		Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	1	1	Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	2		Beban Penyisihan Dana Bergulir
9	1	9	2	1	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9	1	9	3		Beban Lain-lain
9	1	9	3	1	Beban Lain-lain
9	2				BEBAN TRANSFER
9	2	1			Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
9	2	1	1		Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	1	1	1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	1	1	2	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Provinsi
9	2	1	1	3	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
9	2	1	1	4	Dst.....
9	2	2			Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
9	2	2	1		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9	2	2	1	1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa
9	2	2	1	2	Dst.....
9	2	3			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
9	2	3	1		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9	2	3	1	1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9	2	3	1	2	Dst.....
9	2	3	2		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota

Kodifikasi					URAIAN
9	2	3	2	1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9	2	3	2	2	Dst.....
9	2	4			Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	1		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	1	1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9	2	4	1	2	Dst.....
9	2	5			Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
9	2	5	1		Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9	2	5	1	1	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9	2	5	1	2	Dst.....
9	2	6			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
9	2	6	1		Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9	2	6	1	1	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....
9	2	6	1	2	Dst.....
9	3				DEFISIT NON OPERASIONAL
9	3	1			Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9	3	1	01		Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9	3	1	01	1	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9	3	1	01	2	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9	3	1	01	3	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9	3	1	01	4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9	3	1	01	5	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9	3	1	01	6	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9	3	1	01	7	Dst
9	3	2			Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9	3	2	01		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9	3	2	01	1	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9	3	2	01	2	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9	3	2	01	3	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9	3	2	01	4	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9	3	2	01	5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9	3	2	01	6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah

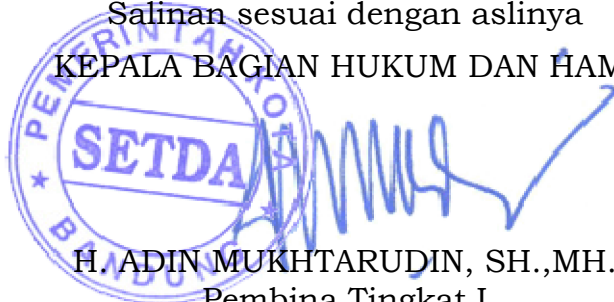
Kodifikasi					URAIAN
					Kabupaten/Kota - LO
9	3	2	01	7	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9	3	2	01	8	Dst
9	3	3			Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	2	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9	3	3	01	3	Dst
9	4				BEBAN LUAR BIASA
9	4	1			Beban Luar Biasa
9	4	1	1		Beban Luar Biasa
9	4	1	1	1	Beban Tak Terduga
9	4	1	1	2	Beban Bencana Alam
9	4	1	1	3	Beban Luar Biasa Lainnya

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008

